

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 - Triwulan 4																													
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4																					16	27				
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	62				55								0		0		0		0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
1.1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik	%	98.79	5,127,839,100		0	97.81	6,688,317,700		361,513,450		556,706,689		1,219,119,529	97.81	2,174,232,128	97	4,311,571,796	100	64.46	97	4,311,571,796	98.19	84.08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	belum seluruh PNS melaporkan SKP 2022		
		Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	%	90.81	3,946,880,500		0	88	0		0		0		0	74.89		0	74	0	84.09	0	74	0	81.49	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	terdapat 25% tidak sesuai kualifikasi	
		Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN	%	13.76	14,653,786,750		0	3.93	0		0		0		0	0.69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	nilai kualifikasi sebesar 11.67
		Persentase Sistem Informasi ASN yang Terintegrasi	%	100	16,922,964,805		0	20	0		0		0		0	20		0	20	0	100	0	20	0	20	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	realisasi terintegrasi 1 aplikasi yaitu e kompetensi dari target yang harus terintegrasi dengan penilaian kinerja, kompetensi, penegakan disiplin, dan pengembangan pegawai
1.1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	Persentase	100	6,057,054,000		0	100	2,541,437,750		11,449,450		99,585,702		395,488,864	100	1,234,524,798	100	1,741,048,814	100	68.51		1,741,048,814	0	28.74	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	508 PPK sesuai jabatan yang dilamar		
		Persentase Kualitas Data ASN	Persentase	100	3,515,873,875		0	100	0		0		0		0	100		0	100	0	100	0		0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100% data valid
		Persentase fasilitas kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korgri)	Persentase	100	7,350,036,930		0	100	0		0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.1.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah usulan formasi pemenuhan rencana kebutuhan ASN	formasi					863	57,889,000	805	0	51	0		16,890,809		28,268,742	51	45,159,551	0	78.01					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	formasi diajukan sesuai dengan rencana kebutuhan tahun 2022		
1.1.1.2	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pemenuhan kebutuhan ASN melalui Seleksi Pengadan ASN lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Orang					250	847,870,500		1,000,000		14,945,500		2,155,000		336,716,641		354,817,141	0	41.85					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Proses hasil seleksi PPPK guru dan tenaga kesehatan masih menunggu penilaian dari pusat dan untuk PPPK formasi teknis dalam proses seleksi administrasi		
1.1.1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitas yang diberikan terhadap lembaga profesi ASN	Kegiatan					13	1,040,819,850	1	10,449,450	4	46,846,644	4	230,940,394	4	562,481,638	4	850,718,126	0	81.74					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	target sesuai layanan dalam DPA		
1.1.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian	Kegiatan					4	333,921,500		0		26,056,248		17,785,855	4	236,619,723	4	280,461,826	100	83.99					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai target 4 pengembangan aplikasi SMPeg		
		Jumlah Sosialisasi Aplikasi Kepegawaian	Kegiatan					1							1		1		100							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;			
1.1.1.5	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah badge PNS yang dicetak	buah					2000	260,936,900	397	0	595	11,737,310	796	127,716,806	173	70,438,054	173	209,892,170	0	80.44					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai data mutasi pegawai dan usulan dari perangkat daerah dikarenakan hilang dan rusak		
		Jumlah buku DUK yang dicetak	buku					6		6								6		100						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai target		
		Jumlah Buku Kumpulan Peraturan Kepegawaian yang dicetak	buku					50						50				50		100						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai target		
		Jumlah buku profil yang dicetak	buku					50		50								50		100						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai target		
		Jumlah buku Saku yang dicetak	buku					300					300					300		100						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai target		
		Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Elektronik Kepegawaian	Laporan					12			3		3		3			3		0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai target		
		Jumlah Pemutakhiran Data Fisik ASN pada Aplikasi Arsip	data					2500		1242		925		837		32		32		0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	melebihi target dikarenakan menyesuaikan adanya perubahan data pegawai		
		Jumlah rekonsiliasi Data kepegawaian	Kegiatan					1								1		1		100						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai target		
		Jumlah Standing Brosur Kepegawaian	set					0										1		0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;			
		1.1.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	Persentase	91.22	3,539,499,500		0	87	1,751,794,450		26,773,000		331,472,122		210,846,337		332,675,952		901,767,411	0	51.48	0		901,767,411	0	25.48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu	Persentase	100	407,381,000		0	100	0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1.1.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah monitoring PNS yang dipekerjakan	Kegiatan					1	99,710,600		0		8,942,842		56,456,387		17,088,742		82,487,971	0	82.73					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;			
		Jumlah penerbitan SK Mutasi antar Instansi Vertikal/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kab/Kota	SK					30		8		7		12		11		11		0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	melebihi target karena banyaknya mutasi masuk ke balikpapan		
		Jumlah penerbitan SK Mutasi Pelaksana antar PD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	SK					20		11		5		1		4		4		0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	melebihi target karena pemenuhan formasi jabatan yang kosong di perangkat daerah		
		Jumlah penerbitan SK Pensiun PNS	SK					200											0							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;			
		Jumlah penerbitan SK Perpanjangan THL	SK					1		1								1		100						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Sesuai target		
		Jumlah penerbitan surat KGB	Surat					10				4				6		6		0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Sesuai target		
		Jumlah penerbitan SK Mutasi JPT Pratama, Administrator dan Pengawas	SK					4	1,582,083,900	4	24,990,000	2	319,393,280	1	142,468,150	65	269,921,450	65	756,772,880	0	47.83					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	melebihi target karena adanya mutasi dan rotasi dan pemenuhan jabatan kosong		
Jumlah Pengisian JPT Pratama	JPT					4		9						1		1		0						Badan Ke					

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Persentase Penurunan Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana	%	5				5								11.62		11		220		11		220		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a Peningkatan kinerja dari bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang didukung dari peningkatan kinerja UPTD PBD dan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang berada di kota Balikpapan, sehingga mendapatkan apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang Memberikan penghargaan yang kepada Kota Balikpapan sebagai Terbaik I Kategori Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.	
1.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	94	16,580,000,000		0	85	1,497,265,000	9.47	185,746,300	7.50	388,264,428	9.36	67,296,240	53.33	916,681,479	53	1,557,988,447	62.35	104.06	53	1,557,988,447	56.38	9.4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja Program tercapai	
1.1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	500	4,145,000,000		0	100	350,000,000	6.20		0	7.09	26,272,400	26.62	6,195,600	54.31	297,315,416	93	329,783,416	93	94.22	93	329,783,416	18.6	7.96	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai
1.1.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen					1	350,000,000			0		26,272,400		6,195,600	1	297,315,416	1	329,783,416	100	94.22					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target Dokumen Renja 2023
1.1.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi/Komunikasi/Informasi dan Edukasi(KIE)Rawan Bencana Kabupaten/Kota(Per Jenis Bencana)Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang						0			0			0		0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan						0			0			0		0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
1.1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase CakupanPelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	500	7,525,000,000		0	100	665,000,000	10.47	102,504,900	14.09	197,084,677	0.80	46,250,640	74.00	303,322,613	98	649,162,830	98	97.62	98	649,162,830	19.6	8.63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai	
1.1.2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen					1	0			0			0		0		0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Perubahan Anggaran 2022, Pagu Anggran di Rp. 0 kan	
1.1.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen					30	200,000,000	1	24,807,500	3	166,307,126	1	6,681,707		0	1	197,796,333	0	98.9					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran dan Kinerja sudah Teralisasi pada TW II Fokus Program Prioritas	
1.1.2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit					15	150,000,000			0			0	2	146,854,780	2	146,854,780	13.33	97.9					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Fokus Program Prioritas	
1.1.2.4	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen					6	25,000,000			0			0	6	24,987,136	6	24,987,136	100	99.95					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target Dokumen Renja 2023	
1.1.2.5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan					2	80,000,000			0		2	23,613,875		52,599,809	2	76,213,684	100	95.27					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran sudah Teralisasi	
1.1.2.6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen					10	100,000,000	9	77,697,400	1	21,102,151		0		0	1	98,799,551	0	98.8					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran sudah Teralisasi pada TW II	
1.1.2.7	Penyusunan Rencana Kontijensi	tersedianya dokumen rencana kontijensi	dokumen					1	10,000,000			0	1	9,675,400		0	1	9,675,400	100	96.75						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target (KAK Renkon Banjir)	
1.1.2.8	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang					3	100,000,000			0		1	15,955,058	2	78,880,888	2	94,835,946	0	94.84					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran hanya di laksanakan mendukung kegiatan Apel-Apel Gabungan	
1.1.2.9	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang						0			0			0		0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
1.1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	500	2,555,000,000		0	100	232,265,000	21.20	5,544,000	8.80	143,805,200	10.00	14,850,000	60.00	66,483,450	99	230,682,650	99	99.32	99	230,682,650	19.8	9.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai	
1.1.3.1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	persentase kecepatan respon kurang dari 24 setiap penetapan status KLB	Jenis					12	9,375,000			0			0	100	9,281,250	100	9,281,250	0	99					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran akan dilaksanakan pada saat KLB	
1.1.3.2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%					100	5,000,000			0		100	3,960,000		0	100	3,960,000	100	79.2					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran dan Kinerja sudah Teralisasi pada TW III Kegiatan Kelurahan	
1.1.3.3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang					100	100,000,000	5	5,544,000	50	44,550,000	10	10,890,000	35	38,808,000	35	99,792,000	0	99.79					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Menyesuaikan dengan kejadian bencana	
1.1.3.4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang					25	99,440,000			0	5	99,255,200		0	5	99,255,200	0	99.81						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Fokus Program Prioritas	
1.1.3.5	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terhadapepidemi/wabah dalam satu tahun	Laporan					100	18,450,000			0			0	100	18,394,200	100	18,394,200	100	99.7					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran sudah Teralisasi	
1.1.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	400	2,355,000,000		0	60	250,000,000		77,697,400		21,102,151		0	25	249,560,000	25	348,359,551	41.67	139.34	25	348,359,551	6.25	14.79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai	
1.1.4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan					5	250,000,000			0			0	50	249,560,000	50	249,560,000	0	99.82					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran yg seharusnya dilaksanakan di dalam daerah menjadi di luar daerah	
1.1.4.2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen						0	9	77,697,400	1	21,102,151		0		0	1	98,799,551	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran sudah Teralisasi pada TW II	
2	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	%	5				5								13.15		13		260		13		260		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiaan yang lebih masih dalam melakukan komunikasi, sosialisasi dan edukasi kebakaran kepada masyarakat yang berda di kawasan rawan bencana dan Peningkatan Respon time dari Bidang kedaruratan dan Logistik Ketika mendapat laporan potensi kebakaran serta biden rehabilitasi dan Rekontruksi yang membentuk REDKAR dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Selain dari pada itu peran UPTD PBD yang tersebar di setiap kecamatan sangat membantu untuk mencapai respon time kebakaran sehingga kejadian kebakaran bisa ditekan.	
2.1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN dan PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	95	35,120,000,000		0	85	7,634,862,000	17.92	1,117,146,276	25.25	1,929,456,370	27.35	1,597,264,701	7.00	2,722,515,236	7	7,366,382,583	8.24	96.48	7						

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4																					16	27			
2.1.5.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan					100	150,000,000	10	28,116,000	50	35,442,000	30	60,984,000	10	25,344,000	10	149,886,000	0	99.92				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran menyesuaikan kejadian bencana		
2.1.5.2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang distandarisasi	Jenis					60	50,000,000		0		0	100	49,395,000	0	100	49,395,000	0	98.79					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target		
2.1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit					20	49,875,000		0	5	49,838,250		0	5	49,838,250	25	99.93						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran dan Kinerja sudah Teralisasi pada TW II		
2.1.5.4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah diklat aparaturnya pencarian dan pertolongan kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi dalam satu tahun	Kegiatan					1	200,000,000		0		0	12	6,618,600		189,900,000	12	196,518,600	0	98.26					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai fokus pada water rescue 1 kegiatan tetapi jumlah orangnya menjadi 50 org	
3	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	34				27						30		30		111.11		30		88.24			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Walaupun dari data awal tidak ada (NA) sehingga tidak dapat terukur tetapi secara Kinerja Organisasi ada penghargaan yang di capai tingkat provinsi, dan secara sampling nasional BPBD Kota Balikpapan satu satunya BPBD pada Level 4 (Empat) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Serta dari suvey IKM Internal dan Eksternal menunjukan hasil yang baik		
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78	150,898,000,000		0	70	27,697,058,600	17	5,766,572,380	13	6,856,708,336	27	7,622,384,546	15	6,946,723,508	15	27,192,388,770	21.43	98.18	15	27,192,388,770	19.23	18.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja Program tercapai	
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	50,000,000		0	70	10,000,000		0		0	45	3,965,900	25	3,930,500	25	7,896,400	35.71	78.96	25	7,896,400	33.78	15.79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai	
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					1	10,000,000						3,965,900	1	3,930,500	1	7,896,400	100	78.96					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target Dokumen Renja 2023	
3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen						0		0		0		0		0	0	100	0						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen						0		0		0		0		0	0	100	0						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
3.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen						0		0		0		0		0	0	100	0						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
3.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen						0		0		0		0		0	0	100	0						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
3.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan						0		0		0		0		0	0	100	0						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
3.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan						0		0		0		0		0	0	100	0						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	500	108,000,000,000		0	100	21,308,691,000	22.18	4,643,633,061	27.33	5,637,825,812	11.64	5,881,172,254	38.00	4,916,149,329	98	21,078,780,456	98	98.92	98	21,078,780,456	19.6	19.52	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai	
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					165	21,308,691,000		4,643,633,061		5,637,825,812		5,881,172,254	162	4,916,149,329	162	21,078,780,456	98.18	98.92					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Perubahan Anggran 2022 Indikator tercapai sesuai target	
3.1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen						0		0		0		0		0	0	100	0						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
3.1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen						0		0		0		0		0	0	100	0						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
3.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan						0		0		0		0		0	0	100	0						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
3.1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen						0		0		0		0		0	0	100	0						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
3.1.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen						0		0		0		0		0	0	100	0						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
3.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100		0		92		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
3.1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	90		0		90		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
3.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	500	5,230,000,000		0	100	1,100,000,000	5.00	0	33.69	235,457,384	36.32	598,606,129	20.00	237,931,783	94	1,071,995,296	94	97.45	94	1,071,995,296	18.8	20.5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai	
3.1.5.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					4		0		0		0		0		0	0	0						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Perubahan Anggaran 2022, Pagu Anggran di Rp. 0 kan	
3.1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					325	350,000,000		0	325	208,313,700	25	18,381,600		121,424,300	25	348,119,600	0	99.46					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Menunggu pengesahan Anggran Perubahan Tahun 2022 Indikator tercapai sesuai target Kenapa jumlah baju lebih banyak dari pada jumlah pegawai dikarenakan pegawai baru yang masuk mendapatkan 2 seragam BPBP dan Damkar	
3.1.5.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					100	600,000,000		0		0	50	509,009,929		67,137,483	50	576,147,412	0	96.02						Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Pada saat pembahasan APBD terdapat penambahan Kegiatan Pemadam II
3.1.5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang					5	150,000,000		0	17																

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN								Sedang	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								30.67	99.57			27.66	16.13					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan 2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Bappeda Litbang dalam mencapai Sasaran 3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. Berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Kepmen Nomor 050 Tahun 2020 menjadi hambatan dalam melakukan penyesuaian indikator kinerja karena berubahnya nomenklatur program dan kegiatan serta adanya sub kegiatan sesuai peraturan tersebut. Sedangkan dalam dokumen Renstra periode tahun 2016-2021 masih menggunakan nomenklatur sesuai Permendagri 13 Tahun dan tahun 2021 merupakan periode akhir Renstra Perangkat Daerah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan revisi; 2. Adanya pandemi corona virus diseas 19 (COVID 19) sejak awal triwulan I 2020, memberikan dampak terhadap perubahan target kinerja dan anggaran																								
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																												

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kota Balikpapan

SILVIA RAHMADINA
197410041993112001

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2022 - Triwulan 4																										
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	27			
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP				WTP								0		0		0		Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	%	100	126,753,096,000	0	100	23,945,613,200	27,557,113,700	10,686,528,254	1,286,644,252	100%	26,810,876,216	100	66,341,162,422	100	277.05	100	66,341,162,422	100	52.34	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai			
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase	100	14,396,985,000	0	100	3,777,933,400	16,815,566,700	224,320,400	247,824,350	100%	1,660,950,465	100%	18,948,661,915	0	501.56	18,948,661,915	0	131.62	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai				
1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	dokumen			2	139,878,800		0	2	119,185,650		6,962,350	2	126,148,000	100	90.18					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	dokumen			2	55,882,800		0	2	3,252,400		174,050,500	2	177,302,900	100	317.28					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
1.1.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	OPD			36	556,649,300		0	36	525,433,096		525,433,096	36	525,433,096	100	94.39					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
1.1.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	DPA			1500	281,924,300	2876	0		36,824,000		236,793,540	2876	273,617,540	0	97.05					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Penambahan Sub Kegiatan Baru pada OPD			
1.1.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	DPA			1500	297,188,400		0		44,375,000	1698	190,354,112	1698	234,729,112	0	78.98					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Penambahan Sub Kegiatan Baru pada OPD			
1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen PERDA APBD dan PERWALI Penjabaran APBD	dokumen			2	249,998,500	2	7,022,814,600	59,834,000	34,512,000		57,038,750	2	7,174,199,350	100	2869.7					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
1.1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PERDA Perubahan APBD dan PERWALI Penjabaran Perubahan APBD	dokumen			2	299,998,900		7,022,814,600	2	59,834,000		34,512,000	2	7,174,199,350	100	2391.41					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
1.1.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran Ketetapan Kepala Daerah(perda,Perwal,SK, SE,SI)	dokumen			11	621,423,400	11	1,435,830,000	5	36,412,200		0	12	411,307,217	12	1,883,549,417	0	303.1			Badan Pengelola Keuangan Daerah;	"Bertambahnya Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran Ketetapan Kepala Daerah"			
1.1.1.9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen perencanaan anggaran pendapatan APBD Mumi dan perubahan	dokumen			2	774,989,000	1	1,334,107,500		31,416,200	1	11,987,300		1,972,150	1	1,379,483,150	0	178			Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
1.1.1.10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis perencanaan anggaran	Kali			1	500,000,000		0		0		0		0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
		Jumlah sosialisasi perencanaan penganggaran daerah	Kali			1			0		0		0		0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
1.1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan	Persentase	100	8,089,257,500	0	100	1,859,900,000	2,632,722,000	392,738,946	246,163,126	100%	1,051,639,355	100%	4,323,263,427	0	232.45		4,323,263,427	0	53.44	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai			
1.1.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen dan koordinasi pengelolaan Kas Daerah	dokumen			4	75,000,000	1	916,271,700	1	57,929,242	1	5,000,602	1	979,201,544	0	1305.6					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
1.1.2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen penyiapan,pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran Kas SPD	dokumen			432	75,000,000	40	1,410,100,000		13,229,600	72	21,553,772	104	1,444,883,372	0	1926.51					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Kebijakan pada penentuan SPD berubah dari triwulan menjadi Semester			
1.1.2.3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah SP2D yang Tercetak	lembar			23000	550,000,000	1687	306,350,300	4430	235,651,472	5731	193,778,357	11311	112,625,895	11311	848,406,024	0	154.26			Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Bertambahnya anggaran pada OPD			
1.1.2.4	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaanDana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	dokumen			2	100,000,000		0		0	51,021,855	2	24,772,474	2	75,794,329	100	75.79				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
1.1.2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasdaerah, laporan Aliran Kasdan pelaksanaan pemungutan pemotongan dan penyerotoran perhitungan pihak ke tiga	Laporan			532	125,000,000		0		61,164,050		1,362,914		55,000,000	117,526,964	0	94.02				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
		Jumlah Dokumen Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	dokumen			1										0						Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.2.6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuanganyang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jawaban sub kegiatan	dokumen			7	64,900,000		0	24,764,582		0		0	24,764,582	0	38.16					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	"Dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jawaban menunggu pembahasan dari Bagian Hukum"			
1.1.2.7	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD	OPD			36	870,000,000		0	36		0	832,686,612	36	832,686,612	100	95.71					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
1.1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase	100	16,277,430,000	0	100	2,677,179,800	0	301,778,908	792,656,776	100%	322,058,537	100%	1,416,494,221	0	52.91		1,416,494,221	0	8.7	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai			
1.1.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan akuntansipenerimaan dan pengeluaran kas daerah	dokumen			2	80,000,000		0	4,307,100	61,713,944	2	0	2	66,021,044	100	82.53					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
1.1.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah berita acara Rekonsiliasi laporan keuangan OPD	berita acara			36	89,042,800		0		10,003,450	36	14,017,860	36	24,021,310	100	26.98					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
1.1.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan			36	125,000,000		0		12,086,842		72,886,955		84,973,797	0	67.98					Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan pemerintah daerah	dokumen			7	125,000,000		0	7	4,900,000		0	7	4,900,000	100	3.92					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai			
1.1.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabananggaran jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten																								

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV					12				13		14		15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Bulanan Jumlah laporan keuangan Semesteran jumlah laporan keuangan Triwuwulanan	dokumen Laporan Laporan Laporan	 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp 	K Rp

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 - Triwulan 4																											
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	%	83.31				26.4						0		0		0		0		0		0		Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Milyar	1321.97	45,963,357,552	0	780.71	5,054,684,300	143.43	435,614,354	131.17	908,076,656	222.95	928,369,351	441.45	2,128,548,810	441	4,400,609,171	56.54	87.06	441	4,400,609,171	33.36	9.57	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1.1.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	Persentase	17.08	45,963,357,552	0	5.02	5,054,684,300	0.18	435,614,354	0.91	908,076,656	1.70	928,369,351	1.98	2,128,548,810	1,98	4,400,609,171	0	87.06		4,400,609,171	0	9.57	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1.1.1.1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen kajian potensi pajak daerah	dokumen					2	230,000,000		500,000		14,375,000		13,570,476	2,00	199,467,000	2,00	227,912,476	0	99.09					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kegiatan sosialisasi	Kegiatan					2	375,000,000		27,984,000		148,143,621		22,992,000	2,00	146,339,525	2,00	345,459,146	0	92.12					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jenis					2	399,420,000		68,433,354		59,522,812		57,707,277	1,00	201,295,417	1,00	386,958,860	0	96.88					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	dokumen					1	249,999,600				116,452,028		95,529,170	1,00	36,373,600	1,00	248,354,798	0	99.34					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	dokumen					1	1,527,730,500		330,447,000		190,186,750	1,00	152,272,989		737,357,700	1,00	1,410,264,439	0	92.31					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	dokumen					1	874,960,000		0		85,437,181		380,660,647		68,137,449		534,235,277	0	61.06					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya penetapan wajib pajak daerah	dokumen					1	204,514,100		0		12,993,519		72,099,786	1,00	96,840,188	1,00	181,933,493	0	88.96					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	dokumen					1	149,998,800		0		28,218,420		0	1,00	110,217,000	1,00	138,435,420	0	92.29					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.9	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SPJT yang disampaikan kepada Wajib Pajak	SPJT					225000	100,000,000			0	35,891,733		62,021,750	198,308,00	464,535	198,308,00	98,378,018	0	98.38					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya keberatan pajak daerah	Dokumen/Laporan					1	80,000,000		0		15,228,592		10,777,578	1,00	53,912,280	1,00	79,918,430	0	99.9					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Kegiatan					2	863,061,300		8,250,000		201,627,000		60,737,678	1,00	478,144,136	1,00	748,758,814	0	86.76					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BP2DRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	32				27										0		0		0		0		Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	86	175,627,621,450	0	82	45,097,715,090		42,680,605,602		5,474,597,623		6,638,390,093	88.93	9,299,153,362	88	64,092,746,680	107.32	142.12	88	64,092,746,680	102.33	36.49	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Poin)	Poin	75	210,000,000	0	65	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	100	143,070,230,689	0	84	42,253,227,290		42,253,227,290		4,408,397,091		6,088,988,213	92.70	8,598,420,340	92	61,349,032,934	109.52	145.19	92	61,349,032,934	92	42.88	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen					3	42,253,227,290		42,253,227,290		4,408,397,091		6,088,988,213	3,00	8,598,420,340	3,00	61,349,032,934	0	145.19					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	100	1,213,000,000	0	80	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.4	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	85	1,785,000,000	0	77	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	88	13,149,421,315	0	78	1,718,231,900		278,712,122		655,755,596		331,018,300	78.75	398,098,257	78	1,663,584,275	100	96.82	78	1,663,584,275	88.64	12.65	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
2.1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis					10	292,769,000	10,00	173,450,000		12,540,000		6,000,000		97,291,500	10,00	289,281,500	0	98.81					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Jenis					30	468,043,000		54,763,070	20,00	255,607,850		37,687,150	10,00	83,011,775	10,00	431,069,845	0	92.1					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jenis					30	547,419,900				290,706,475	30,00	163,179,450		83,184,375	30,00	537,070,300	0	98.11					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.5.4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	porshi					660	50,000,000				18,563,450	300,000	3,107,500		24,677,525	300,000	46,348,475	0	92.7					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Kali					55	360,000,000	12,00	50,499,052	15,00	78,337,821	28,00	121,044,200		109,933,082	28,00	359,814,155	0	99.95					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	88	4,163,068,726	0	80	109,000,000		0		87,945,000		10,100,000	78.23	5,744,250	78	103,789,250	97.5	95.22	78	103,789,250	88.64	2.49	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
2.1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya	Jenis					4	109,000,000		0	3,00	87,945,000		10,100,000	1,00	5,744,250	1,00	103,789,250	0	95.22					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	96	6,422,350,720	0	87	1,017,255,300		148,666,190		322,499,936		208,283,580	79.23	296,890,515	79	976,340,221	90.8	95.98	79	976,340,221	82.29	15.2	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening					7	175,031,000		24,182,240		66,204,011		24,045,155	7,00	23,922,615	7,00	138,354,021	0	79.05					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS	Orang					34	842,224,900		124,483,950		256,295,925		184,238,425	34,00	272,967,900	34,00	837,986,200	0	99.5					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
		Jumlah Tenaga Profesional	Orang					1							1,00			1,00		0						Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
		Luasan gedung kantor yang dilayani	m2					1000							1,000,00			1,000,00		0						Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
		Jumlah kendaraan dinas operasional/apangan Roda 4 dan 2 yang terbayar jasa pemeliharaannya dan pajak serta perizinanya	Unit					77		11,00					24,00			24		31.17						Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
		Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Jenis					10							10,00			10,00		0						Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	95	5,614,550,000	0	85	0		0		0		0	77.82	0	77	0	90.59	0	77	0	81.05	0		Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.8.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																										
Rata-rata capaian Kinerja (%)																37.62	91.19			31.63	10.8						
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																0.39	88.38										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																Sangat Rendah	Tinggi										

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 - Triwulan 4																												
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	56.28				56.22						51.51		51		91.07		51		90.62			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1. Karena sudah dilakukan proses cascading secara holistic dari kepala Perangkat Daerah sampai level staf, dan cascading tersebut sudah diterjemahkan kedalam SKP tiap pegawai; 2. Dalam proses perencanaan selalu dilakukan desk untuk penyusunan dan verifikasi untuk memastikan perencanaan yang dilakukan secara tahunan (Renja) inline dengan perencanaan 5 tahunan (Renja); 3. Adanya pemahaman/pengetahuan yang relative merata dimiliki masing-masing pengampu kegiatan; 4. Melakukan evaluasi per triwulan terhadap rencana yang telah di tetapkan, baik pada target kinerja maupun realisasi keuangan; 5. Penggunaan system aplikasi SIPD membantu dan memastikan target kinerja dan indikator kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
1.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	32.796	18,582,614,000		0	32.76	3,300,000,000	97,124,000	29.96	868,774,947	575,589,586	1,288,740,124	29	2,830,228,657	90.63	85.76	29	2,830,228,657	88.43	15.23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Capaian Kinerja berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sakip Kota Balikpapan Tahun 2021 yang dievaluasi oleh Tim KemempnanRB pada tahun 2022				
1.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Nilai	1.98	6,146,000,000		0	0	970,000,000	34,946,000		377,178,227	159,891,763	2.38	365,744,976	2	937,760,966	0	96.68	2	937,760,966	101.01	15.26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pada awal tahun perencanaan Renstra 2021-2026, indikator ini masih dianggap NA pada tahun 2022, namun pada pelaksanaannya ternyata indikator ini mampu diukur			
1.1.1.1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	berita acara					1	970,000,000	34,946,000	1	377,178,227	159,891,763	365,744,976	1	937,760,966	100	96.68							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
1.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	Persentase	100	8,504,000,000		0	100	1,450,000,000	62,178,000		269,082,240	105,650,000	100	578,421,050	100	1,015,331,290	100	70.02		1,015,331,290	0	11.94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan			
1.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan					20	1,200,000,000	49,550,000		176,650,000	20	82,550,000		516,550,000	20	825,300,000	100	68.78					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
1.1.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Forum Satu Data	Kali					3	150,000,000	12,628,000		92,085,920	3	23,100,000		10,306,000	3	138,119,920	100	92.08					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
1.1.2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	buku					1	100,000,000		0	346,320	1	0		51,565,050	1	51,911,370	100	51.91					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
1.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	Nilai	3.14	3,932,614,000		0	0	880,000,000	0		222,514,480	310,047,823	2.48	344,574,098	2	877,136,401	0	99.67	2	877,136,401	63.69	22.3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pada awal tahun perencanaan Renstra 2021-2026, indikator ini masih dianggap NA pada tahun 2022, namun pada pelaksanaannya ternyata indikator ini mampu diukur			
1.1.3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan					20	130,000,000	0		23,154,480	20	60,864,150		44,590,160	20	128,608,790	100	98.93					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
1.1.3.2	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Capaian koodinasi Pengendalian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen RPJMD dan RKPD Kota Balikpapan	Laporan					3	750,000,000	0		199,360,000	20	249,183,673		299,983,938	20	748,527,611	0	99.8					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
1.1.3.3	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Capaian Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Persentase					20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	65				60						57.88		57		95		57		87.69			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1. Terdapat pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri terkait Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award dan Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022. Buku Pedoman dan Penjelasan Teknis Indikator ini disusun berdasarkan Surat Mendagri No 002.6/3857/SJ tanggal 06 Juli 2022 perihal Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2022. Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait dengan gambaran umum, kriteria dan ketentuan penilaian serta indikator teknis dalam mengukur Indeks Inovasi Daerah secara lebih operasional dan komprehensif; 2. Peningkatan kapasitas SDM sebagai leading sector pelaksanaan ID, dengan mengikuti Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah; 3. Waktu penginputan untuk pengisian Indeks Inovasi Daerah (Penjaringan Data) yang cukup panjang, yaitu dari bulan Juli sampai dengan September 2022 (3 bulan). Hal ini memberikan cukup waktu dan kesempatan untuk melengkapi data-data sebagaimana yang dipersyaratkan; 4. Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah dan semua pihak yang terkait, dalam pemenuhan data untuk melengkapi persyaratan kegiatan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022.		
2.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%	100	16,706,800,000		0	100	3,575,000,000	8,008,000		62,545,725	449,758,146	100	1,145,362,890	100	1,665,074,761	100	46.59	100	1,665,074,761	100	9.97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan			
2.1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	1,538,000,000		0	100	500,000,000	0		74,585,100	100	323,652,803	100	398,237,903	100	79.65		398,237,903	0	25.89	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan				
2.1.1.1	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan n Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan					1	400,000,000	0		0	1	74,585,100		323,652,803	1	398,237,903	100	99.56					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
2.1.1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	data base hasil penelitian dan peraturan	Laporan					1	100,000,000	0		0		0		0	0	0							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	3,890,000,000		0	100	650,000,000	0		62,545,725	187,173,195	100	0	100	249,718,920	100	38.42		249,718,920	0	6.42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan			
2.1.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen					2	200,000,000	0		0		0		0	0	0							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.2	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Kesehatan	dokumen					1	250,000,000	0		62,545,725	1	187,173,195		0	1	249,718,920	100	99.89					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
2.1.2.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	dokumen					1	200,000,000	0		0		0		0	0	0							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
2.1.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	6,722,000,000		0	100	1,650,000,000	0	0	0	0	179,922,000	100	503,666,481	100	683,588,481	100	41.43		683,588,481	0	10.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
2.1.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Pekerjaan Umum	dokumen					1	600,000,000	0		0	2	179,922,000		403,788,681	2	583,710,681	0	97.29					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
2.1.3.2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen						100,000,000	0	0	0	0	0	1	99,877,800	1	99,877,800	0	99.88					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
2.1.3.3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	dokumen					0	0	0		0		0		0	0	0							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
2.1.3.4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	dokumen					1	150,000,000	0		0		0		0	0	0							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
2.1.3.5	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	dokumen					1	800,000,000	0		0		0		0	0	0							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
2.1.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	dokumen	5	4,556,800,000		0	6	775,000,000	0		8,008,000	0	0		8,077,851	6	318,043,606	6	334,129,457	100	43.11		334,129,457	0	7.33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
2.1.4.1	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan					1	175,000,000	0		0	0	0	0	0	1	163,852,319	1	163,852,319	100	93.63			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan		
2.1.4.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara n Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan					1	100,000,000	0		0	0	0	0	0	1	94,390,000	1	94,390,000	100	94.39			Bad			

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan									
							I		II		III		IV																
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85.7	8,178,767,000	0	85.5	1,885,750,000	80,743,600	645,539,791	82.91	587,584,298	497,196,529	82	1,811,064,218	96.47	96.04	82	1,811,064,218	95.68	22.14					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					15	10,000,000	0	0	0	4	2,851,590	2	3,936,060	2	6,787,650	0	67.88							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					10	525,000,000	6	0	1	284,342,500	2	169,680,150	1	55,250,250	1	509,272,900	0	97						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					3	463,250,000	3	49,794,690	3	90,409,307	3	105,357,771	3	188,307,947	3	433,869,715	100	93.66						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Paket					3	125,000,000	3	4,665,200	3	54,218,670	3	20,377,180	3	28,549,400	3	107,810,450	100	86.25						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen					2	2,500,000	0	0	0	2	495,000	0	1,980,000	0	2,475,000	0	99							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.2.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					500	40,000,000	150	1,456,400	197	4,955,500	103	7,994,250	335	16,468,350	335	30,874,500	0	77.19						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					236	720,000,000	41	24,827,310	87	211,613,814	108	280,828,357	91	202,704,522	91	719,974,003	0	100						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85.65	3,058,000,000	0	85.45	585,000,000	90,221,462	127,784,965	81.74	120,657,213	151,729,922	81	490,393,562	95.29	83.83	81	490,393,562	94.57	16.04						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					2	3,000,000	2	721,000	2	657,725	2	736,000	2	500,000	2	2,614,725	100	87.16						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					5	18,000,000	4	2,711,010	4	2,763,988	4	4,505,358	4	4,580,781	4	14,561,137	0	80.9						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					3	30,000,000	2	5,841,000	2	3,894,000	2	8,917,920	2	7,788,000	2	26,440,920	0	88.14						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					4	534,000,000		80,948,452		120,469,252		106,497,935		138,861,141		446,776,780	0	83.67						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	81.25	2,370,000,000	0	81.05	710,000,000	45,302,545	53,625,463	82.01	97,231,214	332,831,047	82	528,990,269	101.23	74.51	82	528,990,269	100.92	22.32						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					10	240,000,000	4	29,016,775	2	22,435,663	2	37,637,100	2	70,967,871	10	160,057,409	100	66.69						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					12	120,000,000	4	16,285,770	2	20,200,800	6	25,403,339	0	37,489,663	12	99,379,572	100	82.82						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.4.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					3	30,000,000		0		0	3	29,961,675		0	3	29,961,675	100	99.87						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.4.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					9	70,000,000	0	0	1	10,989,000	5	4,229,100	0	31,030,050	6	46,248,150	66.67	66.07						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3.1.4.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Gedung					1	250,000,000		0		0	1	0		193,343,463	1	193,343,463	100	77.34						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			74.76	70.92					48.37	9.68			
Predikat Kinerja																			Sedang	Sedang					Sangat Rendah	Sangat Rendah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			51.78	68.54									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Rendah	Sedang									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			76.8	73.89					50.42	15.85			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Tinggi	Sedang					Sangat Rendah	Sangat Rendah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			95.7	70.32					94.7	13.19			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Tinggi	Sedang					Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Faktor Pendorong Kinerja Perangkat Daerah																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Faktor Penghambat Kiner Perangkat Daerah																									
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umur	74.58				74.5						74.78		74		100		74		99.22		Dinas Kesehatan	Upaya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk meningkatkan angka harapan hidup diantaranya melakukan inovasi kesehatan di setiap siklus kehidupan manusia, mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut. Inovasi kesehatan juga dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Inovasi kesehatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait. b. Komitmen bersama dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu layanan kesehatan pada seluruh lini fasilitas pelayanan kesehatan c. Kebijakan dan pendanaan dari pemerintah kota dalam hal pengawasan kualitas layanan publik d. Komitmen yang tinggi dari segenap jajaran untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat e. Dukungan yang tinggi dari pihak pemerintah baik pemerintah kota, provinsi dan pusat. f. Dukungan dari masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat g. Beberapa elemen pendukung telah berbasis sistem online sehingga sangat signifikan mempunyai daya ungkit dalam menunjang pelayanan kepada publik		
1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	1,297,463,671,856			80	188,858,898,119	3,576,439,861		56,803,594,503		24,263,074,103	84.34	77,182,862,361	84	161,825,970,828	105	85.69	84	161,825,970,828	98.82	12.47	Dinas Kesehatan		
1.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian kesehatan	%	484.42	381,551,890,372	0		93.1	33,815,538,393	25	176,174,000	25	558,792,109	25	2,596,812,496	25	21,534,399,230	100	24,866,177,835	107.53	73.53	100	24,866,177,835	20.64	6.52	Dinas Kesehatan	
		Presentase Sapras memenuhi Standar Kesehatan	%	70	209,600,493,904			60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan		
1.1.1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	Unit					1	6,075,000,000			0		0		46,573,800		915,027,886	0	15.83					Dinas Kesehatan;		
1.1.1.2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit					1	0			0		0		0	0	0	0	0					Dinas Kesehatan;		
1.1.1.3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dilakukan pengembangan	Unit					1	1,250,000,000			0		0	1		0	1	0	100	0				Dinas Kesehatan;	Adendum Kontrak Sampai 9 Januari 2023 Sisa Pembayaran di masukan ke Anggaran Perubahan 2023	
1.1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					3	610,530,000			0		0	2		354,911,390	2	354,911,390	66.67	58.13				Dinas Kesehatan;	Kegiatan DED Puskesmas dialihkan ke anggaran 2023	
1.1.1.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit					3	500,000,000			0		0		57,192,750	2	221,254,093	2	278,446,843	66.67	55.69				Dinas Kesehatan;	Rumah dinas Karang Joang tidak dilaksanakan karena Pembangunan TOL
1.1.1.6	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit					2	550,350,000			0		34,632,000	2		189,054,833	1	287,221,758	3	510,908,591	150	92.83			Dinas Kesehatan;	
1.1.1.7	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					5	200,000,000			0	5	68,848,500			90,187,500		0	5	159,036,000	100	79.52			Dinas Kesehatan;	
1.1.1.8	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					10	6,965,254,000			0		0		440,539,793	10	5,881,210,186	10	6,321,749,979	100	90.76				Dinas Kesehatan;	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Unit					7								1		6		6		85.71				Dinas Kesehatan;	
		Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Kesehatan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit					11									11		11		100					Dinas Kesehatan;	
1.1.1.9	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Unit					2	250,000,000			0	2	242,699,200		0	2	242,699,200	100	97.08					Dinas Kesehatan;		
1.1.1.10	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket					2	7,056,133,687			0	1	50,000,000	4		805,269,094	5	5,706,682,595	5	6,561,951,689	0	93			Dinas Kesehatan;	
1.1.1.11	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket					1	9,758,270,706			0	1	162,612,409	4		967,994,726	6	8,046,578,512	6	9,177,185,647	0	94.05			Dinas Kesehatan;	
1.1.1.12	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	Unit					2	200,000,000			0		0		0	0	0	0	0	0					Dinas Kesehatan;	Kegiatan DED Pustu dialihkan ke anggaran 2023
1.1.1.13	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	Unit					5	200,000,000	3	176,174,000		0		0		0	3	176,174,000	60	88.09					Dinas Kesehatan;	
1.1.1.14	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit					5	200,000,000			0		0	0	5		121,512,810	5	121,512,810	100	60.76				Dinas Kesehatan;	
1.1.1.15	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di Rehab	Unit					0	0			0		0		0	0	0	0	0	0					Dinas Kesehatan;	
1.1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	%	500	698,580,032,580	0		100	153,663,359,728	3,400,265,861	25	56,104,164,874	25	21,321,299,337	25	55,043,185,063	100	135,868,915,135	100	88.42	100	135,868,915,135	20	19.45	Dinas Kesehatan		
1.1.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					11549	510,000,000	2612	2,390,000	2668	62,080,500	2882	148,761,170	2718		212,350,571	2718	425,582,241	0	83.45				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					11024	394,858,000	2426	0	2449	29,400,000	2633	26,972,700	2426		149,068,100	2426	205,440,800	0	52.03				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					10746	250,000,000	2392	500,000	2472	0	2615	50,793,250	2549		187,003,450	2549	238,296,700	0	95.32				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					52173	350,000,000	11958	0	10654	0	14137	32,466,600	12169		290,491,150	12169	322,957,750	0	92.27				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anaki usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					26250	150,000,000		148,360,000	99	0	99	0		0	99	148,360,000	0	98.91					Dinas Kesehatan;	
1.1.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					461080	300,000,000	38096	0	37584	168,858,195	99828	30,991,500	163078		60,224,940	163078	260,074,635	0	86.69				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					60966	400,000,000	6877	0	6355	0	10116	157,836,000	9145		208,765,060	9145	366,601,060	0	91.65				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang																								

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.1.2.30	Pelaksanaan AKreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Unit			0	295,139,500		0		0		99,462,043	0	99,462,043	0	33.7							Dinas Kesehatan;			
1.1.2.31	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Dinas Kesehatan;			
1.1.2.32	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan Aktivitas Merokok	Kawasan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0								Dinas Kesehatan;			
1.1.2.33	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jenis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0								Dinas Kesehatan;			
1.1.2.34	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dari Pemberian Obat Massa)	Laporan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0								Dinas Kesehatan;			
1.1.2.35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0								Dinas Kesehatan;			
1.1.2.36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang mendapat pelayanan kesehatan malaria	Orang			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0								Dinas Kesehatan;			
1.1.2.37	Operasional Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Beriman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen			5,499,975,200	305	720,675,239	608	1,455,651,717	446	1,100,974,674	440	1,457,658,904	440	4,734,960,534	0	86.09						Dinas Kesehatan;			
1.1.2.38	Operasional Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen			3,313,952,000		468,112,025		864,022,829		596,075,366	69	787,319,009	69	2,715,529,229	0	81.94						Dinas Kesehatan;			
1.1.2.39	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen			42,450,000		0		0		0		0	100	0								Dinas Kesehatan;			
1.1.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	61.54	5,170,000,000	0	53.85	960,000,000	0	128,807,760	91,177,240	54	508,724,798	54	728,709,798	101.89	75.91	54	728,709,798	87.75	14.09				Dinas Kesehatan		
1.1.3.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen			300	460,000,000	75	0	75	8,927,760	75	69,177,240	75	324,636,878	75	402,741,878	0	87.55						Dinas Kesehatan;		
1.1.3.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen			20	300,000,000	5	0	5	0	5	22,000,000	5	104,221,200	5	126,221,200	0	42.07						Dinas Kesehatan;		
1.1.3.3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit			5	200,000,000	0	1	119,880,000	4	0	79,866,720	5	199,746,720	100	99.87							Dinas Kesehatan;			
1.1.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan	%	500	2,561,255,000	0	100	420,000,000	25	0	25	11,829,760	25	253,785,030	25	96,553,270	100	362,168,060	100	86.23	100	362,168,060	20	14.14		Dinas Kesehatan	
1.1.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	Unit			4	35,000,000	0	0	4	20,961,000	0	4	20,961,000	100	59.89								Dinas Kesehatan;			
1.1.4.2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit			4	35,000,000	1	0	1	3,912,000		24,680,000	2	0	4	28,592,000	100	81.69						Dinas Kesehatan;		
1.1.4.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit			10	300,000,000	0	5	7,917,760		185,374,030	5	91,633,270	10	284,925,060	100	94.98							Dinas Kesehatan;		
1.1.4.4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen			2	50,000,000	0		0		22,770,000	2	4,920,000	2	27,690,000	100	55.38							Dinas Kesehatan;		
1.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijn	%	90	7,317,014,328	0	82	1,160,000,000		27,550,000		240,268,145		248,297,393	82	564,871,570	82	1,080,987,108	100	93.19	82	1,080,987,108	91.11	14.77		Dinas Kesehatan	
1.2.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)	%	90	1,595,043,673	0	82	275,000,000		10,000,000		0		56,560,000	82	159,468,460	82	226,028,460	100	82.19	82	226,028,460	91.11	14.17		Dinas Kesehatan	
1.2.1.1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen			4	75,000,000	1	0	1	15,400,000	1	47,524,960	1	62,924,960	0	83.9							Dinas Kesehatan;			
1.2.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	* Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen			4	200,000,000	1	10,000,000	0	1	41,160,000	2	111,943,500	2	163,103,500	0	81.55							Dinas Kesehatan;		
1.2.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMKyang ada di fasilitas kesehatan /Jumlah SDMKyang kuantitasnya sesuai dengan standar)	%	90	801,970,655	0	70	135,000,000		17,550,000		0		52,614,288	70	51,395,000	70	121,559,288	100	90.04	70	121,559,288	77.78	15.16		Dinas Kesehatan	
1.2.2.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen			1	50,000,000		17,550,000	0	1	27,750,000	0	1	45,300,000	100	90.6								Dinas Kesehatan;		
1.2.2.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang			75	10,000,000	0	0	0	0	1	9,800,000	1	9,800,000	0	98								Dinas Kesehatan;		
1.2.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen			2.5	75,000,000	0		0		24,864,288	1	41,595,000	1	66,459,288	0	88.61							Dinas Kesehatan;		
1.2.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDMK yang berkualitas/Jumlah SDMK Keseluruhan)	%	80	4,920,000,000	0	72	750,000,000		0		240,268,145		139,123,105	72	354,008,110	72	733,399,360	100	97.79	72	733,399,360	90	14.91		Dinas Kesehatan	
1.2.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang			100	750,000,000	15	0																		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	3.2				2.45										0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3.9				3.5										0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3.8				3.1										0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2.5				2										0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	
1.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik Secara Daring yang Memanfaatkan Domain/sub Domain Instansi Penyelenggaraan Negara	%	80	23,026,000,000	0	80	6,710,250,000	60	218,090,304	65	1,301,779,634	75	3,067,266,288	100	1,982,515,688	100	6,569,651,914	125	97.9	100	6,569,651,914	125	28.53	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh aplikasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan telah menggunakan domain pada portal balikpapan.go.id	
		Persentase Layanan Publik dan Internal yang diselenggarakan Secara Online dan atau Terintegrasi	%	80	14,847,108,040	0	80	0	40	0	50	0	65	0	90	0	90	0	112.5	0	90	0	112.5	0		Dinas Komunikasi dan Informatika	Indikator kinerja program ini telah mencapai target pada TW IV tahun 2022
1.1.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Persentase	90	23,026,000,000	0	90	4,258,000,000	60	68,777,154	65	633,116,121	75	2,795,038,501	100	667,672,487	100	4,164,604,263	0	97.81			4,164,604,263	0	18.09	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh aplikasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan telah menggunakan domain pada portal balikpapan.go.id
1.1.1.1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan domain balikpapan.go.id	domain					1	1,000,000	1	80,000		174,000		0		712,900	1	966,900	100	96.69					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW I Tahun 2022
1.1.1.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi Daring yang menggunakan subdomain dari balikpapan.go.id	%					100	10,000,000	25	60,000	10	427,000	5	0	60	4,583,400	100	5,070,400	100	50.7					Dinas Komunikasi dan Informatika;	sub kegiatan ini telah mencapai target kinerja pada TW IV tahun 2022
1.1.1.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dokumen Hasil Audit Jaringan Intra Pemerintah Daerah	dokumen					1	4,247,000,000		68,637,154		632,515,121		2,795,038,501	1	662,376,187	1	4,158,566,963	100	97.92					Dinas Komunikasi dan Informatika;	sub kegiatan ini telah mencapai target kinerja pada TW IV tahun 2022
1.1.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	Persentase	80	14,847,108,040	0	80	2,452,250,000	40	149,313,150	50	668,663,513	65	272,227,787	100	1,314,843,201	100	2,405,047,651	0	98.08			2,405,047,651	0	16.2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indikator kinerja kegiatan ini telah mencapai target pada TW IV tahun 2022
1.1.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan Peta Jalan SPBE	%					80	90,000,000	30	5,414,400	30	5,079,000	70	37,228,238	100	39,410,222	230	87,131,860	287.5	96.81					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini telah memenuhi target kinerja pada TW IV Tahun 2022
1.1.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan Pusat Data	%					90	510,250,000	25	120,000	90	305,775,000	90	0	90	203,367,600	295	509,262,600	327.78	99.81					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II Tahun 2022
1.1.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Rakor Data dan Informasi Elektronik	Kali					1	50,000,000		0		2,184,100		0	1	40,942,400	1	43,126,500	100	86.25					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
1.1.2.4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen Hasil Audit Aplikasi	Aplikasi					1	1,275,000,000		132,500,000		343,181,688		176,629,530	1	595,930,266	1	1,248,241,484	100	97.9					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II hingga TW IV Tahun 2022
		Jumlah Aplikasi Baru yang Dibangun atau Dikembangkan	Aplikasi					5		4					1		3		0							Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II hingga TW IV Tahun 2022
		Jumlah Aplikasi yang Dipelihara	Aplikasi					20		10		13					13		0							Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II hingga TW IV Tahun 2022
1.1.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	FGD monev kota cerdas	Kali					2	295,000,000		5,855,600	1	667,000	1	6,737,100		280,486,802	1	293,746,502	0	99.58					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II dan Tw III Tahun 2022
		Jumlah video publikasi	Video					1				1						1		100						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II dan Tw III Tahun 2022
		Peningkatan kapasitas dewan kota cerdas	Kali					1				1						1		100						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II dan Tw III Tahun 2022
		Peningkatan kapasitas tim pelaksana kota cerdas	Kali					1				1						1		100						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II dan Tw III Tahun 2022
1.1.2.6	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pelatihan dan Sertifikasi GCIO	Orang					2	60,000,000		0	1	0	1	36,124,694	1	19,977,036	1	56,101,730	0	93.5					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada Tw III dan TW IV Tahun 2022. Capaian realisasi ini dapat melebihi target karena 1 pelatihan di laksanakan secara daring
1.1.2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Dokumen Revisi Arsitektur dan Peta Jalan SPBE	dokumen					1	172,000,000		5,423,150		11,776,725	1	15,508,225		134,728,875	1	167,436,975	100	97.35					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada Tw III Tahun 2022
1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Komunikasi Sandi	%	80	180,000,000	0	80	402,990,000		100,000		1,389,200		151,844,000		242,519,800	0	395,853,000	0	98.23	0	395,853,000	0	219.92	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		Persentase Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	%	80	2,843,559,639	0	80	0	15	0	20	0	40	0	100	0	100	0	125	0	100	0	125	0		Dinas Komunikasi dan Informatika	
1.2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	Persentase	80	2,843,559,639	0	80	402,990,000	15	100,000	25	1,389,200	50	151,844,000	100	242,519,800	100	395,853,000	0	98.23			395,853,000	0	13.92	Dinas Komunikasi dan Informatika	
1.2.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	dokumen					1	50,000,000		0		0	1	50,000,000	1	50,000,000	100	100							Dinas Komunikasi dan Informatika;	sub kegiatan ini telah memenuhi target pada TW IV Tahun 2022
1.2.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	dokumen					1	50,000,000		0		0	1	50,000,000	1	50,000,000	100	100							Dinas Komunikasi dan Informatika;	sub kegiatan ini telah memenuhi target pada TW IV Tahun 2022
1.2.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dokumen Hasil Audit Keamanan TIK	dokumen					1	102,990,000		100,000		698,000	0	1	100,436,800	1	101,234,800	100	98.3						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini direalisasikan pada TW IV Tahun 2022 serta jumlah penanganan insiden keamanan informasi telah tercapai sesuai target pada TW I dan TW II Tahun 2022
		Jumlah Penanganan Insiden Keamanan Informasi	Kali					2		1		1					1		0							Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini direalisasikan pada TW IV Tahun 2022 serta jumlah penanganan insiden keamanan informasi telah tercapai sesuai target pada TW I dan TW II Tahun 2022
1.2.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Sertifikat Elektronik	ASN					2000	200,000,000	148	0		691,200	500	151,844,000	1639	42,083,000	1639	194,618,200	0	97.31					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai pada TW I, III, dan IV Tahun 2022
1.2.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya pola hubungan komunikasi sandi	Persentase	80	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90				87									0		0		0		0			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	80	15,462,929,057	0	80	3,644,482,800		135,216,305		895,714,853		518,4													

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
								I		II		III		IV													
								8	9	10	11	12	13	14	15												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Jumlah Konten Audio Visual	Konten					10		3		4		9		152		152		0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk konten berita teks hanya terealisasi 71% dikarenakan personel yang mengerjakan berita teks juga melaksanakan pekerjaan pembuatan naskah iklan/caption/naskah komunikasi lainnya, untuk realisasi Jumlah konten audio visual jauh melebihi target dikarenakan pada saat APBD P perhitungan lebih fokus pada perhitungan kebutuhan anggaran sehingga target renja tidak ikut berubah.
		Jumlah Konten Berita Teks	Konten					480		80		87		82		94		94		0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk konten berita teks hanya terealisasi 71% dikarenakan personel yang mengerjakan berita teks juga melaksanakan pekerjaan pembuatan naskah iklan/caption/naskah komunikasi lainnya, untuk realisasi Jumlah konten audio visual jauh melebihi target dikarenakan pada saat APBD P perhitungan lebih fokus pada perhitungan kebutuhan anggaran sehingga target renja tidak ikut berubah.
		Jumlah Konten Design 2 Dimensi	Konten					480		75		81		137		147		147		0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk konten berita teks hanya terealisasi 71% dikarenakan personel yang mengerjakan berita teks juga melaksanakan pekerjaan pembuatan naskah iklan/caption/naskah komunikasi lainnya, untuk realisasi Jumlah konten audio visual jauh melebihi target dikarenakan pada saat APBD P perhitungan lebih fokus pada perhitungan kebutuhan anggaran sehingga target renja tidak ikut berubah.
		Jumlah Pakaian Dinas Lapangan	Pakaian					11												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk konten berita teks hanya terealisasi 71% dikarenakan personel yang mengerjakan berita teks juga melaksanakan pekerjaan pembuatan naskah iklan/caption/naskah komunikasi lainnya, untuk realisasi Jumlah konten audio visual jauh melebihi target dikarenakan pada saat APBD P perhitungan lebih fokus pada perhitungan kebutuhan anggaran sehingga target renja tidak ikut berubah.
2.1.1.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Publikasi Media Luar Ruang	Publikasi Luar Ruang					121	2,200,496,800	31	74,300,000	35	557,648,500	13	337,051,500	48	965,804,000	48	1,934,804,000	0	87.93					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran kelling tidak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Kelling juga melaksanakan peliputan
		Jumlah Publikasi Media Massa Cetak	Media Cetak					50		19		7		10		20		20		0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran kelling tidak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Kelling juga melaksanakan peliputan
		Jumlah Publikasi Media Massa Online	Publikasi Online					160		40		40		40		80		80		0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran kelling tidak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Kelling juga melaksanakan peliputan
		Jumlah Publikasi Media Massa Radio	Publikasi Radio					72		5		24		19		14		14		0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran kelling tidak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Kelling juga melaksanakan peliputan
		Jumlah Publikasi Media Massa Televisi	Media Televisi					14						17		3		3		0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran kelling tidak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Kelling juga melaksanakan peliputan
		Jumlah Siaran Kelling	Siaran Kelling					24								3		3		0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran kelling tidak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Kelling juga melaksanakan peliputan
2.1.1.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Monev Pelayanan Informasi Publik	Monev					1	88,750,000		2,720,000		0	1	4,014,500		75,438,151	1	82,172,651	100	92.59					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan sebagian pada TW III Tahun 2022 namun untuk indikator jumlah uji konsekuensi tidak ada dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah yang mengusulkan Uji Konsekuensi untuk Daftar Informasi Dikecualikan namun untuk rapat kegiatan telah dilaksanakan pada TW IV Tahun 2022, dan telah dilaksanakan sosialisasi bimtek dan monev seluruh perangkat daerah dan hasilnya belum ada usulan baru karena sk informasi dicekualikan tahun 2022 masih relevan.
		Jumlah Penilaian Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian					1										1		100						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan sebagian pada TW III Tahun 2022 namun untuk indikator jumlah uji konsekuensi tidak ada dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah yang mengusulkan Uji Konsekuensi untuk Daftar Informasi Dikecualikan namun untuk rapat kegiatan telah dilaksanakan pada TW IV Tahun 2022, dan telah dilaksanakan sosialisasi bimtek dan monev seluruh perangkat daerah dan hasilnya belum ada usulan baru karena sk informasi dicekualikan tahun 2022 masih relevan.
		Jumlah Rakor	Rakor					1										1		100						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan sebagian pada TW III Tahun 2022 namun untuk indikator jumlah uji konsekuensi tidak ada dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah yang mengusulkan Uji Konsekuensi untuk Daftar Informasi Dikecualikan namun untuk rapat kegiatan telah dilaksanakan pada TW IV Tahun 2022, dan telah dilaksanakan sosialisasi bimtek dan monev seluruh perangkat daerah dan hasilnya belum ada usulan baru karena sk informasi dicekualikan tahun 2022 masih relevan.
		Jumlah Uji Konsekuensi	Uji Konsekuensi					1												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan sebagian pada TW III Tahun 2022 namun untuk indikator jumlah uji konsekuensi tidak ada dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah yang mengusulkan Uji Konsekuensi untuk Daftar Informasi Dikecualikan namun untuk rapat kegiatan telah dilaksanakan pada TW IV Tahun 2022, dan telah dilaksanakan sosialisasi bimtek dan monev seluruh perangkat daerah dan hasilnya belum ada usulan baru karena sk informasi dicekualikan tahun 2022 masih relevan.
2.1.1.7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Konferensi Pers ; Jumlah Bimtek Wartawan ; Jumlah Kegiatan Forum Media Massa	Konferensi Pers					2	40,500,000		0		0		791,000		17,145,500		17,936,500	0	44.29					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Pada sub kegiatan ini tidak dilaksanakan konferensi pers dikarenakan kegiatan tersebut masih menjadi bagian pekerjaan dari humas dan protokol Setdakot Balikpapan sehingga untuk mendukung sub kegiatan layanan hubungan media maka dilaksanakan kegiatan pertemuan dengan media massa pada TW IV Tahun 2022, dan pada saat penyusunan APBD perubahan perhitungan lebih fokus pada perhitungan kebutuhan anggaran sehingga target renja tidak ikut berubah yang semestinya memiliki target kinerja sebanyak 2 kali pertemuan media massa.
2.1.1.8	Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen					1	15,625,000		0		8,857,600		0	1	6,038,300	1	14,895,900	100	95.33					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
2.1.1.9	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Bimtek Sumber Daya Komunikasi Publik	Bimtek					2	49,986,000		0		0	1	0	1	36,225,000	1	36,225,000	0	72.47					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW III dan IV Tahun 2022
2.1.1.10	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah belanja sewa aplikasi NTPD 112	Paket					1	375,400,000	1	0		207,012,500		48,812,500		116,525,000	1	372,350,000	100	99.19					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW III Tahun 2022 dan telah mencapai target sebagian namun untuk anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana digeser ke belanja survei pada APBD perubahan.
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mobil Siaran Kelling	Paket					1												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	
		Jumlah Pemeliharaan Rangka Media Luar Ruang	Pemeliharaan					6												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW III Tahun 2022 dan telah mencapai target sebagian namun untuk anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana digeser ke belanja survei pada APBD perubahan.
		Jumlah Pengadaan Alat-Alat Studio	Pengadaan					2				2						2		100						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW III Tahun 2022 dan telah mencapai target sebagian namun untuk anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana digeser ke belanja survei pada APBD perubahan.
		Laptop editing video	Laptop					2				2						2		100						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW III Tahun 2022 dan telah mencapai target sebagian namun untuk anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana digeser ke belanja survei pada APBD perubahan.
2.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	90	1,644,816,444		0	80	271,900,000	5	3,680,726	40	121,689,500	45	53,482,493	95	70,683,578	95	249,536,297	118.75	91.78	95	249,536,297	105.56	15.17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Realisasi melebihi target dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimtek statistik sektoral serta pendampingan dari BPS selaku pembina data daerah.
2.2.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	Persentase	80	1,644,816,444		0	50	271,900,000	5	3,680,726	20	121,689,500	45	53,482,493	95	70,683,578	95	249,536,297	0	91.78		249,536,297	0	15.17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Realisasi melebihi target dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimtek statistik sektoral serta pendampingan dari BPS selaku pembina data daerah.

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan									
							I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Publikasi Data Statistik Sektoral	buku					1	122,000,000		3,680,726		4,909,500		35,178,793	1	64,178,578	1	107,947,597	100	88.48					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022		
2.2.1.2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Bimtek Statistik Bagi Perangkat Daerah	Bimtek					1	100,000,000	1	0		78,480,000		8,684,000		6,505,000	1	93,669,000	100	93.67					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW I Tahun 2022		
2.2.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Bimtek					1	49,900,000		0		38,300,000	1	9,619,700		0	1	47,919,700	100	96.03					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW III Tahun 2022		
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	35				31									0		0		0		0		0	Dinas Komunikasi dan Informatika			
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	85	37,511,537,470			0	85	6,045,674,300		977,782,797		1,214,057,434		1,507,441,759	86.89	1,440,559,924	86	5,139,841,914	101.18	85.02	86	5,139,841,914	101.18	13.7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada program ini di realisasikan dan telah mencapai target kinerja yang telah ditentukan pada awal Tahun 2022	
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DISKOMINFO	Nilai	67	0			0	65	0		0		0		0	68.12	0	68	0	104.62	0	68	0	101.49	0	Dinas Komunikasi dan Informatika		
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	85	28,205,000,000			0	85	5,001,536,000		906,253,970		1,115,783,559		1,201,873,769	86.65	1,010,372,601	86	4,234,283,899	101.18	84.66	86	4,234,283,899	101.18	15.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022	
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	dokumen					26	5,001,536,000	6	906,253,970	8	1,115,783,559	6	1,201,873,769	6	1,010,372,601	6	4,234,283,899	0	84.66					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap tw dan sudah memenuhi target capaian pada TW IV Tahun 2022		
3.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	85	10,000,000			0	85	10,000,000		0		0		0	86.77	9,250,000	86	9,250,000	101.18	92.5	86	9,250,000	101.18	92.5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022	
3.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD	dokumen					1	5,000,000		0		0		0	1	4,625,000	1	4,625,000	100	92.5					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022		
3.1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	dokumen					1	5,000,000		0		0		0	1	4,625,000	1	4,625,000	100	92.5					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022		
3.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	85	341,000,000			0	85	37,260,000		0		0		37,050,000	86.98	0	86	37,050,000	101.18	99.44	86	37,050,000	101.18	10.87	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022	
3.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Pegawai					50	37,260,000		0	46		0		37,050,000		0	46	37,050,000	0	99.44					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah direalisasikan pada TW III Tahun 2022 namun tidak mencapai target jumlah dikarenakan jumlah pagu anggaran yang tidak mencukupi untuk pengadaan seragam sejumlah 50.	
3.1.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah DUPAK Prakom	Prakom					20	0		0		0		0		0		0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85	4,053,500,000			0	85	387,968,900		20,600,251		13,241,189		178,133,135	86.98	146,699,324	86	358,673,899	101.18	92.45	86	358,673,899	101.18	8.85	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022	
3.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	titik					52	7,990,000		0	7		0		7,990,000		0	7	7,990,000	0	100					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II Tahun 2022	
3.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Paket					1	149,978,900		0	1		3,975,000		50,892,300		76,068,000	1	130,935,300	100	87.3					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II Tahun 2022	
3.1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Jenis					11	20,000,000		0	2		0		17,150,500		1,500,000	2	18,650,500	0	93.25					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II dan III Tahun 2022	
		Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	buku					121				30		20				20		0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II dan III Tahun 2022		
3.1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	Kotak					1200	10,000,000		0		0	165		0	81	9,990,000	81	9,990,000	0	99.9					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah direalisasikan sebagian pada TW III terdiri dari 75 Dus air mineral 330 lr dan 90 kotak snack serta pada tw IV di realisasikan terdiri dari 41 dus air mineral 330 lr dan 40 kotak snack, terdapat kesalahan pada perhitungan dan perhitungan target kinerja pada penyusunan renja.	
3.1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Kali					100	200,000,000	10	20,600,251	14	9,266,189	26	102,100,335	14	59,141,324	14	191,108,099	0	95.55						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah direalisasikan sebagian pada TW I, TW II, TW III, dan TW IV realisasi keuangan mencapai 96% namun seatra target hanya 64% dikarenakan pagu tersebut hanya cukup untuk melakukan 64 kali perjalanan dinas (perubahan harga tiket, akomodasi dll)	
3.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	85	1,172,500,000			0	85	40,010,000		0		0		0	86.98	39,543,770	86	39,543,770	101.18	98.83	86	39,543,770	101.18	3.37	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022	
3.1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	Unit					6	20,000,000		0		0		0	2	20,000,000	2	20,000,000	33.33	100						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022	
3.1.6.2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud	Paket					1	20,010,000		0		0		0	1	19,543,770	1	19,543,770	100	97.67						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022	
3.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	1,543,037,470			0	85	255,142,000		35,168,939		56,327,704		49,307,463	86.93	90,312,826	86	231,116,932	101.18	90.58	86	231,116,932	101.18	14.98	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022	
3.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	Paket					10	2,000,000		0		0		0	1	313,000	1	313,000	0	15.65						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini direalisasikan pada TW IV Tahun 2022 dan hanya terealisasi 50% dikarenakan realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan	
3.1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa					4	80,000,000	4	12,770,039	4	13,446,021	4	15,709,113	4	17,323,626	4	59,248,799	100	74.06						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada setiap TW secara rutin Tahun 2022	
3.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan gedung kantor yang dibersihkan	Gedung					1	173,142,000	1	22,398,900	1	42,881,683	1	33,598,350	1	72,676,200	1	171,555,133	100	99.08						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada setiap TW secara rutin Tahun 2022	
3.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	2,186,500,000			0	85	313,757,400		15,759,637		28,704,982		41,077,392	86.93	144,381,403	86	229,923,414	101.18	73.28	86	229,923,414	101.18	10.52	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022	
3.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit					3	109,975,000	2	4,783,890	3	23,530,591	3	14,336,323	3	30,429,586	11	73,080,390	366.67	66.45						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada setiap TW secara rutin Tahun 2022	
3.1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara (roda 2)	Unit					2	133,790,400	2	10,975,747	2	5,174,391	2	26,741,069	2	44,002,728	8	86,893,935	400	64.95						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada setiap TW secara rutin Tahun 2022	
		Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara (roda 4)	Unit					4		2		4		4		4		14		350						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada setiap TW secara rutin Tahun 2022		
3.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana aparatur berupa peralatan dan mesin yang mendapatkan pemeliharaan (Jenis)	Unit					2	4,992,000		0	1		0	1		4,992,000	2	4,992,000	100	100					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini direalisasikan sebagaian pada TW II dan TW III Tahun 2022		
3.1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	Gedung Kantor					1	65,000,000		0		0	1		0	1	64,957,089	1	64,957,089	100	99.93					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini direalisasikan sebagaian pada TW III dan TW IV Tahun 2022	
																Rata-rata capaian Kinerja (%)		74.77	81.15					42.94	15.93				
																		Predikat Kinerja		Sedang	Tinggi					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		76.52	87.84								
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		Tinggi	Tinggi								
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		50.54	80.								

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
				5		6		7		8		9		10		11		12		13				14		15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27			
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	65.53		Rp		K	Rp	65.33		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	0		Dinas Lingkungan Hidup		
1.1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	%	350	1,610,000,000			0	37.5	99,996,200			0		18,099,200		50,873,280	35.29	29,162,500	35	98,134,980	94.59	98.14	35	98,134,980	10	6.1	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja	
1.1.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	dokumen	1	1,080,000,000			0	1	99,996,200			0		18,099,200		50,873,280	1	29,162,500	1	98,134,980	100	98.14		98,134,980	0	9.09	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja	
1.1.1.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan	dokumen						1	99,996,200			0		18,099,200		50,873,280	1	29,162,500	1	98,134,980	100	98.14					Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja	
1.1.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	dokumen	1	530,000,000			0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	%	10.64	192,525,000,000			0	10.57	29,110,089,958			3,227,134,297	6,012,536,810	6,001,790,762	5.74	11,599,091,542	5	26,840,553,411	50	92.2	5	26,840,553,411	46.99	13.94		Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja		
1.2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota	Hektar	6802.43	192,525,000,000			0	6802.43	29,110,089,958			3,227,134,297	6,012,536,810	6,001,790,762	111	11,599,091,542	111	26,840,553,411	0	92.2		26,840,553,411	0	13.94		Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja		
1.2.1.1	Pengelolaan Kebun Raya	jumlah koleksi	Pohon					500	2,712,390,234	76	260,620,669	216	701,108,396	723	635,589,495	1409	918,966,074	1409	2,516,284,634	0	92.77					Dinas Lingkungan Hidup	Capaian melebihi target kinerja			
1.2.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah rth kota yang dipelihara dan dikelola (hutan kota 18, taman kota 60, TPU 32, Pembibitan 2)	Kawasan					110	26,097,699,724		2,966,513,628	5,311,428,414		5,366,201,267	110	10,680,125,468	110	24,324,268,777	100	93.2							Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja		
1.2.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	jumlah sarana prasarana	Kawasan					3	300,000,000			0		0		0	0	0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup			
1.3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani	%	500	1,175,000,000			0	100	119,999,700	36		6,002,000	72	33,237,609	40	15,407,576	4	43,534,600	152	98,181,785	152	81.82	152	98,181,785	30.4	8.36		Dinas Lingkungan Hidup	Capaian melebihi target kinerja
1.3.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Yang ditindak lanjuti	%	500	1,175,000,000			0	100	119,999,700	25.2		6,002,000	50.4	33,237,609	28	15,407,576	2.8	43,534,600	105	98,181,785	105	81.82	105	98,181,785	21	8.36		Dinas Lingkungan Hidup	Capaian melebihi target kinerja
1.3.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penanganan pengaduan	dokumen					25	119,999,700	9	6,002,000	18	33,237,609	10	15,407,576	1	43,534,600	1	98,181,785	0	81.82							Dinas Lingkungan Hidup	Capaian melebihi target kinerja	
1.4	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	%	37.5	100,000,000			0	37.5	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	89.42					89.02										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
2.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	%	500	12,130,000,000			0	100	984,999,265			1,006,500	57,095,150	285,585,115	63.96	613,589,894	63	957,276,659	63	97.19	63	957,276,659	12.6	7.89		Dinas Lingkungan Hidup	Target tidak tercapai karena ada perubahan data dari Kementerian LHK		
2.1.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Kegiatan	116	2,920,000,000			0	24	69,999,700	2.33		0	8.14	19,987,000	24.42	14,789,261	30.23	81,657,804	30.23	116,434,165	0	166.34		116,434,165	0	3.99		Dinas Lingkungan Hidup	Capaian melebihi target kinerja
2.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah dokumen persetujuan lingkungan	dokumen					33		0	2		0	7	17,380,000	21	12,815,301	26	17,493,500	26	47,688,801	0	0					Dinas Lingkungan Hidup	Capaian melebihi target kinerja	
		jumlah dokumen persetujuan teknis	dokumen					10													0							Dinas Lingkungan Hidup		
2.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan pengendalian emisi gk	dokumen					2	69,999,700			0		2,607,000		1,973,960	2	64,164,404	2	68,745,364	100	98.21						Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja	
2.1.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan	41	7,750,000,000			0	5	814,999,850			1,006,500	31,560,850	247,860,114	50	462,916,750	50	743,344,214	0	91.21		743,344,214	0	9.59		Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja		
2.1.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah informasi lingkungan	dokumen					3	814,999,850			1,006,500	31,560,850	247,860,114	3	462,916,750	3	743,344,214	100	91.21								Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja	
2.1.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan	21	1,460,000,000			0	2	99,999,715			0	8.33	5,547,300	16.67	22,935,740		69,015,240	16.67	97,498,280	0	97.5		97,498,280	0	6.68		Dinas Lingkungan Hidup	
2.1.3.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah penggantian/penanaman pohon	dokumen					3	99,999,715			0	1	5,547,300	2	22,935,740		69,015,240	2	97,498,280	2	97,498,280	0	97.5				Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja	
2.2	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselenggara	%	500	1,650,000,000			0	100	199,999,700			0	10.77	0	0	9.23	166,230,600	19	166,230,600	19	83.12	19	166,230,600	3.8	10.07		Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja	
2.2.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan	138	1,650,000,000			0	26	199,999,700			0	14	0	0	12	166,230,600	12	166,230,600	0	83.12		166,230,600	0	10.07		Dinas Lingkungan Hidup		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
							8	9	10	11	12	13	14	15							16	27					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis			5	329,457,000	2	0	1	142,650,000	1	32,850,000	1	150,260,000	1	325,760,000	0	98.88							Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
5.1.6.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK da tersedianya makan minum kantor	Jenis			5	200,000,000		12,159,000		44,443,000	1	73,103,700	4	67,961,600	4	197,667,300	0	98.83							Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
5.1.6.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Jenis			4	34,555,000		0	1	16,950,100		8,693,300	3	8,546,600	3	34,190,000	0	98.94							Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
5.1.6.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan			135	233,500,000	16	17,351,194	34	94,564,942	17	67,876,561	27	52,963,805	27	232,756,502	0	99.68							Dinas Lingkungan Hidup;	Target tidak tercapai karena Adanya pemangkasan anggaran perjalanan dinas
5.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	364.1	2,310,000,000	0	71.82	49,890,000		0		0	4	48,945,000	4	48,945,000	5.63	98.11	4	48,945,000	1.1	2.12				Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
5.1.7.1	Pengadaan Mebel	jumlah jenis pengadaan mebel	Jenis			2	49,890,000		0		0	3	48,945,000	3	48,945,000	0	98.11									Dinas Lingkungan Hidup;	Capaian melebihi target kinerja
5.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	400.65	9,198,440,000	0	79.13	468,440,000		189,347,541		450,537,773	9	422,710,734	9	504,018,051	9	1,566,614,099	11.39	334.43	9	1,566,614,099	2.25	17.03		Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
5.1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis jasa surat menyurat	Jenis			2	8,440,000		0		8,240,000	0	2	64,000	2	8,304,000	100	98.39								Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
5.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jenis			6	460,000,000		70,321,504		106,394,442		128,619,041	6	136,066,951	6	441,401,938	100	95.96							Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
5.1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga administrasi kantor teanaga petugas kebersihan, keamanan, engineering, pertamanan	Orang			32	0		119,026,037		335,903,331		294,091,693	25	367,887,100	25	1,116,908,161	0	0							Dinas Lingkungan Hidup;	Target tidak tercapai karena ada naban yang resign
5.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	368.35	8,483,000,000	0	71.87	1,277,645,000		79,701,221		199,874,491		197,480,808	6	432,005,714	6	909,062,234	8.45	71.15	6	909,062,234	1.63	10.72		Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
5.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	Unit			71	1,062,500,000		79,701,221		199,874,491		153,841,993	46	283,760,264	46	717,177,969	64.79	67.5							Dinas Lingkungan Hidup;	Saat perubahan tidak merubah target kinerja sehingga tidak sesuai dengan capaian
5.1.9.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana	Jenis			8	215,145,000		0		0	1	43,638,815	7	148,245,450	7	191,884,265	0	89.19							Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			57.74	80.61				4.81	5.78		
Predikat Kinerja																			Rendah	Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			109.58	85.55							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Tinggi	Tinggi							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			13.72	76.59				3.72	7.92		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Rendah	Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			49.92	79.69				10.7	9.4		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah	Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				-																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Adanya sub kegiatan yang lintas bidang sehingga membuat penyampaian hasil kinerja yang harus sinkron																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

SUDIRMAN DJAYALEKSANA
196911101990031012

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13				14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	%	16																							
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur yang tersedia	%	40	460,000,000	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.1.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis infrastruktur yang tersedia	Jenis	15	460,000,000	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	0.143	2,536,250,000	0	0.024	474,300,000	0	7,243,500	0	173,665,436	0	129,245,923	0	143,341,077	0	453,495,936	0	95.61	0	453,495,936	0	17.88	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	melampaui target	
1.2.1	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase CPPD	%	16	1,770,000,000	0	9	250,000,000	0	7.5	167,049,812	0	8,287,494	0	61,639,866	0	236,977,172	0	94.79	0	236,977,172	0	13.39	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	belum tercapai		
1.2.1.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Ton				17	250,000,000	0	14.92	167,049,812	0	8,287,494	0	61,639,866	14.92	236,977,172	87.76	94.79						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	belum tercapai	
		Jumlah Cadangan pangan pemerintah daerah yang dipelihara	Ton				17		0			0		0		0		0							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	belum tercapai	
1.2.2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan konsumsi pangan umbi/ian	kkal/perkapita/hari	47	766,250,000	0	40	224,300,000	0	7,243,500	0	6,615,624	0	120,958,429	43	81,701,211	43	216,518,764	0	96.53		216,518,764	0	28.26	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Terlaksana di TW IV	
1.2.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan alternatif pangan lokal	Kali				6	224,300,000	0	7,243,500	1	6,615,624	3	120,958,429	2	81,701,211	2	216,518,764	0	96.53						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tercapai
1.3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	70	235,000,000	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan
1.3.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	dokumen	5	235,000,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	%	95				94.5									0		0		0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	%	100				100									0		0		0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		Persentase keamanan pangan	%	90				88									0		0		0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
2.1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	%	90	1,425,000,000	0	88	239,050,000	0	7,610,380	0	112,124,040	0	27,250,668	100	72,226,389	100	219,211,477	113.64	91.7	100	219,211,477	111.11	15.38	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	melampaui target	
2.1.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa	%	90	1,425,000,000	0	88	239,050,000	0	7,610,380	0	112,124,040	0	27,250,668	100	72,226,389	100	219,211,477	113.64	91.7	100	219,211,477	111.11	15.38	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Sudah Terlaksana	
2.1.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian sampel pangan	Sampel				100	239,050,000	0	7,610,380	10	112,124,040	55	27,250,668	37	72,226,389	37	219,211,477	0	91.7						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tercapai
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi				2		0		0		0		0		0		0							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
		Sertifikasi/registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) daerah kabupaten/kota	Register/sertifikat				2		0		0		0		0		0		0							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	4919			4489										0		0		0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	18000			17500										0		0		0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		Total Produksi Sub Sektor Hortikultura	Ton	147000			120500										0		0		0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		Total Produksi Sub Sektor Perkebunan	Ton	11116			9886										0		0		0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		Total Produksi sub sektor peternakan	Ton	20900			20500										0		0		0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	22000	3,225,000,000	0	4200	445,000,000	1259	0	894	21,206,250	788	10,800,000	1310	995,552,050	4251	1,027,558,300	101.21	230.91	4251	1,027,558,300	19.32	31.86	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai	
3.1.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok nelayan yang dibina (Kelompok)	Kelompok	60	150,000,000	0	60	0	1	0	2	0	3	0	6	589,886,350	6	589,886,350	0	0		589,886,350	0	393.26	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tidak tercapai/ tidak dianggarkan	
3.1.1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat tangkap ikan yang disediakan	Unit				20	0	0	0	0	0	0	0	0	589,886,350	0	589,886,350	0	0						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Tidak di Anggarkan
3.1.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)	Kelompok	66	1,125,000,000	0	60	75,000,000	10	0	20	0	30	0	40	73,500,000	40	73,500,000	0	98		73,500,000	0	6.53		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	melampaui target
3.1.2.1	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah pertemuan kelompok (KUB)	Kali				12	75,000,000	1		0	2		0	4		0	5		73,500,000	5	73,500,000	0	98		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tercapai
3.1.3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	%	100	1,950,000,000	0	100	370,000,000	0	0	0	21,206,250	0	10,800,000	100	332,165,700	100	364,171,950	100	98.42	100	364,171,950	100	18.68	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Terlaksana	
3.1.3.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang beroperasi	TPI				2	370,000,000	0	0	0	21,206,250	0	10,800,000	2	332,165,700	2	364,171,950	100	98.42						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Terlaksana
3.2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	319	6,900,000,000	0	289	1,124,376,																			

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
										I		II		III		IV													
										8	9	10	11	12	13	14	15												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			15		16	27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	75	74,850,000,000	0	71	14,547,296,000	0	2,784,057,898	0	3,255,021,536	75	2,267,199,712	0	3,373,164,913	0	11,679,444,059	0	80.29	11,679,444,059	0	15.6	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Sudah Terlaksana di TW III				
4.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS/ASN yang dibayar gaji dan tunjangan nya selama setahun (OB)	OB					1120	13,597,296,000	212	2,784,057,898	273	3,255,021,536	266	2,267,199,712	198	3,373,164,913	198	11,679,444,059	0	85.9					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
4.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Pelaporan administrasi gaji dan tunjangan pegawai terkait adanya perubahan seperti jumlah tanggungan keluarga (KP4), mutasi, pensiun, KGB, kenaikan pangkat, CPNS (80% dan 100%) dalam satu tahun	dokumen					25	950,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan		
		Jumlah tenaga honorer/haban yang dibayar gajinya	OB					520		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan			
4.1.3	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Poin	78	175,000,000	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan		
4.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	75	6,215,000,000	0	71	766,567,600	0	93,842,049	0	136,988,568	72	161,808,753	0	328,676,922	0	721,316,292	0	94.1	721,316,292	0	11.61	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Sudah Terlaksana di TW III				
4.1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jenis					17	142,575,000	0	0	6	0	3	32,991,420	2	94,767,050	2	127,758,470	0	89.61					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tidak tercapai		
4.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan adminstrasi	Jenis					40	254,996,900	1	14,404,500	16	102,918,215	0	0	0	114,110,000	0	231,432,715	0	90.76					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
		Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta	Kotak					4000		0		1140		1480		1371		1371		0						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai		
4.1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun	Jenis					20	49,999,700	0	0	0	0	11	0	5	48,848,436	5	48,848,436	0	97.7					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	belum tercapai		
4.1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	Jenis					3	18,996,000	0	0	0	4,320,000	0	3,840,000	2	5,160,000	2	13,320,000	0	70.12					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	belum tercapai		
4.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi perjalanan dinas	Kali					70	300,000,000	47	79,437,549	24	29,750,353	24	124,977,333	5	65,791,436	5	299,956,671	0	99.99					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai		
4.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	73	1,300,000,000	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan		
4.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	11,960,000,000	0	71	2,010,423,000	0	255,844,065	0	468,767,219	73	356,428,325	0	551,990,931	0	1,633,030,540	0	81.23	1,633,030,540	0	13.65	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai				
4.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar	Meteran air					12	599,999,000	0	77,581,516	0	66,946,658	0	68,959,847	12	146,116,390	12	359,604,411	100	59.93					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai		
		Jumlah rekening listrik yang dibayar	Rekening					20				0		0	20		20		100						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai			
		Jumlah rekening telpon yang dibayar	Saluran					14		0		0		0	14		14		100						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai			
		Jumlah Jenis pelayanan umum yang disediakan	Jenis					3	1,410,424,000	0	178,262,549	0	401,820,561	0	287,468,478	3	405,874,541	3	1,273,426,129	100	90.29					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai		
4.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	7,576,000,000	0	71	1,510,005,000	0	129,352,579	0	111,633,640	71	174,261,177	0	907,215,842	0	1,322,463,238	0	87.58	1,322,463,238	0	17.46	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Sudah Terlaksana di TW III				
4.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar biaya KIR dan STNK	Unit					99	550,000,000	30	128,730,067	20	110,560,016	29	142,814,723	6	78,456,928	6	460,561,734	6.06	83.74					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tidak tercapai		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit					99		51		23		19		7		7		7.07					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai			
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh BBM	Unit					99		0		0		0		99		99		100					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai			
4.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Jenis					9	90,000,000	2	622,512	4	1,073,624	0	19,759,264	1	35,488,297	1	56,943,697	0	63.27					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	belum tercapai		
4.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan	Jenis					3	870,005,000	0	0	0	0	0	11,687,190	3	793,270,617	3	804,957,807	100	92.52					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			34.41	70.33				23.58	8.76				
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sedang				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			21.48	86.97									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Rendah	Tinggi									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			33.62	55.28				30.69	14.09				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Rendah	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			48.14	68.74				40.05	12.18				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah	Sedang				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																													
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

SRI WAHJUNINGSIH
196706251993032009

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
									I		II		III		IV											
				5	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K
1	2	3	4	5	Rp	6	7	8	Rp	9	10	11	12	13	14	15	16	27								
1	Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Prosentase RKA Responsif Gender	%	25		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	0		0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana						
1.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	%	100	5,098,696,271	0	82.4	449,999,600	0	2,077,365	89,615,031	77.82	328,703,515	77	420,395,911	93.9	93.42	77	420,395,911	77	8.25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	terdapat koreksi perhitungan untuk OPD kecamatan yang mana sebelumnya terhitung 2, menjadi 1 karena masih dalam 1 kecamatan			
1.1.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	dokumen	5	3,063,637,574	0	1	349,999,700	0	2,077,365	47,615,031	1	191,046,655	1	240,739,051	100	68.78		240,739,051	0	7.86	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				
1.1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terselenggaranya Pendampingan Penyusunan PPRG di OPD (pendampingan pihak ketiga)	OPD				3	175,000,000	0	0			11,615,000	8	118,792,210	8	130,407,210	0	74.52			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Sesuai hasil koordinasi dengan Narasumber pendampingan disarankan agar OPD yang serumpun dapat dilaksanakan bersamaan sehingga bisa sharing dan lebih banyak OPD yang memahami serta mengimplementasikan tentang PPRG			
		Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Balikpapan Tahun 2021-2024	dokumen				1							1		1	100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;				
1.1.1.2	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi PUG termasuk PPRG di Instansi Pemerintah	OPD				36	174,999,700		0		2,077,365		36,000,031	36	72,254,445	36	110,331,841	100	63.05			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
		Penerbitan Modul PPRG	buku				50											0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Materi modul diberikan dalam bentuk softcopy karena tidak ada anggaran mencetak		
		Pencetakan Leaflet	leaflet				1000						1000			1000		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
		Pencetakan Banner	banner				36						36		24		24		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Di Dianggarkan 60 Banner dan terealisasi sesuai DPA	
1.1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumahang yang dibina	Jumlah	113	2,035,058,697	0	15	99,999,900	1	0	2	0	42,000,000	13	137,656,860	13	179,656,860	0	179.66		179,656,860	0	8.83	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Perwakilan UPPKA yang mengikuti kegiatan pelatihan membuat ada 26 orang yang mana berasal dari 15 kelompok UPPKA di Kota Balikpapan dan tambahan 1 kelompok dari Sosial dengan jumlah peserta 34 orang, sehingga total kelompok binaan nya adalah 16 kelompok	
1.1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terselenggaranya Pelatihan bagi Pengelola Industri Rumahang (Jumlah orang pelaku industri rumahang terbina)	Orang				15	99,999,900		0		0	60	42,000,000		137,656,860	60	179,656,860	0	179.66			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
		Jumlah Organisasi Perempuan Terbina	organisasi				20							20		20		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
		Tersedianya Profil Industri Rumahang	dokumen				1										0						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	profi dibuat dalam bentuk media		
1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	per 100.000 Penduduk Perempuan	8.01	3,964,272,428	0	9.08	400,450,000	0		1,505,850,000	61,345,000	21.06	268,087,999	21	1,835,282,999	233.33	458.31	21	1,835,282,999	262.17	46.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sesuai dengan jumlah kenaikan kasus yang ada dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi, serta didukung dari aktivis PPATBM dan seksi PPART		
1.2.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	%	21.33	2,951,107,292	0	5.33	325,450,000	0	609,130,000	51,761,000	9.08	222,395,999	9	883,286,999	180	271.4	9	883,286,999	42.19	29.93	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Antusiasme RT untuk mengikuti sosialisasi regulasi perlindungan perempuan			
1.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi	Kali				12	325,450,000	1	0	2	609,130,000	6	51,761,000	3	222,395,999	3	883,286,999	0	271.4			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
		Jumlah Seksi PPA RT terlatih	Orang				150							100		100		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Sesuai dengan Target awal yang tercantum di Renstra dan DPA, Realisasi sesuai dengan target DPA		
		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi dan Regulasi Perlindungan Perempuan termasuk KDRT	Orang				150						150			150		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
1.2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	lembaga	24	1,013,165,136	0	4	75,000,000	0	896,720,000	9,584,000	4	45,692,000	4	951,996,000	100	1269.33		951,996,000	0	93.96	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				
1.2.2.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang dalam Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	Orang				40	75,000,000	1	0		896,720,000	9,584,000	39	45,692,000	39	951,996,000	0	1269.33			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;				
		Jumlah Kemitraan UPTD PPA dengan Pihak lainnya	dokumen				0		1						1		0						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
1.3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	%	100	6,080,764,165	0	71.43	600,000,000		2,171,800,000	4,441,361,700	83.33	79,872,119	211,483,760	83	6,904,517,579	116.9	1150.75	83	6,904,517,579	83	113.55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
1.3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	%	1.35	6,080,764,165	0	1.15	600,000,000		2,171,800,000	4,441,361,700	79,872,119	3.14	211,483,760	3	6,904,517,579	300	1150.75	3	6,904,517,579	222.22	113.55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	banyaknya permohonan sosialisasi dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dengan puspaga		
1.3.1.1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi Lintas Sektor dalam Pendampingan Pengasuhan Anak dan Remaja	Kali				4	600,000,000	1	2,171,800,000	4,441,361,700	79,872,119	1	211,483,760	1	6,904,517,579	0	1150.75					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Menyesuaikan dengan kasus yang terjadi yang memerlukan pendampingan pengasuhan anak dan remaja		
		Jumlah Klien yang mendapatkan Pelayanan di PUSPAGA	Orang				1000			179	1329	8319	8319	8319	8319	0							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian kinerja disesuaikan dengan Klien yang ditangani oleh Puspaga , dengan adanya layanan konseling online membuat masyarakat mudah untuk mengakses dan kesadaran masyarakat meningkat tentang eksistensi Puspaga		
		Jumlah Calon Pengantin (CATIN) yang Mendapat Layanan Penguatan Pra Nikah	pasangan				100				15	20	19	19	19	0							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Jumlah calon pengantin yang akan mengikuti sosialisasi berdasarkan hasil koordinasi dan data yang dikirimkan oleh Kemernag		
		Jumlah Kemitraan PUSPAGA dengan Pihak Lain	dokumen				6						6	6	6	100							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian kinerja disesuaikan dengan Kontrak kerja yang telah diadakan		
		Terselenggaranya Psychological First Aid/Trauma Healing dalam situasi bencana/krisis	dokumen				30					1			1		0							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kinerja terealisasi apabila terdapat kejadian bencana/krisis	
1.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	%	41.67	1,473,760,601	0	14.71	74,999,800	0	32,301,000	0	27.77	3,800,000	27	36,101,000	192.86	48.13	27	36,101,000	64.79	2.45	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	OPD telah terpapar dan menyadari pentingnya sistem data terpilah. Adapun OPD yang telah memiliki data terpilah adalah 1 BKPSDM 2 Dinas Sosial 3 Dinas Kesehatan 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6 Dinas Perpustakaan dan Arsip 7 Dinas Ketenagakerjaan 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 9 Dinas Koperasi, UMKM, dan Koperasi 10 Sekretariat Dewa			
1.4.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	Jumlah	59	1,473,760,601	0	5	74,999,800	0	32,301,000	0	5	3,800,000	5	36,101,000	100	48.13		36,101,000	0	2.45	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				
1.4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Profil Gender (IPG)	buku/CD				50	74,999,800	0	32,301,000					3,800,000	36,101,000	0	48.13					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Tidak terealisasi karena berdasarkan Surat Kepala BPS Nomor B-2842.1/64712/SS.540/11/2022 tanggal 25 November 2022, BPS selaku mitra kerja DP3AKB tidak dapat melakukan penyusunan buku IPG karena sedang fokus pada kegiatan Pendaftaran Awal Regsosek 2022 sesuai mandat Presiden		
		Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Terkait Penyediaan Data Terpilah dan pelatihan pemanfaatan aplikasi SIGA	OPD				10						10		10		100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
		Terselenggaranya Pendampingan OPD dalam penginputan pada aplikasi SIGA (durasi pendampingan)	Kali				3									0							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan tidak dilaksanakan karena DP3A Tingkat Provinsi di tahun 2022 Menunda Launching aplikasi SIGA provinsi merencanakan launching aplikasi pada Tahun 2023		
1.5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	%	50	4,642,229,010	0	25	595,000,000	5	1,759,670,000	10	9,859,172,500	4	166,465,006	48.10	296,633,003	48	12,081,940,509	192	2030.58	48	12,081,940,509	96	260.26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pada saat penentuan target renstra diasumsikan yang sudah ditindaklanjuti tidak dievaluasi kembali,Namun berdasarkan hasil evaluasi KLA Semua indikator KLA yang sudah tercapai tahun sebelumnya harus dievaluasi ulang setiap tahun
1.5.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	dokumen	5	2,464,048,010	0	1	395,000,000		793,045,000	4,823,920,000	106,555,506	1	225,734,847	1	5,749,255,353	100	1455.51		5,749,255,353	0	233.33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
1.5.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA	Kali				2	395,000,000	1	793,045,000	1	4,823,920,000		106,555,506		225,734,847	1	5,749,255,353	0	1455.51			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
		Terselenggaranya proses evaluasi KLA (Rekomendasi Gugus Tugas KLA)	dokumen				1		1						1		100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah PenanggungJawab	Penjelasan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
		Tersusunnya RAD Balikpapan menuju KLA Tahun 2021-2024	dokumen					1								1		1		100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
1.5.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	lembaga	120	2,178,181,000	0	14	200,000,000	966,625,000	3	5,235,252,500	7	59,909,500	5	70,898,156	5	6,332,685,156	0	3166.34		6,332,685,156	0	290.73			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Terdapat Tambahan Lembaga yang dibina		
1.5.2.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan di lapangan terkait kebijakan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)	puskesmas					10	200,000,000	966,625,000	10	5,235,252,500	59,909,500	2	70,898,156	2	6,332,685,156	0	3166.34		6,332,685,156	0				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Target PRAP yg dibina th 2022 adalah 10 Puskesmas, realisasi th 2022 PRAP yg dibina = 12 Puskesmas karena s/d th 2022 jumlah PRAP di Balikpapan = 15 PRAP dari 27 Puskesmas se Kota Balikpapan, di mana Puskesmas yg diajukan utk PRAP Terstandardisasi pd th 2022 awalnya ada 3 PKM, namun yg lolos hanya 1 PKM. Diharapkan di th 2023 ada penambahan PRAP lagi (>15 PRAP)		
		Terselenggaranya Pembinaan Forum Anak di Kota Balikpapan	forum anak					1								1		1		100							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
		Terselenggaranya pembinaan ke sekolah terkait kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) & Pelaksanaan Outdoor Classroom Days (OCD)	SRA/OCD					10		1		2	3	4		4		0									Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
1.6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	%	71.5	7,676,981,561		0	65	860,000,000	7,639,927,700		18,465,002,900	259,441,806	66.37	213,936,527	66	26,578,308,933	101.54	3090.5		66	26,578,308,933	92.31	346.21		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Limpahan Kasus 2021 yang diselesaikan di Tahun 2022		
1.6.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	%	6.4	2,392,412,561		0	1.28	200,000,000	1,833,185,000		2,663,930,000	87,492,200	1.64	61,630,940	1	4,646,238,140	100	2323.12		1	4,646,238,140	15.63	194.21		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dalam pelaksanaan kegiatan dengan sasaran 1 RT, karena Antusias RT dalam mengikuti sosialisasi, sehingga RT lain bergabung dengan RT yang diberikan edukasi		
1.6.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KIE yang terkait dengan AMPK (Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus) di Wilayah RT (Lautan RT)	RT					24	200,000,000	1,833,185,000	6	2,663,930,000	18	87,492,200	61,630,940	18	4,646,238,140	0	2323.12								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
		Terselenggaranya penguatan peran dan fungsi PPATBM ditingkat ditingkat Kelurahan	kelompok PPATBM					34		34						34		100									Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
1.6.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	0.009	4,005,000,000	0	0.014	660,000,000	5,806,742,700		15,801,072,900	171,949,606	0.026	152,305,587	0	21,932,070,793	0	3323.04		0	21,932,070,793	0	547.62			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Capaian kinerja disesuaikan dengan kasus/ kondisi yang ditangani oleh UPTD PPA		
1.6.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Orang					40	660,000,000	5,806,742,700		15,801,072,900	171,949,606	30	152,305,587	30	21,932,070,793	0	3323.04								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian kinerja disesuaikan dengan kasus/ kondisi yang ditangani oleh UPTD PPA	
		Tersedianya Rumah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Unit					1		1						1		100									Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
		Terselenggaranya Fungsi Mediasi dalam Penanganan Klien UPTD PPA	Orang					30		1		2		1		1		0									Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian kinerja disesuaikan dengan kasus/ kondisi yang ditangani oleh UPTD PPA	
		Terselenggaranya Penanganan Pengaduan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Orang					80		29		17	10	26		26		0									Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian kinerja disesuaikan dengan kasus/ kondisi yang ditangani oleh UPTD PPA	
		Terselenggaranya Pengelolaan Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	dokumen klien					50		29		3	24	26		26		0										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian kinerja disesuaikan dengan kasus/ kondisi yang ditangani oleh UPTD PPA
1.6.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	lembaga	25	1,279,569,000	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Renakta Polda kewenangan Provinsi, tetapi karena berdomisili di Balikpapan banyak kasus yang ditangani dari Balikpapan	
2	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	58.82				5.88									0		0		0		0				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2.1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	%	58.82	5,555,566,114		0	5.88	749,999,160	100,000,000		39,359,850	103,545,789	5.88	90,024,774	5	332,930,413	100	44.39		5	332,930,413	8.5	5.99		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
2.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	Jumlah	20	5,555,566,114	0	2	749,999,160	100,000,000		39,359,850		103,545,789	2	90,024,774	2	332,930,413	100	44.39								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2.1.1.1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kegiatan					34	249,999,650		100,000,000		0		0	81,769,492	181,769,492	0	72.71								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena DPMPD Provinsi Kaltim baru melaksanakan Diklat Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan pada tanggal 23-26 November 2023	
		Terselenggaranya Pendampingan Penginputan Data di Aplikasi Profil Kelurahan oleh Kelurahan Piloting	jumlah kelurahan					14						4		4		0									Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pendampingan dilakukan dan difokuskan untuk 4 kelurahan yang sudah mengikuti lomba dan akan mengikuti lomba baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional agar lebih maksimal hasilnya mengingat data yang diinput dalam prodeskel sangat banyak	
		Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Penginputan Data Profil Kelurahan	Kegiatan					4						2		2		0									Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan monitoring dilakukan pada saat persiapan penilaian lomba Kelurahan tingkat regional III dan dilakukan pada saat sosialisasi penginputan data dalam aplikasi prodeskel di akhir tahun anggaran 2022	
2.1.1.2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terselenggaranya Lomba Kelurahan Berprestasi	Kegiatan					1	499,999,510		0	39,359,850	103,545,789	8,255,282	151,160,921	0	30.23										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Tidak Dilaksanakan Lomba Kelurahan Tingkat Kota 2022 dan Hanya dilakukan Pembinaan Pemenang Lomba Kelurahan Tahun 2021 untuk dimajukan ke tingkat Provinsi tahun 2022 (Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 414.4 / 2373 / DPMPD Tanggal 31 Maret 2022 tentang Penginputan Epdeskel dan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2022 dimana pada point ke 7 disebutkan bahwa Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 tidak dilaksanakan dikarenakan kebijakan bagi Desa dan Kelurahan pemenang Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 diikut sertakan pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Wilayah III Tahun 2022 menimbang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Wilayah III yang dibatalkan di tahun 2021)	
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pendampingan Persiapan Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi/Tkt Nasional	Kegiatan					1			1					1		100									Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Rp	8455000000	26,154,345,900	0	83900000000	6,621,048,550	3,084,005,500	9,105,327,600	1,313,592,357	85,176,853.583	4,023,933,241	85,176.853.583	17,526,858,698	0	264.71				17,526,858,698	0	67.01			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Administrasi kelurahan dalam menghimpun data masyarakat disertai dengan kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam pembangunan Kota		
2.2.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	%	70.51	26,154,345,900	0	62.77	6,621,048,550	3,084,005,500	9,105,327,600	1,313,592,357	76	4,023,933,241	76	17,526,858,698	122.58	264.71			76	17,526,858,698	107.79	67.01			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Semakin banyak lembaga masyarakat yang turut berperan serta dalam pembangunan pemberdayaan kelurahan		
2.2.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Hibah Untuk Karang Taruna	ormas					1	430,000,000		0		0	22	370,000,000	22	370,000,000	0	86.05								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Tidak Semua LPM mengambil Dana Hibah yang sudah disiapkan berdasarkan usulan dan proposal hibah yang diterima oleh DP3AKB Kota Balikpapan. Adapun LPM yang tidak mengambil dana hibah Baru Ulu, Klandsan Ilir, Sepingan Raya, Gunung Samarinda Baru, Karang Joang, dan Manggar	
		Hibah untuk LPM	ormas					28						1		1		0									Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
2.2.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota dibina (PKK, Pokjanal Posyandu, LPM dan Karang Taruna)	jumlah lembaga					10	891,702,800		0		0	4	4,500,000	6	451,039,984	6	455,539,984	0	51.09							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi POKJANAL Posyandu Tingkat Kota	Kegiatan					4								1		1		0							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Hanya dilaksanakan 1 kali Rapat Pokjanal karena Menunggu Koordinasi dengan Tim yang tertuang dalam SK Pokjanal	
		Terselenggaranya Pembinaan kepada POKJANAL Posyandu Tingkat Kecamatan	Kegiatan					3								3		3		100							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
		Terselenggaranya Lomba Posyandu Tingkat Kota dan Pendampingan persiapan lomba Posyandu di Tingkat Provinsi/Tingkat Nasional	Kegiatan					3					2					2		0							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
		Terfasilitasinya Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Kegiatan					1								1		1		100							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Panitia dan Peserta KKN yang difasilitasi tidak menggunakan dana KKN yang disediakan dikarenakan kegiatan dilakukan secara daring	
		Rakorda Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan					1					1					1		100							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
2.2.1.3	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terselenggaranya Pelaksanaan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota (Pencanangan dan Penutupan)	Kegiatan					1	599,345,750		0		0	1	51,775,550		215,941,567	1	267,717,117	100	44.67						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah PenanggungJawab	Penjelasan		
									I		II		III		IV													
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Terselenggaranya Fasilitas Rakor LPM Tingkat Kota	Kegiatan			1				1		1		100										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;				
		Terselenggaranya Fasilitas Rakor Karang Taruna Tingkat Kota	Kegiatan			1						1		100										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;				
		Terselenggaranya Lomba BBGRM Tingkat Kota dan Pendampingan keikutsertaan/Tuan Rumah dalam di Tingkat Propinsi/Nasional	Kegiatan			2		2				2		100										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;				
2.2.1.4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK : a. Sekretariat b. Pokja I c. Pokja II d. Pokja III e. Pokja IV	Kegiatan			5	4,700,000,000		3,084,005,500		9,105,327,600		1,257,316,807	5	2,986,951,690	5	16,433,601,597	100	349.65					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;				
		Terselenggaranya Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi/Nasional	Kegiatan			1						1				1		100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;				
3	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakalan Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	70.65				70.61								0		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
3.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	%	70	4,228,498,222	0	62	608,315,000		9,075,000,000		10,478,161,400		193,569,542	64	188,422,363	64	19,935,153,305	103.23	3277.11	64	19,935,153,305	91.43	471.45		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
3.1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS	%	31.25	1,398,498,222	0	1.04	0		0		0	2	0		0	2	0	200	0	2	0	6.4	0		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pembinaan untuk SSK yang sudah terbentuk di tahun 2021	
3.1.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	dokumen	1	2,830,000,000	0	1	608,315,000		9,075,000,000		10,478,161,400		193,569,542	1	188,422,363	1	19,935,153,305	100	3277.11			19,935,153,305	0	704.42		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.1.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data Lapangan (Dalap)	dokumen			12	608,315,000	3	9,075,000,000	3	10,478,161,400	2	193,569,542	4	188,422,363	4	19,935,153,305	0	3277.11							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
		Penyusunan Kajian Grand Desain Pengendalian Penduduk Tahun 2022 - 2027	dokumen			1												0								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Tidak terealisasi, anggaran belum diakomodir direncanakan di tahun 2024	
		Seminar Pemanfaatan Hasil Kajian Grand Desain Pengendalian Penduduk	Kegiatan			1												0								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Tidak terealisasi, anggaran belum diakomodir direncanakan di tahun 2024	
3.2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11.2	4,636,903,198	0	13.75	690,640,000		1,696,630,000		22,497,494,729		621,077,782	30.57	223,229,450	30	25,038,431,961	230.77	3625.4	30	25,038,431,961	267.86	539.98		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Banyaknya PUS yang masih takut dengan efek samping dari ber-KB, Menganut paham tertentu (Agama), Karena Penyakit, ada anggapan di masyarakat jika sdh berusan diatas 40 tidak bisa punya anak lagi, ada anggapan untuk ibu menyusui tidak mungkin hamil	
3.2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	PUS	77400	620,000,000	0	77050	190,640,000		0		463,013,929		458,709,294	52.731	120,032,436	52.731	1,041,755,659	0	546.45			1,041,755,659	0	168.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Ber-KB Masih Rendah
3.2.1.1	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Pengadaan sarana Promosi dan KIE Program BANGGA KENCANA melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jenis			3	120,640,000		0	1	456,883,519	2	435,651,994		98,132,436	2	990,667,949	0	821.18							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Promosi dilakukan melalui Radio, Banner,Leaflet	
3.2.1.2	Pengendalian Program KKBPK	Terselenggaranya rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi program BANGGA KENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	dokumen laporan			9	70,000,000		0	1	6,130,410	6	23,057,300	3	21,900,000	3	51,087,710	0	72.98							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	adanya Rapat Audit Kasus stunting, dari pergeseran anggaran	
3.2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	Kelompok IMP	34	1,826,903,198	0	34	200,000,000		996,630,000		5,394,045,000	34	95,811,928		44,110,400	34	6,530,597,328	100	3265.3			6,530,597,328	0	357.47		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.2.2.1	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan promosi dan KIE program BANGGA KENCANA oleh PKB	Orang			6152	200,000,000	1024	996,630,000	1650	5,394,045,000	1156	95,811,928		44,110,400	1156	6,530,597,328	0	3265.3							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
		Pengadaan sarana promosi dan KIE Program BANGGA KENCANA untuk PKB	Paket			34						34				34		100								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
3.2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepesertaan KB MKJP	%	28.75	1,550,000,000	0	26.5	200,000,000		0	61	12,294,795,800	3	20,806,560	2	57,276,614	2	12,372,878,974	7.69	6186.44	2	12,372,878,974	6.96	798.25		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
3.2.3.1	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah tenaga kesehatan pemberi layanan KB yang terlatih	Orang			30	200,000,000		0		12,294,795,800		20,806,560	30	57,276,614	30	12,372,878,974	100	6186.44							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
		Indeks Kepuasan Faskes terhadap layanan Distribusi Alat & Obat Kontrasepsi KB	Nilai			85								86.27		86.27		101.49								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Sesuai Hasil Survey kepada Faskes Menggunakan link google form untuk mendapatkan hasil kepuasan faskes terhadap pelayanan distribusi alkon, Terjaminnya ketersediaan Alkon	
		Jumlah Faskes terbina regulasi tentang Standar Layanan KB	faskes			66				61		3		2		2		0								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
		Jumlah Pasangan Usia Subur dalam status kawin yang dilayani dalam pelayanan KB Momentum	Orang			465		152	187			348		92		92		0								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Ada momentum khusus yang sudah direncanakan sesuai anggaran DPSAKB , dan momentum lain yang harus dilaksanakan sesuai arahan BKKBN	
3.2.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah intervensi pada Kampung KB	Jumlah	34	640,000,000	0	34	100,000,000		700,000,000		4,345,640,000	34	45,750,000		1,810,000	34	5,093,200,000	100	5093.2			5,093,200,000	0	795.81		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.2.4.1	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	rumah data KB			10	100,000,000	4	700,000,000	2	4,345,640,000	18	45,750,000	10	1,810,000	10	5,093,200,000	100	5093.2							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Rumah Data Sudah terbentuk semua di Kampung Data 34 Kelurahan	
		Jumlah Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) yang terbina	kampung KB			34								34		34		100								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
3.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan	%	20.35	7,067,345,933	0	10.74	1,000,000,000		400,000,000		11,494,894,000		284,884,891	8.25	447,284,959	8	12,627,063,850	80	1262.71	8	12,627,063,850	39.31	178.67		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Tidak semua keluarga mau menjadi anggota kelompok disebabkan kesibukan bekerja	
3.3.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok BKB terbentuk	%	10.28	7,067,345,933	0	9.61	1,000,000,000		400,000,000		11,494,894,000		284,884,891	8.600	447,284,959	8	12,627,063,850	88.89	1262.71	8	12,627,063,850	77.82	178.67		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Kegiatan di Tahun 2022 difokuskan kepada pembinaan BKB yang sudah terbentuk, Karena selama tahun 2020 -2021 tidak melakukan pembinaan ke lapangan di karenakan covid-19	
3.3.1.1	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 1 Bina Keluarga Balita	Kelompok																									

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah PenanggungJawab	Penjelasan			
									I		II		III		IV														
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
3.3.1.4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk lomba-lomba (Menjadi Orangtua Hebat,Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kegiatan					4	150,000,000	4	0		12,700,000		18,808,500		67,546,586	4	99,055,086	100	66.04					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKBPM	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKBPM	Nilai	28.4				27									0		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Pemerintah Daerah	Nilai	79	52,085,159,946			0	75	8,574,962,964		373,476,895,400		8,697,786,804		2,206,522,822	82.19	2,076,768,348	82	386,457,973,374	109.33	4506.82	82	386,457,973,374	103.8	741.97	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Realisasi berdasarkan Hasil Survey Internal melalui bit.ly/IKMDP3AKB	
4.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	84.49	0			0	84.33	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Hasil Evaluasi Sakip dari Inspektorat
4.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	75	36,054,490,280			0	75	6,527,674,964		139,535,033,400		1,558,585,235		1,748,479,648	80.58	1,533,400,342	80	144,375,498,625	106.67	2211.74	80	144,375,498,625	106.67	400.44	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Realisasi berdasarkan Hasil Survey Internal melalui bit.ly/IKMDP3AKB	
4.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan dalam setiap bulan	dokumen					26	6,527,674,964	6		139,535,033,400	6	1,558,585,235	9	1,748,479,648	5	1,533,400,342	5	144,375,498,625	0	2211.74					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
4.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	75	0			0	75	0		0		0		0	82.16	0	82	0	109.33	0	82	0	109.33	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Realisasi berdasarkan Hasil Survey Internal melalui bit.ly/IKMDP3AKB
4.1.4	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Nilai	75	350,000,000			0	75	0		0		0		0	82.16	0	82	0	109.33	0	82	0	109.33	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Realisasi berdasarkan Hasil Survey Internal melalui bit.ly/IKMDP3AKB
4.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	75	5,717,329,593			0	75	640,912,400		20,453,338,000		6,875,053,000		187,899,812	82.16	182,713,785	82	27,699,004,597	109.33	4321.81	82	27,699,004,597	109.33	484.47	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Realisasi berdasarkan Hasil Survey Internal melalui bit.ly/IKMDP3AKB	
4.1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah jenis peralatan	Jenis					14	99,930,000			79,200,000	5	4,221,420,000		1,598,400		1,998,000	5	4,304,216,400	0	4307.23					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
		2. Jumlah perlengkapan kantor	Jenis					6		1			1		1		3		3		0						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
4.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor (ATK)	Jenis					24	259,999,200			5,379,200,000		30,447,400		64,559,340	24	90,349,166	24	5,564,555,906	100	2140.22					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
		Jenis bahan logistik kantor (Makan Minum)	Kotak					14825		2178			990		2118		2767		2767		0						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Terealisasi sesuai kebutuhan	
4.1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis					3	90,000,000	3	2,351,160,000		0		17,712,825		0	3	2,368,872,825	100	2632.08						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
4.1.5.4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material	Jenis					14	10,983,200	12	10,594,320,000		0		0		0	12	10,594,320,000	0	96459.32						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
4.1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Kali					24	180,000,000	5	2,049,458,000	4	2,623,185,600	7	104,029,247	8	90,366,619	8	4,867,039,466	0	2703.91						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
		Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kali					25				2		7		7		7		0							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai undangan / pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	
4.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	75	3,600,000,000			0	75	500,000,000		132,880,000,000		0		132,880,000	82.16	0	82	133,012,880,000	109.33	26602.58	82	133,012,880,000	109.33	3694.8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Realisasi berdasarkan Hasil Survey Internal melalui bit.ly/IKMDP3AKB	
4.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit					4	500,000,000	4		132,880,000,000		0		132,880,000		0	4	133,012,880,000	100	26602.58					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
4.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	75	3,058,700,000			0	75	421,375,600		80,416,864,000		133,779,136		102,709,418	82.16	130,848,714	82	80,784,201,268	109.33	19171.54	82	80,784,201,268	109.33	2641.13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Realisasi berdasarkan Hasil Survey Internal melalui bit.ly/IKMDP3AKB	
4.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Rekening					7	45,194,000			6,242,314,000		12,138,397	7	6,268,679		5,844,512	7	6,266,565,588	100	13865.92					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
4.1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rekening					4	64,700,000	2	16,843,550,000	2	13,780,650		13,780,650		14,790,750	2	16,685,902,050	0	25789.65						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
4.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non PNS	Orang					18	311,481,600			57,531,000,000		107,860,089		82,660,089	16	110,213,452	16	57,831,733,630	0	18566.66					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Di DPA dianggarkan 16 Orang Non PNS dan terealisasi sesuai DPA	
4.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	75	3,304,640,073			0	75	485,000,000		191,660,000		130,369,433		34,553,944	82.16	229,805,507	82	586,388,884	109.33	120.9	82	586,388,884	109.33	17.74	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Realisasi berdasarkan Hasil Survey Internal melalui bit.ly/IKMDP3AKB	
4.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM	liter bbm					30300	425,000,000	4608		191,660,000	4160	130,369,433	4355	34,553,944	3898	171,382,533	3898	527,965,910	0	124.23					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	sesuai pemakaian BBM	
		Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit					1											0		0						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
		Roda 2	Unit					50		28		21					1		50		100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Service disesuaikan dengan kerusakan kendaraan	
		Roda 4	Unit					12		6		3		4		13		26		216.67							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Service disesuaikan dengan kerusakan kendaraan	
4.1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jenis					4	60,000,000			0		0		0	4	58,422,974	4	58,422,974	100	97.37					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Belum dilaksanakan (Rencana Pelaksanaan di Semester II)	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				85.38	3049.22			47.64	226.29				
Predikat Kinerja																				Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				39.08	4520.41								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				103.95	2495.14			54.56	352.71				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				113.1	2132.1			88.37	326.17				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																													
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
				I	II	III	IV	12	13	14	15																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepmudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	25				10						9.09		9		90		9		36				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	a. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2022 yang dikordinasikan oleh sekretariat tentang target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dalam hal pengawasan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan b. Optimalisasi peran masyarakat dan mitra kerja DPOF dalam mendukung pelaksanaan program kepmudaan, dan olahraga di Kota Balikpapan antara lain optimalisasi peran masyarakat bidang kepmudaan seperti keikutsertaan di organisasi kepmudaan OKP (Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda),KP (Komunitas Pemuda) dan OKK (Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan) dengan aktifnya Kwarcab Pramuka Cabang Balikpapan seperti yang dapat diakses pada https://youtu.be/JhimqdHPd0 , optimalisasi peran masyarakat bidang keolahragaan dengan keikutsertaan dalam event FORMAS Tahun 2022 sebagai peserta maupun pengurus cabor sebagai panita pelaksana kegiatan dalam rangkaian HUT Kota Balikpapan yang dapat diakses https://www.youtube.com/live/YyD8nTC9Gg?feature=share e , partisipasi masyarakat dalam HAORNAS XXXIX yang meramalkan acara puncak dengan keterlibatan pengurus cabang olahraga,paguyuban seni dan tari, sanggar tari, anak-anak SD,SMP,SMK/ SMA se Kota Balikpapan yang terlibat dalam tarian kolosal dan senam massal yang dapat diakses pada https://www.youtube.com/live/h80ln5vZhY?feature=share dan keterlibatan mitra kerja DPOF seperti KONI,KORMI,NPC,Bapopsi dan Cabor DBON serta OPD terkait,	
1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	%	2.7	40,260,000,000			0	2.3	6,324,990,000	214,634,900	353,805,600	1,822,822,220	1.036	3,037,817,309	1		5,429,080,029	50	85.84	1	5,429,080,029	37.04	13.49	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tertaksana seluruh kegiatan namun capaian target belum mencapai target kinerja		
1.1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepmudaan	%	1.83	29,415,000,000			0	1.83	4,824,990,000	99,362,400	265,431,100	1,822,812,220	1.74	1,969,539,438	1		4,157,145,158	100	86.16	1	4,157,145,158	54.64	14.13	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tertaksana seluruh kegiatan namun capaian target mendekati target kinerja		
1.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					2000	1,125,000,000		0	38	0	81	148,169,160	527	756,673,584	527	904,842,744	0	80.43					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Kegiatan Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda,KIPAN,Pepelingsih,Forum Kepemimpinan Pemuda dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda : Pemuda Pelopor , puncak kegiatan di bin Oktober 2022	
1.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					80	824,990,000	20	88,502,200	35	79,777,100	35	408,847,341	195	77,658,450	195	654,785,091	0	79.37					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Festival Kuliner dan Cinderamata Wirausaha Muda Kota Balikpapan, dan Event Pameran Produk Wirausaha Muda serta Pelaksanaan Sosialisasi Kewirausahaan : Kegiatan pelatihan wirausaha TW I-II	
1.1.1.3	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen					1	600,000,000		10,860,200		0	1	86,120,000		388,575,874	1	485,556,074	100	80.93					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Telah tertaksana Penyusunan Dokumen Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan (Kajian Grand Design Pembangunan Kepemudaan Kota Balikpapan dan Aplikasi Klinik Kewirausahaan Pemuda)	
1.1.1.4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang					45	2,275,000,000		0		185,654,000		1,179,675,719	43	746,631,530	43	2,111,961,249	0	92.83					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tertaksana Pelaksanaan pemilihan pasukan pengibar bendera : Kegiatan seleksi peserta paskibraka di TW I, pelatihan paskibraka di TW II, puncak kegiatan agustus 2022	
1.1.1.5	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang						0		0		0		0		0	0	100	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.1.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	10.49	10,845,000,000			0	1.89	1,500,000,000	0.175	115,272,500	0.07		88,374,500	10,000	8.33	1,068,277,871	8		800	84.8	8	1,271,934,871	76.26	11.73	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tertaksana kegiatan organisasi kepemudaan, pencarian dana hibah KNPI 1 M namun ada tambahan pagu hibah 2000 tidak terealisasi karena OKP yang tidak dapat melengkapi dokumen
1.1.2.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen					1	1,500,000,000		115,272,500		88,374,500		10,000	1	1,068,277,871	1	1,271,934,871	100	84.8					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terealisasi di perhujung tutup tahun anggaran 2022 dengan proses yang panjang dan tercapai kesepakatan yang difasilitasi sekda	
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	%	100	5,985,000,000			0	100	1,000,000,000		0		850,000,000	100		150,000,000	100	1,000,000,000	100	100	100	1,000,000,000	100	16.71	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tertaksana dan tambahan pagu di perubahan	
1.2.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	100	5,985,000,000			0	100	1,000,000,000		0		850,000,000	1		150,000,000	1	1,000,000,000	1	100	1	1,000,000,000	1	16.71	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.2.1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	organisasi					1	1,000,000,000		0		0		850,000,000	1	150,000,000	1	1,000,000,000	100	100					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pemberian Dana Hibah Pramuka	
2	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	%	30.96				10.96								45.6		45		450		45		145.35		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	a. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2022 yang dikordinasikan oleh sekretariat tentang target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dalam hal pengawasan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan b. Dukungan mitra kerja bidang kepmudaan dan bidang keolahragaan dalam setiap event kegiatan yang dilaksanakan DPOF Tahun 2022 antara lain pada pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Duta Pemuda Tahun 2022 melibatkan alumni duta pemuda tahun 2021 sebagai panitia pelaksana kegiatan (swakelola) atau DPOF tidak menggunakan jasa Event Organizer seperti yang dapat diakses pada link https://www.youtube.com/live/yC6J7r1crgI?feature=share dan pemilihan pemuda pelopor tahun 2022 https://youtu.be/5zm5nPxAT5Q , juga pada kegiatan seleksi calon paskibraka melibatkan alumni peserta paskibraka tahun 2021 sebagai tim panitia pelaksana yang membantu pelaksanaan kegiatan bersama tim penilai/panitia lainnya sedangkan untuk event olahraga melibatkan pengurus cabang olahraga dalam pelaksanaan kegiatan seperti Balikpapan Open 10K dengan PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) baik PASI kota Balikpapan,PASI Provinsi Kaltim dan PASI Pusat Jakarta sebagai panitia pelaksana dan tim juri/penilai, berikut kegiatan dapat diakses pada link https://www.youtube.com/live/E_T9Furfh2U?feature=share	
2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	%	26.2	120,553,000,000			0	25	36,230,452,493	1,020,657,500	952,754,988		818,158,578	32.64		23,606,418,663	32	26,397,989,729	128	72.86	32	26,397,989,729	122.14	21.9	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tertaksana seluruh kegiatan sampai dengan akhir tahun ditutup dengan kegiatan bowling setelah event besar, POPDA,Porprov , Bpp 10 k dan Puncak Haornas XXXIX	
2.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan	%	32	300,000,000			0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tidak dilaksanakan karena pagu tidak mencukupi
2.1.1.1	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit					0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi dibidang olahraga	%	38	52,709,660,000			0	45	21,640,909,993	315,440,400	50,796,900		452,658,880	52.50		13,278,601,001	52	14,097,497,181	115.56	65.14	52	14,097,497,181	136.84	26.75	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tertaksana event kota dan mengikuti kejuaraan POPDA Paser dan Porprov Berau	
2.1.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					2	3,290,000,000		237,480,000		43,904,800	1	452,658,880	1	1,872,855,033	1	2,606,898,713	0	79.24					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pelaksanaan Balloppan 10 K di tgl.4 Sept 2022 , Sepakbola TW I Hut Kota dan Bowling	
2.1.2.2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang					1200	18,350,909,993		77,960,400		6,892,100	0	1200	11,405,745,968	1200	11,490,598,468	100	62.62						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Mengikuti POPDA Kaltim ke XVI di Kab.Paser 10 Oktober-28 Oktober 2022 , PORPROV VII 18 Nov-07 Des 2022 dan koordinasi dan monitoring,mengikuti event di luar kota	
2.1.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dbina	%	32	16,287,000,000			0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
2.1.3.1	Pemustatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemustatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Unit					0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1.3.2	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang					0	0		0		0		0		0	0	100	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1.3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen					0	0		0		0		0		0	0	100	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1.4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	%	100	34,850,000,000			0	75	5,700,000,000	0	750,000,000		0	77	3,984,590,200	77		102.67	83.06	77		4,734,590,200	77	13.59	Dinas Pemuda,		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
										I		II		III		IV												
										8	9	10	11	12	13	14	15											
1	2	3	4	5		6		7		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	27			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					40	55,000,000	16	210,000	16	26,530,500	16	11,986,000	5	11,691,000	5	50,417,500	0	91.67			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin			
3.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					57	375,297,000	45	42,315,000	5	91,899,500		82,944,500	3	110,768,800	3	327,927,800	0	87.38			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin			
3.1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					23	325,800,000	14	0	5	85,901,250		0	4	221,610,750	4	307,512,000	0	94.39			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin			
3.1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					3500	22,000,000	782	2,908,000	212	2,856,000	212	1,220,000	1500	10,610,000	1500	17,594,000	0	79.97			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin			
3.1.4.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket					38	75,000,000	13	410,000		35,063,000		10,679,000	25	24,996,500	25	71,148,500	0	94.86			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin			
3.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					100	350,000,000	8	18,212,600	15	103,416,624	10	37,097,435	30	89,840,350	30	248,567,009	0	71.02			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin			
3.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	77	1,612,000,000	0	73	0	0	0	0	0	0	0	80.01	0	80	0	109.59	0	80	0	103.9	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Survei IKM Internal dilaksanakan walaupun anggaran sub kegiatan tidak tersedia		
3.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	77	15,532,572,000	0	73	2,642,000,000		662,509,606		240,688,190		459,151,250	84.83	747,714,456	84	2,110,063,502	115.07	79.87	84		2,110,063,502	109.09	13.58	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin	
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					2	10,000,000		2,366,300		2,336,000		34,200	2	4,924,800	2	9,661,300	100	96.61			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin			
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					6	1,484,000,000		327,173,275		122,807,569		174,219,361	6	448,427,025	6	1,072,727,230	100	72.29			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin			
3.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					35	1,148,000,000		332,970,031		115,444,621		284,897,689	29	294,362,631	29	1,027,674,972	0	89.52			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin : Gaji 21 Naban dan THL, 8 outsourcing			
3.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	79	6,119,700,000	0	75	1,081,200,000		82,642,127		64,928,557		232,326,707	19.6	537,971,574	19	917,868,965	25.33	84.89	19		917,868,965	24.05	15	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana kegiatan rutin	
3.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					25	569,200,000	5	82,642,127	5	63,768,519	5	122,545,009	10	145,602,174	10	414,557,829	40	72.83			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin			
3.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					9	170,000,000	9	0		1,160,038		74,593,600		88,479,150	9	164,232,788	100	96.61			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin			
3.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					4	342,000,000		0		0		35,188,098	4	303,890,250	4	339,078,348	100	99.15			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana di TW IV			
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian akomodasi	%	53				30								31.67		31		103.33		31		58.49		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	a. Kegiatan yang dapat saling sinergi antar bidang pemuda,olahraga dan pariwisata (pelaksanaan puncak Haornas XXXIX , road to haornas dan festival Sandeq dengan bidang pariwisata) b. Merupakan Kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target c. Kegiatan perekonomian mulai membangkit pasc pandemi, dan bertahap pelaku parwisata dan pelaku ekonomi kreatif mulai bangkit dan menggerakkan perekonomian dan DPOF mendukung pelaku pariwisata dan pelaku ekraf dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan d. Optimalisasi peran masyarakat dan mitra kerja DPOF dalam mendukung pelaksanaan program pariwisata yaitu optimalisasi peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar, peningkatan SDM pariwisata, sehingga masyarakat di sekitarnya bisa ikut terlibat membangun dalam bidang kepariwisataan di Balikpapan seperti Pokdarwis Tanjung Bayur, Pokdarwis Sahabat Sember, dan lain-lain dan dukungan mitra kerja pariwisata seperti PHRI,ASITA,HPI dengan mengikuti kegiatan pameran atau BTB untuk mempromosikan pariwisata	
4.1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	%	6	44,857,000,000		0	3	5,685,747,000		143,413,132		835,489,487		219,863,520	10.61	3,686,641,020	10	4,885,407,159	333.33	85.92	10		4,885,407,159	166.67	10.89	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
4.1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	%	77	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu	
4.1.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya	%	24	33,167,000,000	0	10	5,480,000,000		141,080,332		835,489,487		219,863,520	10	3,514,664,424	10	4,711,097,763	100	85.97	10		4,711,097,763	41.67	14.2	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Kajian Wisata Bahari dari pagu perubahan dan pemeliharaan dan pengadaan sapras PMSS	
4.1.2.1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen					1	100,000,000		0		0		0	1	99,589,200	1	99,589,200	100	99.59					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kajian wisata bahari dari pagu perubahan	
4.1.2.2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Sarana/Prasarana					10	5,080,000,000		115,874,052	2	804,068,383	2	219,863,520	6	3,183,379,258	6	4,323,185,213	0	85.1					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Pemeliharaan dan pengadaan sapras di pantai manggar	
4.1.2.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan					16	300,000,000		25,206,280	16	31,421,104		0		231,695,966	16	288,323,350	100	96.11					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Pelatihan pokdarwis	
4.1.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	%	12	10,590,000,000	0	5	55,747,000	0	5	0	0	0	0	0	40,883,695	5	40,883,695	100	73.34	5		40,883,695	41.67	0.39	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
4.1.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan					16	55,747,000		0		0		0	16	40,883,695	16	40,883,695	100	73.34					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Penyuluhan dan pendampingan Kegiatan Sadar Wisata dan Sapta Pesona TW II dan TW IV	
4.1.3.2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2022 yang dikoordinasikan oleh sekretariat tentang target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Masih berlangsungnya konflik internal di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Kota Balikpapan tahun 2022 telah menghambat pelaksanaan program kegiatan keolahragaan seperti pada saat pengiriman atlet mengikuti Porprov VII di Berau , dengan 52 Cabor yang terdaftar di KONI namun yang mengikuti hanya 37 Cabor , dan 10 Cabor tidak ikut menyerahkan data untuk proses pendaftaran cabang olahraga Kota Balikpapan , melalui entry by number ke PB Porprov VII yang dilakukan oleh KONI Balikpapan																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan
Pariwisata
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

COKORDA ISTRI RATIH KUSUMA W.
196804121999032002

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
				5		6		7		8		9				10		11				12		13		14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.11	Rp	K	Rp	0.11	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	0	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu			
1.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	%	71	6,869,587,500		0	67	1,623,998,800	0	315,605,196	0	315,403,630	0	619,732,534	88,17	307,828,124	88	1,558,569,484	131.34	95.97	88	1,558,569,484	123.94	22.69	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Berdasarkan pengolahan data dari DPMPSTP realisasi tercapai 88,17% jika dibandingkan dengan target 67% dengan jumlah penerbitan sejumlah 13.202 izin jika dibandingkan dengan jumlah permohonan yang diajukan sebesar 14.974 izin		
1.1.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	dokumen	58022	6,869,587,500		0	11596	1,623,998,800	1914	315,605,196	2243	315,403,630	4494	619,732,534	11314	307,828,124	11314	1,558,569,484	0	95.97		1,558,569,484	0	22.69	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Berdasarkan pengolahan data dari DPMPSTP realisasi tercapai 88,17% jika dibandingkan dengan target 67% dengan jumlah penerbitan sejumlah 13.202 izin jika dibandingkan dengan jumlah permohonan yang diajukan sebesar 14.974 izin		
1.1.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan	dokumen					6200	577,000,000	1336	98,974,064	671	143,374,391	2274	170,760,500	1290	134,697,243	1290	547,806,198	0	94.94					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Belum tercapai karena terdapat beberapa izin yang tidak dapat diterbitkan karena terkendala kurang lengkapnya administrasi perizinan		
1.1.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha	Unit Usaha					96	85,000,000	19	35,929,934	63	3,442,500	75	30,624,467	64	12,654,319	64	82,651,220	0	97.24					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	melampaui target dikarenakan makin meningkatnya pelaku usaha yang mengajukan verifikasi untuk pemenuhan dokumen perizinannya pada DPMPSTP Kota Balikpapan		
1.1.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan dan konsultasi yang dilayani	Kali					10000	149,999,400	559	22,898,600	1509	10,884,924	2145	108,481,300	9960	6,562,500	9960	148,827,324	0	99.22					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;			
		Jumlah survei SKM yang dilaksanakan	1Kali					1		0		0		1		0		0		0						Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;			
1.1.1.4	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan	dokumen					6200	577,000,000	1.336	98,974,064	671	143,374,391	2274	170,760,500	1290	134,697,243	1290	547,806,198	0	94.94					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Belum tercapai karena terdapat beberapa izin yang tidak dapat diterbitkan karena terkendala kurang lengkapnya administrasi perizinan		
1.1.1.5	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha	Unit Usaha					96	85,000,000	19	35,929,934	63	3,442,500	75	30,624,467	64	12,654,319	64	82,651,220	0	97.24					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	melampaui target dikarenakan makin meningkatnya pelaku usaha yang mengajukan verifikasi untuk pemenuhan dokumen perizinannya pada DPMPSTP Kota Balikpapan		
1.1.1.6	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan dan konsultasi yang dilayani	Kali					10000	149,999,400	559	22,898,600	1509	10,884,924	2145	108,481,300	9960	6,562,500	9960	148,827,324	0	99.22					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Melampaui target disebabkan oleh memaksimalkan pelayanan dan pendampingan OSS baik secara offline maupun online		
		Jumlah survei SKM yang dilaksanakan	Kali					1					1				1		100						Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target			
2	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi investasi	Persentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	%	100				100									0		0		0		0		0	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu			
2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	%	25	2,389,355,500		0	5	275,980,200		0		2,946,219		109,656,043		148,642,200	0	261,244,462	0	94.66	0	261,244,462	0	10.93	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Belum tercapai karena Perda Insentif Kemudahan Berusaha masih dalam proses pengesahan oleh DPRD Kota Balikpapan		
2.1.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali/Raperwali) yang disahkan	%	100	1,150,000,000		0	20	148,310,800	0	0	2,946,219	0	19,511,743	20%	112,776,800	20	135,234,762	100	91.18	20	135,234,762	20	11.76	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Belum tercapai karena Perda Insentif Kemudahan Berusaha masih dalam proses pengesahan oleh DPRD Kota Balikpapan			
2.1.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rancangan fasilitasi insentif kemudahan investasi	dokumen					1	148,310,800	0	0	0	2,946,219	0	19,511,743	1	112,776,800	1	135,234,762	100	91.18					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target (Output berupa Naskah Penjelasan yang telah diajukan ke Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023)		
2.1.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	%	100	1,239,355,500		0	20	127,669,400	0	0	0	0	0	90,144,300	20	35,865,400	20	126,009,700	100	98.7	20	126,009,700	20	10.17	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Tingkat capaian tercapai 100%		
2.1.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RUPM Kota Balikpapan	dokumen					1	127,669,400	0	0	0	0	0	90,144,300	0	35,865,400	0	126,009,700	0	98.7					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target		
2.2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	100	4,349,488,000		0	80	664,995,000	0	30,361,455	0	32,500,000	0	310,336,379	80	283,825,730	80	657,023,564	100	98.8	80	657,023,564	80	15.11	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Tingkat capaian tercapai 100% karena terdapat peningkatan minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal di Kota Balikpapan yang ditandai oleh beberapa audiensi peninjauan peluang investasi dari Malaysia serta tindak lanjut waste management oleh Korea Selatan		
2.2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	25	4,349,488,000		0	5	664,995,000	0	30,361,455	0	32,500,000	0	310,336,379	5	283,825,730	5	657,023,564	100	98.8	5	657,023,564	20	15.11	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Tingkat capaian tercapai 100% karena kegiatan promosi dilaksanakan secara maksimal baik yang menggunakan dana PAD maupun Non PAD (Briefing Session on Indonesia Investment Opportunity oleh Bank Indonesia)		
2.2.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Jenis Sarana Promosi	Jenis					4	133,997,000	1	18,506,925	1	32,500,000	1	21,384,302	1	56,624,773	1	129,016,000	0	96.28					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target		
2.2.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	event					5	530,998,000	0	11,854,530	1	0	3	288,952,077	1	227,200,957	1	528,007,564	0	99.44					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target		
2.3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	%	100	3,053,150,000		0	100	314,994,200	0	33,882,353	0	19,597,275	0	173,919,882	100	309,917,160	100	537,316,670	100	170.58	100	537,316,670	100	17.6	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target karena Fasilitas dan Pendampingan permasalahan Penanaman Modal di Kota Balikpapan yang diandai menggunakan dana PAD maupun Non PAD (Briefing Session on Indonesia Investment Opportunity oleh Bank Indonesia) serta tindak lanjut waste management oleh Korea Selatan		
2.3.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM	1650	3,053,150,000		0	300	314,994,200	645	33,882,353	240	19,597,275	717	173,919,882		309,917,160	717	537,316,670	0	170.58		537,316,670	0	17.6	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Data Rencana Investasi PMA dan PMDN masih Menunggu Press Release dari DPMPSTP Provinsi Kaltim Data Target Kinerja untuk Triwulan IV		
2.3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah proyek yang dilakukan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Proyek					6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	</								

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			16	27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit					24	330,000,000	8	46,747,623	13	52,598,992	3	98,603,953	0	39,519,087	0	237,469,655	0	71.96					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target		
3.1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jenis					8	194,040,100	0	0	1	16,388,000	1	44,710,750	5	96,387,320	5	157,486,070	0	81.16					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Terdapat target kinerja yang tidak tercapai yaitu Belanja Pemeliharaan Instalasi air karena kondisi masih baik		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																				Rendah	Sangat Tinggi					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				6.94	94.18								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				54.66	84.84					39.81	14.94		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Rendah	Tinggi					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				102.81	98.85					96.64	17.61		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan DPMP TSP Kota Balikpapan 2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan DPMP TSP dalam mencapai Sasaran 3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1.Terdapat target kinerja yang tidak / belum terealisasi 2. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak seluruhnya terakomodir dalam APBD; 3. Target output yang terlalu tinggi pada saat penyusunan Renstra dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya																									
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu
Kota Balikpapan

BOEDI LILIONO
197109081991011003

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
							8	9	10	11	12	13	14	15							16	27					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	14.2				14.16							14.23			14		100		14		98.59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan pencaanangan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2021 – 2026 di dalam RPJMD Kota Balikpapan yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, secara teknis adalah dengan mengalokasikan pendanaan tahunan diluar anggaran reguler dari Pemerintah Pusat (DAK Fisik/Non Fisik)/Provinsi (Bankeuprov), a. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada seluruh sekolah jenjang SD/SMP sederajat, b. Pemberian Subsidi SPP bagi Siswa sekolah SD dan SMP Swasta/Sederajat, c. Pemberian Beasiswa terhadap Tenaga Pendidik Non PNS di sekolah SD/SMP Swasta/Sederajat, d. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri, e. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik Non PNS yang mengajar di sekolah PAUD/SD/SMP Negeri-Swasta/Sederajat, f. Pemberian Seragam Sekolah kepada kelas I dan VII, g. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);	
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	%	87.33	1,737,532,481,516	0	86.93	1,521,454,367,689	90.8	0	90.8	0	90.81	0	90.81	10,454,266,740	90	10,454,266,740	104.65	0.69	90	10,454,266,740	103.06	0.6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	81.5	796,035,319,400	0	88.7	1,260,028,491,381	88.73	0	88.73	0	88.73	0	88.73	10,454,266,740	88	10,454,266,740	100	0.83	88	10,454,266,740	96.17	1.31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.1.1.1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit				3	1,045,509,600		0		0	2.00	0	1.00	0	1	0	33.33	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit				3	600,000,000		0		0	2	0	1	0	1	0	33.33	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit				5	2,060,937,400		0		0	4	0	1	0	1	0	20	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit				5	4,075,000,000		0		0	5			0	5	0	100	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	set				1786	7,000,000,000		0		0		0	1786.	0	1786.	0	100	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.6	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit				2133	11,246,400,000		0		0	2133	0		0	2133	0	100	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik				100	120,000,000		0		0		0	192	0	192	0	192	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan				71279	568,475,000	71.279	0	71279	0	71.279	0	71.279	0	71.279	0	0.1	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan				213	137,812,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik				6	750,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang				3310	6,767,750,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan				213	300,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan				71279	175,457,584,581		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.14	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Unit				0	0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit				0	0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit				0	0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit				0	0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit				0	0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.19	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket					1,048,619,000,000		0		0		0	2	10,454,266,740	2	10,454,266,740	0	1					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.20	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang				0	1,280,022,800		0		0		0	5	10,454,266,740	0	5	0	0	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit				0	0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	98.46	719,908,076,725	0	95.26	211,432,449,709	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit				2	66,396,186,300		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang				4	2,050,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit				5	4,471,093,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit				6	15,553,943,500		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket				714	6,000,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.6	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket				12129	10,916,100,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	siswa				100	300,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik				10497	425,264,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan				91	200,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	siswa				5	500,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang				1679	6,666,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	sekolah				91	200,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	sekolah				32962	95,955,027,908		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.14	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Unit				0	1,798,835,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	31.3	116,295,589,706	0	29.3	22,288,261,600	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.3.1	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	sekolah				486	60,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.3.2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang				1232	3,915,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.3.3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	sekolah				498	510,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.3.4	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	sekolah				10965	7,543,261,600		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.3.5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang				1368	10,260,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.3.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit				0	0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.3.7	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit				0	0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.3.8	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket				0	0		0		0		0		0	0	100	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sptl yang terakreditasi	%	100	105,293,493,685	0	71.43	27,705,165,000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.4.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit				5	500,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.4.2	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	set				357	2,000,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.4.3	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket				2365	5,315,400,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.4.4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	lembaga				15	72,150,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.4.5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang				269	288,750,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.4.6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	lembaga				15	116,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.4.7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	siswa				2533	9,678,777,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.4.8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Transport ustz	Orang				2435	9,734,088,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	2,475,238,052	0	66.67	423,500,000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.2.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100	2,050,853,915	0	33	423,500,000	0	0		0		0		0	0	0	0	0							

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
					6		7		I		II		III		IV												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27											
1.2.2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	%	0	424,384,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	%	92.95	8,394,166,476	0	90.95	1,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.3.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	71.75	8,394,166,476	0	70.35	1,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.3.1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen			2	1,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)	%	99.18	1,205,750,273	0	98.98	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.4.1	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	91.21	597,592,065	0	83.21	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	sekolah			107	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.4.2	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	100	608,158,208	0	90	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	sekolah			486	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.4.2.2	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan terkait operasional Sekolah	sekolah			486	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2	Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	34		27								29.64		29		107.41		29		85.29				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	? Dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal; ? Penetapan dan komitmen pelaksanaan SOP Pelayanan Publik; ? Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja melalui evaluasi periodik atas pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Individu yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja dan SKP yang telah ditetapkan; ? Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi melalui penggunaan aplikasi diantaranya E-Office, SIPD, SIPKD, Siperangko, SIRUP, SIP Serasi, SIMADAP dan sebagainya; ? Keterbukaan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Portal Satu Data Balikpapan yang dalam hal ini dikoordinir oleh Bappeda dan Diskominfo Kota Balikpapan; ? Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai pemotongan Tambahan Penghasilan seluruh pegawai yang melanggar peraturan jam kerja; ? Melakukan upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik serta penilaian kepuasan terhadap pelayanan dalam bentuk koin penilaian dan survey; ? Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); ? Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pekerjaan harian diantaranya melalui pemanfaatan/pengelolaan Surat Elektronik (E-mail), "Online Spreadsheet" dan "Cloud Storage" dan Grup Media Sosial seperti "What'sAp Group" serta pemanfaatan teknologi Kolaborasi Daring seperti aplikasi Zoom.
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	89.18	2,025,447,312,150	0	85.18	356,285,233,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86.03	885,000,000	0	78.93	142,714,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			12	142,714,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	88.75	2,002,642,780,687	0	87.15	351,877,541,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang			2215	351,134,624,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			35	742,917,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	83.99	0	81.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1.4	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Nilai	87.43	1,079,271,572	0	85.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	87.21	9,636,170,843	0	85.21	2,291,225,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			100	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			100	504,185,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			100	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			4	167,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen			4	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			500	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			1	550,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	84.79	1,117,779,116	0	82.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	88.04	5,068,325,650	0	86.44	1,003,872,000	0	0	0	0															

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
								I		II		III		IV														
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
3.4.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	27	
3.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%	100	6,400,623,999	0	94.12	1,220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3.5.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%	100	717,604,388	0	94.12	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3.5.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	objek				145	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.5.1.2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	objek				145	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.5.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	%	28.57	5,663,019,611	0	21.43	1,120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.5.2.1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek				30	700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.5.2.2	Pengembangan Cagar Budaya	Penggalan situ yg baru	situs				145	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.5.2.3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	objek				4	270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi	%	55.56	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.6.1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang dibina	%	56.25	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah (RLS)	%	0				10.7					10.7		10		100		10		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan pencanangan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2021 – 2026 di dalam RPJMD Kota Balikpapan yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, secara teknis adalah dengan mengalokasikan pendanaan tahunan diluar anggaran reguler dari Pemerintah Pusat (DAK Fisik/Non Fisik)/Provinsi (Bankeuprov). a. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada seluruh sekolah jenjang SD/SMP sederajat. b. Pemberian Subsidi SPP bagi Siswa sekolah SD dan SMP Swasta/Sederajat; c. Pemberian Beasiswa terhadap Tenaga Pendidik Non PNS di sekolah SD/SMP Swasta/Sederajat; d. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri; e. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik Non PNS yang mengajar di sekolah PAUD/SD/SMP Negeri-Swasta/Sederajat; f. Pemberian Seragam Sekolah kepada kelas I dan VII; g. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		3.88	0.03			3.53	0.03					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		0.83	0									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		2.08	0.02			2	0.03					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		8.72	0.06			8.59	0.05					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																												
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																												

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kota Balikpapan

IRFAN TAUFIK
197401101994031006

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
				5		6		7		I		II				III		IV				12		13		14	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1	Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	6.55		6.51		6.51		6		6		0		0		0		0		0		0		Dinas Perdagangan	
1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	Juta Dollar	2050	1,797,547,000	0	1175	60,000,000	1118	0	1646	12,713,000	916.62	0	348.91	47,232,210	348.91	59,945,210	0	99.91	0		59,945,210	0	3.33	Dinas Perdagangan	tercapai
1.1.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk	%	100	1,797,547,000	0	20	60,000,000	0	20		12,713,000	0	86.67	47,232,210	86	59,945,210	430	99.91	86		59,945,210	86	3.33	Dinas Perdagangan	Target indikator merupakan penambahan dari nilai awal, bukan akumulasi ; realisasi melebihi target	
1.1.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	kuantitas pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan produk	Orang			4		60,000,000		4		12,713,000	2	0	3	47,232,210	2	59,945,210	0	99.91						Dinas Perdagangan;	Pelaku usaha yang mendapat pembinaan pengembangan produk Juni : CV. Azra Sentosa Jaya (DDS), BDS Snack (DDS), CV. Yoi Akua Kulture (Rumah Produksi) September : Bahalap (Ditampilkan di House Trade Amsterdam), Cetak Godong (Ditampilkan di House Trade Amsterdam)
1.1.1.2	Pameran Dagang Nasional	Kuantitas pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pameran dagang nasional	Orang			4		0	00.01	0		12,713,000	0	3	0	6	0	0	0							Dinas Perdagangan;	Agustus : Bahalap (ICE Apeksi di Padang) September : Bahalap (Tong Tong Fair di Den Haag Belanda), Cetak Godong (Tong Tong Fair di Den Haag Belanda)
1.2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	%	80	1,170,000,000	0	60	120,000,000		0		21,226,500	28,358,168	76.92	57,841,065	76	107,425,733	126.67	89.52	76		107,425,733	95	9.18	Dinas Perdagangan	tercapai	
1.2.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran	%	100	1,170,000,000	0	20	120,000,000	0	0	0	21,226,500	28,358,168	76.92	57,841,065	76	107,425,733	380	89.52	76		107,425,733	76	9.18	Dinas Perdagangan	Agustus : ICE Apeksi Agustus – Sept : Festival UMKM Bayan Fair September : Tong Tong Fair, Kemitraan UMKM bersama Shopee, Indomaret dan Sarinah	
1.2.1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kegiatan			4		120,000,000	0		2	21,226,500	4	28,358,168	4	57,841,065	4	107,425,733	100	89.52						Dinas Perdagangan;	tercapai
2	Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	%	87		78										0		0		0		0		0		Dinas Perdagangan	
2.1	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	76	3,287,537,500	0	70	100,000,000	0			15,747,142	20,660,682	68.96	43,287,084	68	79,694,908	97.14	79.69	68		79,694,908	89.47	2.42	Dinas Perdagangan	tidak tercapai karena kurangnya kesadaran pedagang pasar dalam melakukan terateru ulang	
2.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTTP) yang diterahera ulang dalam tahun berjalan	%	76	3,287,537,500	0	70	100,000,000	0			15,747,142	20,660,682	68.96	43,287,084	68	79,694,908	97.14	79.69	68		79,694,908	89.47	2.42	Dinas Perdagangan	tidak tercapai karena kurangnya kesadaran pedagang pasar dalam melakukan terateru ulang	
2.1.1.1	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan metrologi legal	Hari			70		100,000,000		30	0	12	15,747,142	19		20,660,682	5	43,287,084	5		79,694,908	0	79.69			Dinas Perdagangan;	tidak tercapai karena kurangnya personil pengawasan metrologi legal
		Persentase kesesuaian BDKT(Barang dalam keadaan terbungkus) yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%			16							31.76			31.76			198.5							Dinas Perdagangan;	tercapai
3	Terjaganya stabilitas harga bahan pokok	Inflasi pangan bergejolak	%	0		(3-5)										0		0		0		0		0		Dinas Perdagangan	
3.1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	%	5	3,680,328,750	0	5.8	569,712,550		3,766,000		49,619,600	64,157,075	10.61	389,280,829	10	506,823,504	200	88.96	10		506,823,504	200	13.77	Dinas Perdagangan	tidak tercapai karena kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor misal kenaikan BBM	
3.1.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	dokumen	12	1,835,328,750	0	12	232,823,450	3	0	3	5,091,200	44,924,575	3	173,231,129	3	223,246,904	0	95.89		223,246,904	0	12.16	Dinas Perdagangan	tercapai		
3.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Partisipasi Pasar Lelang yang di ikuti	Kali			2		131,103,500			0	5,091,200	40,127,575	1	76,976,179	1	122,194,954	0	93.2							Dinas Perdagangan;	idak tercapai karena pasar lelang lebih banyak diadakan di Indonesia bagian barat sehingga kurang tepat sasaran jika diikuti
		Tersedianya laporan hasil koordinasi terkait kebutuhan pokok dan barang penting	dokumen			1								1		1		100								Dinas Perdagangan;	tercapai
3.1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya laporan hasil koordinasi terkait aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting	dokumen			1		26,720,000			0		4,797,000	1	21,255,000	1	26,052,000	100	97.5							Dinas Perdagangan;	tercapai
3.1.1.3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	penyusunan neraca pangan yang dihasilkan	dokumen			1		74,999,950			0		0	1	74,999,950	1	74,999,950	100	100							Dinas Perdagangan;	tercapai
		Tersedianya dokumen hasil monitoring	dokumen			45			11		12		12		12		12		0							Dinas Perdagangan;	tercapai
3.1.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan	%	78	1,745,000,000	0	56	336,889,100		3,766,000		44,528,400	19,232,500	27.27	216,049,700	27	283,576,600	48.21	84.18	27		283,576,600	34.62	16.25	Dinas Perdagangan	tidak tercapai karena kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor misal kenaikan BBM	
3.1.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	dokumen			4		236,889,100		3,766,000		9,560,000	13,832,500	4	189,208,900	4	216,367,400	100	91.34							Dinas Perdagangan;	lamin etam, sp2kp, sahabat.co, sipkaltim
3.1.2.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pasar khusus	dokumen			1		100,000,000		0	1	34,968,400	5,400,000	2	26,840,800	2	67,209,200	0	67.21							Dinas Perdagangan;	tercapai
		Jumlah Laporan hasil pemantauan dan monitoring harga dan stok operasi pasar reguler yang dilaksanakan	dokumen			1								1		1		100								Dinas Perdagangan;	tercapai
3.1.3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pupuk bersubsidi yang tersalurkan	%	31	100,000,000	0	28	0		0	0		0	13	0	13	0	46.43	0	13		0	41.94	0		Dinas Perdagangan	idak tercapai karena keluarnya Permentan 10 Tahun 2022 yang mengakomodir penyaluran pupuk bersubsidi hanya untuk sub sektor tertentu
4	Meningkatnya sarana distribusi yang representatif	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	%	8.33		8.33										0		0		0		0		0		Dinas Perdagangan	
4.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	%	93	81,178,196,851	0	80	12,341,595,800		635,514,860		1,488,785,973	1,642,696,348	80	4,932,300,701	80	8,699,297,882	100	70.49	80		8,699,297,882					

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Kali					30	200,000,000	7	8,421,901	12	56,858,227	14	59,701,498	9	74,996,157	9	199,977,783	0	99.99					Dinas Perdagangan;	Indikator tercapai sesuai target
6.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	78	2,573,000,000	0	70	250,000,000		0		0		230,000,000	77.44	20,000,000	77	250,000,000	110	100	77	250,000,000	98.72	9.72	Dinas Perdagangan	Terdapat pergantian indikator dan target capaian sehingga sampai dengan TW III tidak dapat diukur dan direncanakan terrealisasi dengan indikator dan target yang baru di TW IV	
6.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit					5	250,000,000		0		0	1	230,000,000		20,000,000	1	250,000,000	20	100					Dinas Perdagangan;	tercapai
6.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	88	7,941,700,000	0	80	1,947,512,400		197,959,022		339,771,425		343,065,622	77.81	417,226,633	77	1,298,022,702	96.25	66.65	77	1,298,022,702	87.5	16.34	Dinas Perdagangan	tidak tercapai	
6.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	Jenis					2	8,700,000		0		0	1	1,000,000		2,000,000	1	3,000,000	0	34.48					Dinas Perdagangan;	pengadaan material
6.1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening					25	1,145,213,500		146,509,916		170,694,516		144,045,949	25	177,629,308	25	638,879,689	100	55.79					Dinas Perdagangan;	realisasi keuangan menyesuaikan dengan volume pemakaian pada rekening jasa komunikasi dan sumberdaya air
6.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan gedung kantor yang dibersihkan	m2					1415	793,598,900		51,449,106		169,076,909		198,019,673	1415	237,597,325	1415	656,143,013	100	82.68					Dinas Perdagangan;	tercapai
6.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	6,459,994,000	0	70	929,020,000		2,364,200		237,298,721		129,764,304	77.91	517,648,176	77	887,075,401	110	95.49	77	887,075,401	98.72	13.73	Dinas Perdagangan	tercapai	
6.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Unit					40	249,950,000		1,657,000		36,785,563		55,377,859	23	139,547,843	23	233,368,265	57.5	93.37					Dinas Perdagangan;	pemeliharaan kendataan sesuai jumlah kendaraan perorangan
6.1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Unit					10	149,900,000		707,200		29,246,777		24,959,545	8	76,619,633	8	131,533,155	80	87.75					Dinas Perdagangan;	pemeliharaan kendaraan sesuai jumlah kendaraan operasional
6.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis					6	129,170,000		0		25,339,500		49,426,900	6	53,050,850	6	127,817,250	100	98.95					Dinas Perdagangan;	tercapai
6.1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Gedung					6	150,000,000		0	2	145,926,881		0		0	2	145,926,881	0	97.28					Dinas Perdagangan;	pemeliharaan kantor dinas dan UPTD Metrologi
6.1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis					2	250,000,000		0		0	1	248,429,850		248,429,850	0	99.37							Dinas Perdagangan;	pemeliharaan jaringan listrik pasar pandansari dan pemeliharaan parkir kantor Dinas
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		88.52	78.26			48.56	6.71				
Predikat Kinerja																		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		46.43	81.4								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Rendah	Tinggi								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		130.73	67.88					67.41	8.54		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Tinggi	Sedang			Sedang	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		88.41	85.49					78.28	11.59		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Tinggi	Tinggi					Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perdagangan dalam mencapai Sasaran 3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. kurangnya kesadaran masyarakat/pedagang dalam memahami pentingnya metrologi legal 2. Ketidakesesuaian antara indikator kinerja dengan kewenangan Dinas Perdagangan dalam pemberian rekomendasi perizinan pelaku usaha																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Balikpapan

HAEMUSRI
197211122000121003

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan										
					5		6		7		8				9		10				11		12		13		14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27			
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	34				27								0		0		0		0		0		Dinas Perhubungan				
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	80	197,170,061,010		0	76	25,153,885,170	4,049,653,967	6,532,594,194	6,645,999,094	6,809,959,103	0	24,038,206,358	0	95.56	0	24,038,206,358	0	12.19	Dinas Perhubungan	Target capaian program realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022							
1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	80	0		0	76.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan				
1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	90	84,809,488,647		0	86	16,726,582,220	3,649,170,899	4,509,043,276	4,415,086,591	86	3,544,272,870	86	16,117,573,636	100	96.36	86	16,117,573,636	95.56	19	Dinas Perhubungan	Target capaian kegiatan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022						
1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	dokumen					14	16,509,422,220	3	3,649,170,899	3	4,378,985,276	3	4,353,436,591	3	3,544,272,870	3	15,925,865,636	0	96.47				Dinas Perhubungan;					
1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen					7	217,160,000	0	7	130,058,000		61,650,000	0	7	191,708,000	100	88.28						Dinas Perhubungan;					
1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	89	39,054,921,666		0	86	200,000,000	0	15,675,000	0	100	183,270,770	100	198,945,770	116.28	99.47	100	198,945,770	112.36	0.51	Dinas Perhubungan	Target capaian kegiatan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022						
1.1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun dalam rangka pengendalian dan pengawasan angkutan barang (pagar lahan Depo Kontainer KM. 13)	Jenis					1	200,000,000	0	15,675,000	0	1	183,270,770	1	198,945,770	100	99.47							Dinas Perhubungan;					
1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	90	6,127,032,000		0	86	719,995,000	0	0	0	86	655,604,400	86	655,604,400	100	91.06	86	655,604,400	95.56	10.7	Dinas Perhubungan	Target capaian kegiatan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022						
1.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Orang					155	719,995,000	0	0	0	155	655,604,400	155	655,604,400	100	91.06							Dinas Perhubungan;					
1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	90	9,277,770,605		0	86	1,043,992,500	63,800,868	214,319,492	207,446,185	86	533,829,468	86	1,019,396,013	100	97.64	86	1,019,396,013	95.56	10.99	Dinas Perhubungan	Target capaian kegiatan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022						
1.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis					19	83,993,000	0	18,596,718	0	19	60,119,265	19	78,715,983	100	93.72							Dinas Perhubungan;					
1.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Jenis					74	455,999,500	31,900,434	112,204,376	102,515,850	74	181,401,813	74	428,022,473	100	93.86							Dinas Perhubungan;					
1.1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	Jenis					21	246,000,000	0	0	0	21	215,144,529	21	215,144,529	100	87.46							Dinas Perhubungan;					
1.1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jenis					4	18,000,000	1,320,000	1,980,000	1,320,000	4	3,300,000	4	7,920,000	100	44							Dinas Perhubungan;					
1.1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan koordinasi luar dan dalam daerah	Kali					100	240,000,000	42	30,580,434	25	81,538,398	27	103,610,335	35	73,863,861	35	289,593,028	0	120.66					Dinas Perhubungan;				
1.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	82	1,238,473,290		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan				
1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	90	38,792,261,203		0	86	6,463,315,450	336,682,200	1,793,556,426	2,023,466,318	86	1,892,981,595	86	6,046,686,539	100	93.55	86	6,046,686,539	95.56	15.59	Dinas Perhubungan	Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022						
			IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	17,870,113,600	0	81	0	0	0	0	81	0	81	0	100	0	81	0	95.29	0	Dinas Perhubungan	Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022						
1.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	Jenis					2	5,000,000		1,000,000	0	1	2,000,000	1	3,000,000	0	60							Dinas Perhubungan;					
1.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening					4	2,038,788,000		17,745,950	577,636,919		884,032,765		550,595,494		2,030,011,128	0	99.57					Dinas Perhubungan;					
		Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	Jenis					9										0								Dinas Perhubungan;				
1.1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa sewa komputer	Unit					3	77,591,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perhubungan;					
		Jasa sewa printer	Unit					15								0	0	0	0						Dinas Perhubungan;					
1.1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan gedung kantor yang di bersihkan	m2					145381	3,587,966,200	317,936,250	1,118,347,917	887,390,008		1,004,467,599		3,328,141,774	0	92.76							Dinas Perhubungan;					
1.1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan	Kali					7	753,970,000	0	97,571,590	252,043,545	7	335,918,502	7	685,533,637	100	90.92							Dinas Perhubungan;					
		Interior ruang rapat	Paket					1						1			100								Dinas Perhubungan;					
2	Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota	VC Ratio di Jalan Kota	Nilai	0.62				0.64						0		0		0		0		0		0		Dinas Perhubungan				
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum	%	62	58,456,673,028		0	42	50,539,572,500	13,941,723,695	6,966,786,902	9,681,721,962	23,346,909,171	0	53,937,141,730	0	106.72	0	53,937,141,730	0	92.27	Dinas Perhubungan								
		Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi	%	93																										

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
									I		II		III		IV					13				15				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.1.7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	%	14	15,445,600,000	0	10	2,787,812,650	0.01	29,880,750	0.09	252,307,800	0.14	414,883,630	0.30	869,508,426	0	1,566,580,606	0	56.19	0	1,566,580,606	0	10.14	Dinas Perhubungan	Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022		
2.1.7.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan lomba pelopor dan sosialisasi keselamatan lalu lintas	Kegiatan				14	299,999,950		29,880,750		152,220,000		16,381,310		89,219,035		287,701,095	0	95.9					Dinas Perhubungan;			
		Tertaksananya Kegiatan Posko Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Kegiatan				2												0						Dinas Perhubungan;			
2.1.7.2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Hari Operasi Khusus (Hari Besar Nasional dan Keagamaan)	Hari				83	2,487,812,700		0		100,087,800		398,502,320		780,289,391		1,278,879,511	0	51.41					Dinas Perhubungan;			
		Jumlah Hari Operasi Umum	Hari				144												0						Dinas Perhubungan;			
2.1.8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	27	8,535,000,000	0	19	830,000,000	0.02	19,600,000	0.17	139,686,375	0.06	38,833,400	0.74	614,660,531	0	812,780,306	0	97.93	0	812,780,306	0	9.52	Dinas Perhubungan	Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022		
2.1.8.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum Massal yang di pelihara dan dioperasikan	Unit				8	830,000,000		19,600,000		139,686,375		38,833,400		614,660,531	0	812,780,306	0	97.93					Dinas Perhubungan;			
		Jumlah Angkutan Umum Massal yang disediakan	Unit				2										0		0						Dinas Perhubungan;			
		Jumlah Halte Angkutan Umum yang dipelihara	halte				5											0		0						Dinas Perhubungan;		
		Jumlah Halte Angkutan yang dibangun	halte				10											0		0						Dinas Perhubungan;		
2.1.9	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	55	320,000,000	0	51	49,999,900	0.16	7,812,300	0.11	5,404,086	0.65	0	0.65	32,636,500	0	45,852,886	0	91.71	0	45,852,886	0	14.33	Dinas Perhubungan	Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022		
2.1.9.1	Sosialisai dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan angkutan perkotaan	Kegiatan				12	49,999,900	3	7,812,300	3	5,404,086	3	0	3	32,636,500	3	45,852,886	0	91.71					Dinas Perhubungan;			
2.1.10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	55	250,000,000	0	51	50,000,000		0	0.76	35,250,000		0	0.26	10,489,500	0	45,739,500	0	91.48	0	45,739,500	0	18.3	Dinas Perhubungan	Target capaian kegiatan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022		
2.1.10.1	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah sistem informasi manajemen angkutan yang dikelola	Aplikasi				1	50,000,000		0	1	35,250,000		0		10,489,500	1	45,739,500	100	91.48					Dinas Perhubungan;			
2.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan	%	70	12,790,000,000	0	62	765,000,000	2.60	10,990,000	6.85	43,586,040	6.70	26,373,500	45.85	584,251,597	45	665,201,137	72.58	86.95	45	665,201,137	64.29	5.2	Dinas Perhubungan	Target capaian program realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022		
2.2.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	%	85	12,625,000,000	0	81	700,000,000	1.10	7,690,000	4.05	28,335,840	1.56	10,947,000	81.24	568,678,097	81	615,650,937	100	87.95	81	615,650,937	95.29	4.88	Dinas Perhubungan	Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022		
2.2.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara dan dioperasikan	lokasi				1	500,000,000		5,300,000		10,071,600		9,300,000	1	391,186,169	1	415,857,769	100	83.17					Dinas Perhubungan;	Pelaksanaan pekerjaan fisik akan terealisasi pada Triwulan IV Tahun 2022		
2.2.1.2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pengadaan kendaraan operasi pengawasan pelabuhan pengumpan lokal	lokasi				1	200,000,000		2,390,000		18,264,240		1,647,000	1	177,491,928	1	199,793,168	100	99.9					Dinas Perhubungan;	Masuk dalam usulan Perubahan TA-2022		
2.2.2	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase TUKS yang dilakukan pengawasan	%	0	165,000,000	0	31	65,000,000	2.50	3,300,000	9.50	15,250,200	9.50	15,426,500	9.50	15,573,500	9	49,550,200	29.03	76.23	9	49,550,200	0	30.03	Dinas Perhubungan	Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022		
2.2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah TUKS yang diawasi	lokasi				20	65,000,000		3,300,000		15,250,200		15,426,500	20	15,573,500	20	49,550,200	100	76.23					Dinas Perhubungan;			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																	51.9	80.13			25.2	9.86						
Predikat Kinerja																	Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	68.69	85.36										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	Sedang	Tinggi										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																	68.86	72.19			59.52	10.66						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																	Sedang	Sedang			Rendah	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	18.15	82.86			16.07	18.93						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				- Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku – Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				- Pencapaian kegiatan/ sub kegiatan operasional (Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota) realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV. – Alokasi anggaran kas per kegiatan/ sub kegiatan masuk dalam triwulan II, III dan IV. – Adanya perbaikan terhadap rincian belanja sehingga dilakukan pergeseran, yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan.																								
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																												

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Balikpapan

ADWAR SKENDA PUTRA
197109261998031005

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13				14		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
1	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan	Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan	%	10				10										0		0		0		0		Dinas Perpustakaan dan Arsip			
1.1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	%	8	6,379,710,838			0	4	433,964,850			72,413,770		151,784,412		218,526,059	5	505,995,104	5	948,719,345	125	218.62	5	948,719,345	62.5	14.87	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Karena terjadi peningkatan jumlah perpustakaan yang terkreditasi oleh perpusnas
1.1.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	%	18	5,017,710,838			0	10	193,636,450			68,973,770		133,484,412		210,829,159	196	334,886,468	196	748,173,809	1960	386.38	196	748,173,809	1088.89	14.91	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pada saat penetapan target diawal kondisi sedang pandemi sehingga targetnya dibuat hanya 10%, tetapi pada bulan Agustus kunjungan TK dan PAUD dan anak SD, SMP, SMA sudah kembali normal karena pandemi sudah beralih ke New Normal
1.1.1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Meningkatnya jumlah penggunaan aplikasi iBalikpapan	pengguna							1000	29,700,000	72	115,500	114	178,901	377	687,338	440	2,475,676	440	3,457,415	0	11.64				Dinas Perpustakaan dan Arsip;		
1.1.1.2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dibina	perpustakaan					30	99,999,800		5	7,043,600	5	10,563,730	10	17,386,284	10	63,132,594	10	98,126,208	0	98.13					Dinas Perpustakaan dan Arsip;		
1.1.1.3	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina	perpustakaan khusus					2	0		0	3	0		0		0	3	0	0	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Sudah dilakukan pembinaan terhadap 3 perpustakaan khusus yaitu Lapas, Rutan, dan Bank Indonesia	
1.1.1.4	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Sumber Peningkatan layanan	SKM					1	0			48,840,800		108,240,889		185,054,863	1	249,446,799	1	591,583,351	100	0					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Peningkatan layanan berupa penambahan kelas literasi	
1.1.1.5	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Tertaksananya kegiatan pengelolaan bahan pustaka	Kegiatan					2		49,296,800			8,845,870		14,200,892		7,400,674	3	12,484,399	3	42,931,835	0	87.09				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Realisasi melampaui dari target yang ditetapkan pada kegiatan perbaikan bahan pustaka dimana terdapat buku-buku yang perlu perbaikan pada koleksi buku anak dikarenakan intensitas penggunaan buku anak yang tinggi pada saat kegiatan wisata edukasi anak PAUD, TK dan RA.	
1.1.1.6	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Kota Balikpapan	Laporan					1		14,639,850			4,128,000		300,000		300,000	1	7,347,000	1	12,075,000	100	82.48				Dinas Perpustakaan dan Arsip;		
1.1.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	%	15	1,362,000,000			0	11.5	240,328,400			3,440,000		18,300,000		7,696,900	11.98	171,108,636	11	200,545,536	100	83.45	11	200,545,536	73.33	14.72	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Terdapat peningkatan yang signifikan untuk peminjaman koleksi bahan pustaka oleh masyarakat.
1.1.2.1	Sosialisai Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi yang dilakukan	Kegiatan						3	240,328,400			3,440,000	1	18,300,000	1	7,696,900	2	171,108,636	2	200,545,536	0	83.45				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Pada APBD P terjadi penambahan kegiatan Pengukuhan GPMB Kota Balikpapan	
2	Meningkatnya Layanan Kearsipan Sesuai Standar	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	90.5				90.1										0		0		0		0			Dinas Perpustakaan dan Arsip		
2.1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	%	100	1,935,078,169			0	60	305,923,070			20,039,200		189,959,748		25,493,000	60	44,851,500	60	280,343,448	100	91.64	60	280,343,448	60	14.49	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2.1.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	%	100	1,291,013,324			0	42	209,924,150			10,147,500		147,807,148		10,040,000		20,246,500	0	188,241,148	0	89.67	0	188,241,148	0	14.58	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2.1.1.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%					55	29,964,900		10,147,500	45	10,134,000		0	10	0	55	20,281,500	100	67.68						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	sedang dalam proses pembuatan Daftar Arsip Aktif di masing-masing Unit Pengolah	
2.1.1.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase arsip inaktif yang disusutkan	%					55	29,959,250		0		510,000	25	10,040,000	30	17,321,500	55	27,871,500	100	93.03						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Arsip inaktif yang telah dilakukan penyusutan adalah Arsip Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2012-2015	
2.1.1.3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan yang dinilai	objek					15	150,000,000		0		137,163,148		0	21	2,925,000	21	140,088,148	0	93.39						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Pengawasan kearsipan tahun 2022 telah dilaksanakan pada 4 Perangkat Daerah, sebanyak 21 Objek pengawasan (objek pengawasan bukan perangkat daerah)	
2.1.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang dikelola	%	100	344,064,845			0	75	49,999,220		0	10	23,586,600		4,647,000	50	20,000,000	50	48,233,600	66.67	96.47	50	48,233,600	50	14.02	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pelaksanaan pengelolaan arsip statis sudah berjalan, namun masih belum optimal mengingat realisasi target masih di angka 60% dan kendala yang dihadapi karena penetapan Peraturan Walikota untuk sisa Urusan Jadwal Retensi Arsip yang ada di perangkat daerah baru akan dilakukan di tahun 2023, untuk itu diperlukan komitmen setiap pencipta arsip di perangkat daerah untuk menyerahkan arsip statisnya kepada Lembaga Kearsipan Daerah.	
2.1.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Presentase arsip statis yang dapat diakses oleh publik	%					10	49,999,220		0		23,586,600		4,647,000	10	20,000,000	10	48,233,600	100	96.47						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah khasanah arsip yang telah ditetapkan sebagai arsip statis adalah Keputusan Walikota Balikpapan Tahun 1970-2012	
2.1.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	%	100	300,000,000			0	100	45,999,700			9,891,700	30	18,566,000		10,806,000	60	4,605,000	60	43,868,700	60	95.37	60	43,868,700	60	14.62	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2.1.3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Presentase jumlah arsip yang dapat diakses melalui JIKN	%					25	15,999,700		0		9,037,800		2,136,000	20	3,630,000	20	14,803,800	80	92.53						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah khasanah arsip yang dapat diakses oleh publik melalui SIKN JIKN Kota Balikpapan (balikpapankota.sikn.go.id) sebanyak 2 series arsip (dengan asumsi 100% adalah 10 series)	
2.1.3.2	Pembudayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui simpul JIKN	%					10	30,000,000			9,891,700	8	9,528,200		8,670,000	2	975,000	10	29,064,900	100	96.88						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah unit kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui SIKN sebanyak 8 Unit Kearsipan
2.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan	%	100	967,539,085			0	55	159,995,230			37,820,800		43,636,318		27,070,020	7	45,521,122	7	154,048,260	12.73	96.28	7	154,048,260	7	15.92	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pelaksanaan program perlindungan dan penyelamatan arsip hanya terealisasi 7% dari target yang ditetapkan sebesar 10% hal ini karena belum tercapainya realisasi pada kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dan kegiatan pencarian arsip statis, perlunya langkah-langkah strategis yang diambil untuk dapat mewujudkan target kinerja di tahun berikutnya.
2.2.1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	%	17	185,539,085			0	6	39,995,480		0	13,196,050		11,010,020	6	14,400,000	6	38,606,070	100	96.53	6	38,606,070	35.29	20.81	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.2.1.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Kegiatan					1	19,995,480		0		9,275,800		9,697,520	1	0	1	18,973,320	100	94.89					</			

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
							8	9	10	11	12	13	14	15							16	27					
1	2	3	4	5		6		7		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	27
3.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP	dokumen			1	10,000,000		1,918,400	1	2,997,500		4,700,500	0	1	9,616,400	100	96.16							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Pelaporan SAKIP sudah dilaksanakan di bulan April 2022, bulan2 selanjutnya diperlukan untuk monitoring tindak lanjut rekomendasi Inspektorat	
3.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	dokumen			4	10,000,000	1	1,918,400	1	0	1	4,116,050	1	3,780,000	1	9,814,450	0	98.14							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Evaluasi kinerja TW1-TW4
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	87	24,539,078,375	0	83	4,574,041,300		969,319,281		1,200,705,854		1,175,173,655	81.23	988,774,657	81	4,333,973,447	97.59	94.75	81	4,333,973,447	93.1	17.66	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Hasil Survey Internal Dispuptakar Tahun 2022	
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen				25	4,574,041,300		969,319,281		1,200,705,854		1,175,173,655	25	988,774,657	25	4,333,973,447	100	94.75						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan rutin penggajian pegawai, akan dicatatkan capaian kinerja di akhir TW4
3.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	81	0	0	77	0	0	0	0	0	78.79	0	78	0	101.3	0	78	0	96.3	0				Dinas Perpustakaan dan Arsip	
3.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	84	767,600,000	0	80	0	0	0	0	0	81.23	0	81	0	101.25	0	81	0	96.43	0				Dinas Perpustakaan dan Arsip	
3.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	80	3,728,270,615	0	76	968,006,552		228,025,145		192,388,111		102,721,353	80.44	414,177,011	80	937,311,620	105.26	96.83	80	937,311,620	100	25.14	Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Berdasarkan hasil survei IKM Internal	
3.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis				17	49,998,807		0		33,067,980		0	17.00	16,281,650	17.00	49,349,630	100	98.7						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan yang dibelanjakan rutin
3.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis				4	413,016,895	8	159,853,000	4	48,042,000		0	44	199,905,450	44	407,800,450	0	98.74						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah Item Barang berkembang menjadi 44 unit, taetapi di SIPD dan Dokumen Renja tidak dilakukan perubahan target
3.1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Jenis				73	212,091,300		39,148,755		59,720,995		25,902,650	73.00	77,170,840	73.00	201,943,240	100	95.22						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah jenis Logistik kantor berkembang menjadi 81 jenis komponen yang dibelanjakan rutin
3.1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis				11	58,317,750		0		10,096,790		21,406,330	11	26,399,980	11	57,903,100	100	99.29						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah jenis barang Cetakan dan Penggandaan berkembang menjadi 13 jenis komponen yang dibelanjakan rutin
3.1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar				3168	17,995,800		2,324,400		3,516,400		3,814,400	3	5,185,200	3	14,840,400	0	82.47						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Bahan Bacaan berkembang menjadi 3 Jenis
3.1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	porsi				250	49,586,000	40	840,000	96	4,311,000	111	14,931,800	40	18,392,000	40	38,474,800	0	77.59						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Realisasi jumlah makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kunjungan tamu dan masih tercover dengan anggaran
3.1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	rapat				25	167,000,000	6	25,858,990	8	33,632,946	9	36,666,173	35	70,841,891	35	167,000,000	0	100						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Pada APBD P terdapat penambahan anggaran
3.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	81	1,771,000,000	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
3.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	83	14,394,906,000	0	79	2,301,578,800		362,837,266		568,909,372		495,142,108	79.34	499,022,064	79	1,925,910,810	100	83.68	79	1,925,910,810	95.18	13.38	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jenis				5	612,588,000		109,525,760		120,730,738		131,435,249	5	143,411,000	5	505,102,747	100	82.45						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Belanja Rutin tagihan air, listrik, internet dan TV kabel
3.1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS	Orang				25	1,688,990,800		253,311,506		448,178,634		363,706,859	18	355,611,064	18	1,420,808,063	0	84.12						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Dana tersedia hanya dapat mengakomodir Tenaga Non PNS sebanyak 18 Orang
		Jumlah Tenaga Profesional	Orang				1				1					1		100							Dinas Perpustakaan dan Arsip;		
		Luasan Gedung Kantor yang dilayani	Orang				22							19		19		0								Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Dana Tersedia hanya dapat mengakomodir 8 orang Tenaga Kebersihan dan 11 Tenaga Kesmanan
3.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	80	5,415,165,941	0	76	880,000,000		160,186,847		77,705,370		255,414,139	77.69	309,035,172	77	802,341,527	101.32	91.18	77	802,341,527	96.25	14.82	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Unit				10	150,000,000	10	16,220,317		33,175,720		30,824,342		64,186,288	10	144,406,667	100	96.27						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Unit				3	100,000,000	3	12,405,750		14,106,650		21,080,206		26,206,659	3	73,799,265	100	73.8						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.8.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel	Jenis				2	30,000,000		0		0		0	2	29,842,350	2	29,842,350	100	99.47						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Biaya Pemeliharaan sekaligus biaya perawatan Mebel
3.1.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis				16	400,000,000	5	84,360,000	2	30,423,000		103,990,600	9	138,791,875	9	357,565,475	0	89.39						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara berkembang menjadi 16 jenis (15 mesin, 1 instalasi)
3.1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan	Unit				1	200,000,000		47,200,780		0		99,518,990	1	50,008,000	1	196,727,770	100	98.36						Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan Pemeliharaan meliputi pengecatan, perbaikan atap dan paving kantor serta mengakomodir keusakan lain di area gedung kantor
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			170.48	115.96				95.61	11.37		
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			40.87	82.39							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Rendah	Tinggi							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			382.61	130.42				226.45	18.69		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			87.95	135.08				60.39	15.41		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Tinggi	Sangat Tinggi				Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan

SUTADI
196603151987011001

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022 - Triwulan 4																											
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	90				89.2						89.74		89		100		89		98.89			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	a. Melaksanakan persetujuan substansi revisi RTRW ; b. Melaksanakan layanan PKKPR ; c. Melaksanakan layanan Informasi Tata Ruang, Site Plan ; d. Membangun Sistem Informasi "One Map One Data" e. Melaksanakan Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Balikpapan ; f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata ruang ;	
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	0.99	12,900,000,000		0	0.14	1,164,562,800		24,080,295		11,858,000		65,939,564		559,205,197	0	661,083,056	0	56.77	0	661,083,056	0	5.12	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai
1.1.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan	%	100	5,245,000,000	0	50	315,844,500		19,935,395		11,858,000		40,167,695	33.33	111,593,053	33	183,554,143	66	58.12	33	183,554,143	33	3.5	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai karena masih terdapat revisi KLHS dan perbaikan Materi teknis dan lain-lain sebelum mendapatkan persetujuan substansi RTRW	
1.1.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	dokumen				1	315,844,500		19,935,395		11,858,000		40,167,695		111,593,053		183,554,143	0	58.12					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Belum tercapai, tetapi sudah mendapatkan rekomendasi peta dasar dari BIG dan BA hasil Rapat KLHS dengan provinsi	
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	%	100	4,100,000,000	0	20	574,673,300		4,144,900		0	2	25,771,869	20	447,612,144	20	477,528,913	100	83.1	20	477,528,913	20	11.65	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai	
1.1.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	dokumen				6	0		0		0		0		0		0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	dilakukan rasionalisasi anggaran karena belum terlaksananya tahapan mendapatkan persetujuan substansi RTRW	
1.1.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen				6	450,923,300		4,144,900		0		21,196,869	2	433,132,144	2	458,473,913	0	101.67					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai, karena penyusunan dokumen standarisasi hanya pada 2 kecamatan (kota dan selatan)	
1.1.2.3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah dokumen peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	dokumen				6	123,750,000		0		0	2	4,575,000	16	14,480,000	16	19,055,000	0	15.4					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai dengan rincian pelaksanaan rapat : 2 rapat FPR dan 16 rapat Pokja FPR (Rapat PKKPR)	
1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	%	94	1,505,000,000	0	90	0	72.2	0	81.72	0	85.7	0	87.2	0	87	0	96.67	0	87	0	92.55	0		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai karena masih terdapat permohonan dalam proses terkendala (berkas administrasi belum lengkap)
1.1.3.1	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang	dokumen					0		0		0		0		0		0	100	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;		
1.1.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen					0		0		0		0		0		0	100	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;		
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	%	95	2,050,000,000	0	91	274,045,000	40	0	20	0		0		0	20	0	21.98	0	20	0	21.05	0		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai atas target kinerja untuk tindak lanjut penertiban pemanfaatan ruang
1.1.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	dokumen					350	274,045,000	71	0	59	0	109	0	108	0	108	0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
1.1.4.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	dokumen					0		0		0		0		0		0	100	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;		
2	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	33				14						20		20		142.86		20		60.61			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	a. Menyusun dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan(RTBL) kawasan DAS Ampal, RTBL Koridor Jl. A. Yani dan Kajanevaluasi penetapan kawasan resapan air ; b. Melaksanakan pembangunan revitalisasi Jl. Jend. Sudirman (ClockTower dan Fountain Water) c. Menyusun DED Sayembara Landmark Kota dan DEDSayembara Gerbang Kota ; d. Supervisi pembangunan revitalisasi Jl. Jend. Sudirman (Clock Tower dan Fountain Water) e. Menyusun draft Peraturan Wali Kota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan DAS Ampal, RTBLKoridor Jl. A. Yani dan RTBL Kajian evaluasi penetapan kawasanresapan air ;	
2.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	33	79,280,000,000	0	14	4,121,312,700		27,549,638		36,776,230		4,532,160,908	20	3,060,904,460	20	7,657,391,236	142.86	185.8	20	7,657,391,236	60.61	9.66	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai	
2.1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTBL yang ditetapkan	%	42	79,280,000,000	0	25	4,121,312,700		27,549,638		36,776,230		4,532,160,908	28.57	3,060,904,460	28	7,657,391,236	112	185.8	28	7,657,391,236	66.67	9.66	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai, sudah adanya ranperda/ranperwali untuk RTBL Koridor A. Yani dan Kawasan DAS Ampal	
2.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	dokumen				5	2,071,509,900		22,724,338		33,158,830		55,018,982	5	1,866,671,011	5	1,977,573,161	100	95.47					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, penyusunan 3 RTBL dan 2 DED	
2.1.1.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan				1	2,000,000,000		0		3,617,400		4,467,631,926	1	1,193,253,449	1	5,664,502,775	100	283.23					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, pembangunan pada koridor revitalisasi jl. Jend. Sudirman	
2.1.1.3	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	dokumen				1	49,802,800		4,825,300		0		9,510,000	1	980,000	1	15,315,300	100	30.75					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, pelaksanaan monitoring di kawasan das ampal	
2.1.1.4	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan					0		0		0		0		0		0	100	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;		
2.1.1.5	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan					0		0		0		0		0		0	100	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;		
2.1.1.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen					0		0		0		0		0		0	100	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;		
3	Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan	Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitas Sengketa Tanah)	%	82.5				80						88.86		88		110		88		106.67			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	a. Melaksanakan layanan rekomendasi IMTN ; b. Melaksanakan layanan fasilitasi mediasi sengketa tanah ; c. Mengajukan rancangan instruksi Wali Kota Balikpapan Nomor : 590/I.63 / PEM Tentang Pelayanan Administrasi Pertanahan. d. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layananadministrasi pertanahan yakni layanan rekomendasi IMTN danfasilitasi mediasi sengketa tanah	
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan	%	78	550,000,000	0	70	0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
3.1.1	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saran teknis yang diberikan pada permohonan ijin lokasi	%	90	550,000,000	0	80	0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
3.2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitas Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	%	37.5	150,000,000	0	41.7	30,000,000	67	4,651,500	45	3,343,000	50	1,600,000	56	330,000	56										

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
										I		II												III		IV
				5		6		7		8		9		10		11		12		13				14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4																					16	27	
1	Meningkatkan cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	0.04				0						0		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Permukiman	Indikator kinerja sasaran tidak mengalami peningkatan dari data capaian awal, karena sampai dengan tahun 2020 belum pernah dilakukan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang berasal dari rehabilitasi maupun pembangunan rumah bagi korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah	
1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	%	2.84	57,523,650,210	0	0	10,104,275,592	0	229,019,280	0.00	426,706,882	0.00	1,131,752,733	6,052,275,585	0	7,839,754,480	0	77.59	0	7,839,754,480	0	13.63	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target kinerja di tahun 2022 adalah nol karena belum ada rencana relokasi	
1.1.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	2,857,000,000	0	11.82	1,000,000,000	0		23,701,800	6,579,750	11.82	882,617,501	11	912,899,051	100	91.29	11	912,899,051	11	31.95	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022		
1.1.1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan Pendataan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	lokasi					2	300,000,000	0		23,701,800	5,175,750	6	236,542,700	6	265,420,250	0	88.47					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pada saat penyusunan renstra target adalah 6 kecamatan, pada tahun 2022 dengan anggaran yang tersedia dapat dilaksanakan pendataan pada 6 kecamatan. Untuk tahun selanjutnya, anggaran digunakan untuk updating data sesuai amanat juknis SPM Perumahan Rakyat	
1.1.1.2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	dokumen					1	100,000,000	0		0	702,000	1	94,912,770	1	95,614,770	100	95.61					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100 %	
1.1.1.3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	dokumen					1	100,000,000	0		0	0	1	94,053,800	1	94,053,800	100	94.05					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100 %	
1.1.1.4	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen					1	100,000,000	0		0	702,000	1	94,731,800	1	95,433,800	100	95.43					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100 %	
1.1.1.5	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	dokumen					2	400,000,000	0		0	0	1	362,376,431	1	362,376,431	0	90.59					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100 %	
1.1.2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	%	2.84	1,940,000,000	0	0	250,000,000	0		0	0	0	0	13,184,034	0	13,184,034	0	5.27	0	13,184,034	0	0.68	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022	
1.1.2.1	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang					50	100,000,000			0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;		
1.1.2.2	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dilatih	Orang					50	100,000,000	0		0	0	0	13,184,034		13,184,034	0	13.18					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pendataan rumah korban bencana maupun relokasi baru selesai di Bulan Desember sehingga SK Bencana Kepala Daerah belum terbit dan pembentukan tim satgas belum dapat dilaksanakan	
1.1.2.3	Rembu Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah frekuensi Rembug warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Kali					5	50,000,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Berdasarkan hasil koordinasi dengan kementerian, sub kegiatan menyipakan anggaran sebagai dana tentatif (akan dilaksanakan jika terjadi bencana)	
1.1.2.4	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang					0		0		0	0	0	0	0	100	0						Dinas Perumahan dan Permukiman;		
1.1.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	2.84	10,750,000,000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman		
1.1.3.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;		
1.1.3.2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen					0	0	0		0	0	0	0	0	100	0						Dinas Perumahan dan Permukiman;		
1.1.3.3	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;		
1.1.4	Pembiinan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	%	81.38	31,560,000,000	0	66.02	7,633,195,392	56.49	227,522,280	58.11	377,071,782	57.57	1,123,286,433	59.05	4,168,885,807	59	5,896,766,302	89.39	77.25	59	5,896,766,302	72.5	18.68	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target kinerja tidak tercapai, karena terkait aturan bahwa penghuni harus yang memiliki KTP Balikpapan
1.1.4.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan					1	5,833,195,392		33,718,320		25,100,055	1	709,945,972	3	3,761,364,959	3	4,530,129,306	0	77.66			Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100 %	
1.1.4.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Susun	dokumen					507	1,800,000,000	418	193,803,960	430	351,971,727	426	413,340,461	437	407,520,848	437	1,366,636,996	0	75.92			Dinas Perumahan dan Permukiman;	Target kinerja tidak tercapai, karena terkait aturan bahwa penghuni harus yang memiliki KTP Balikpapan	
1.1.5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	%	25	10,216,650,210	0	7.46	1,221,080,200	1,497,000		25,933,300		1,886,550	7.46	987,588,243	7	1,016,905,093	100	83.28	7	1,016,905,093	28	9.95	Dinas Perumahan dan Permukiman		
1.1.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan					86	1,221,080,200	5	1,497,000	20	25,933,300	30	1,886,550	31	987,588,243	31	1,016,905,093	0	83.28			Dinas Perumahan dan Permukiman;		
1.1.5.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDUB) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDUB) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan					0	0	0		0	0	0	0	0	100	0						Dinas Perumahan dan Permukiman;		
1.1.6	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	Rekomendasi	40	200,000,000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman		
1.1.6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Laporan					0	0	0		0	0	0	0	0	100	0						Dinas Perumahan dan Permukiman;		
2	Meningkatnya Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	%	16.95				16.75						21.97		21		131.25		21		123.89		Dinas Perumahan dan Permukiman	Indikator kinerja sasaran mengalami peningkatan dari data capaian awal di tahun 2020, karena peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang juga berpengaruh pada sektor perumahan yang semakin bertumbuh.	
2.1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	%	2.78	8,361,500,000	0	1.39	935,800,000	0	22,247,600	0	3,332,600	0	216,280,954	1.39	510,611,671	1	752,472,825	100	80.41	1	752,472,825	35.97	9	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
2.1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	Hektar	7	8,361,500,000	0	3	935,800,000	0	22,247,600	0	3,332,600	0	216,280,954	3.00	510,611,671	3.00	752,472,825	100	80.41</						

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
					6		7		8		9		10		11				12		13				14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Pemulihan nilai-nilai luhur (restorasi sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	%	87				79								9		9		11.39		9		10.34		Dinas Sosial	a. Terbnyta Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang mengatur tentang pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, menyebabkan Dinas Sosial Kota Balikpapan secara berkala melakukan pemeliharaan dan perawatan Taman Makam Pahlawan yang dibantu oleh Perangkat Daerah terkait serta tiga orang Non ASN sebagai tenaga pengamanan. b. Dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan khususnya Dinas Sosial serta seluruh stakeholder terkait dalam membantu pengelolaan Taman Makam Pahlawan di Kota Balikpapan	
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	87	2,559,189,239		0	79	239,999,900		860,000		15,051,560		28,614,860		158,401,000	0	202,927,420	0	84.55	0	202,927,420	0	7.93	Dinas Sosial	kegiatan tidak dilaksanakan karena seluruh anggaran dialihkan ke Peringatan Hari Pahlawan	
1.1.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	%	60	2,559,189,259		0	52	239,999,900	10	860,000	10,00	15,051,560	20,00	28,614,860	12,00	158,401,000	12	202,927,420	23.08	84.55	12	202,927,420	20	7.93	Dinas Sosial	Kegiatan sebagian besar dananya digunakan untuk peringatan Hari Pahlawan, sehingga hanya dilakukan pemeliharaan rutin di TMP	
1.1.1.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya rehabilitasi Sarana dan Prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten / Kota	Kegiatan					5	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Sosial ;	Diusulkan dalam perubahan RKPd karena anggaran dialihkan untuk pelaksanaan peringatan hari pahlawan	
1.1.1.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ Kota	Kegiatan					3	239,999,900		860,000	2	15,051,560	1	28,614,860		158,401,000	1	202,927,420	0	84.55					Dinas Sosial ;	kegiatan terlaksana	
		Terlaksananya pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota	Paket					1								1		1		100						Dinas Sosial ;	kegiatan dilaksanakan	
		Terlaksananya Sosialisasi Restorasi Sosial	Kegiatan					3								1		1		0						Dinas Sosial ;	*1. kegiatan hari Pahlawan 2. Rangkaian kegiatan hari pahlawan direncanakan akan dilaksanakan kegiatan cerdas cermat tingkat SMP untuk memperkenalkan nilai2 kepahlawanan, serta pemberian bantuan bagi PVRI dan LVRI. Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pagu anggaran tidak mencukupi"	
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	31				27								30.29		30		111.11		30		96.77		Dinas Sosial	a. Dukungan dan komitmen dari Ptt. Kepala Dinas Sosial kota Balikpapan serta seluruh pegawai Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. b. Dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan khususnya Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam memberikan saran dan masukan untuk perbaikan organisasi Dinas Sosial	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	74	51,595,456,084		0	70	8,260,137,650		1,424,169,988		1,738,891,534		1,785,031,661	92,65	1,664,160,842	92	6,612,254,025	131.43	80.05	92	6,612,254,025	124.32	12.82	Dinas Sosial	Terdapat perbedaan indikator dan adanya pergantian Renstra sehingga kolom 6 tidak dapat diisi	
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	0		0	65	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial	Sesuai hasil perhitungan IKM internal Dinsos	
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	50	30,000,000,000		0	50	6,007,044,000		1,223,238,504		1,297,516,027		1,178,795,684	92	987,527,223	92	4,687,077,438	184	78.03	92	4,687,077,438	184	15.62	Dinas Sosial	Sesuai hasil perhitungan IKM internal Dinsos	
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen					50	6,007,044,000		1,223,238,504		1,297,516,027		1,178,795,684	14	987,527,223	14	4,687,077,438	0	78.03					Dinas Sosial ;	Target Indikator tercapai sesuai target	
2.1.3	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Nilai	80	2,314,500,000		0	70	0		0		0		0	92,19	0	92	0	131.43	0	92	0	115	0	Dinas Sosial	Ada kesalahan dalam penulisan indikator. Yang seharusnya "nilai" ditulis "persen"	
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	80	5,916,763,424		0	70	837,989,850		47,193,000		107,351,092		270,607,742	92,71	309,214,659	92	734,366,493	131.43	87.63	92	734,366,493	115	12.41	Dinas Sosial	Sesuai hasil perhitungan IKM internal Dinsos	
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket					10	9,990,000	3	0		0		0		0	3	0	0	0	0				Dinas Sosial ;	Kegiatan telah dilaksanakan	
2.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor	Paket					5	350,000,000	1	14,945,000	1	14,535,000		97,104,700		141,781,400	1	268,366,100	0	76.68					Dinas Sosial ;	Kegiatan telah dilaksanakan	
2.1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakai Dinas beserta Atributnya kelengkapannya	jumlah pegawai					40	27,999,850		0		0	3,00	14,269,700	3	13,620,150	3	27,889,850	0	99.61					Dinas Sosial ;	Kegiatan telah dilaksanakan	
2.1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Paket					2	450,000,000		32,248,000		92,816,092		159,233,342	2	153,813,109	2	438,110,543	100	97.36					Dinas Sosial ;	Kegiatan telah dilaksanakan	
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	85	4,828,654,178		0	15	0		0		0		0	92	0	92	0	613.33	0	92	0	108.24	0	Dinas Sosial	Sesuai hasil perhitungan IKM internal Dinsos	
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	5,664,000,000		0	70	1,098,103,800		150,946,184		284,024,415		246,543,863	95	251,695,086	95	933,209,548	135.71	84.98	95	933,209,548	111.76	16.48	Dinas Sosial	Sesuai hasil perhitungan IKM internal Dinsos	
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Paket					5	175,000,000		32,641,434		31,035,585	2	33,668,863	2	24,560,116	2	121,905,998	0	69.66					Dinas Sosial ;	sesuai jumlah jenis jasa, sumber daya air dan listrik	
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	Jenis					15	923,103,800		118,304,750		252,988,830		212,875,000	2	227,134,970	2	811,303,550	0	87.89					Dinas Sosial ;	sesuai jumlah gedung kantor	
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	2,871,538,482		0	70	317,000,000		2,792,300		50,000,000		89,084,372	92	115,723,874	92	257,600,546	131.43	81.26	92	257,600,546	108.24	8.97	Dinas Sosial	Sesuai hasil perhitungan IKM internal Dinsos	
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	Unit					30	310,000,000	5	2,792,300	5	50,000,000	5	89,084,372	5	110,738,874	5	252,615,546	16.67	81.49					Dinas Sosial ;	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	
2.1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	Paket					1	7,000,000		0	2	0		0		4,985,000	2	4,985,000	0	71.21					Dinas Sosial ;	Diusulkan dalam RKPd perubahan thn 2022 karena sub kegiatan tidak sesuai dengan rincian belanja	
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitasan, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	%	67				60								81.03		81		135		81		120.9		Dinas Sosial	a. Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan tidak dapat diprediksi dengan tepat pada awal tahun sehingga target yang ditetapkan terlalu rendah atau pun terlalu tinggi. b. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah PMKS di Kota Balikpapan. Pada tahun 2022, Jumlah PMKS tercatat sebanyak 158.115 jiwa sedangkan di tahun 2022 jumlah PMKS adalah sebanyak 167.562 jiwa. Hal ini mengakibatkan persentase pelayanan Tabel 3.6 Sangat Tinggi (Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah (90,01%100%) (75,01%799%) (65,01%775%) (50,01%765%) (750%) 1 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitasan, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Tuna Sosial Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial 135 V 2 Pemulihan Nilai - Nilai Luhur (Restorasi Sosial) Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola 100 V 3 Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 112 V Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian (%) Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2022 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja No Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 (LKIP) 45 PMKS melebihi target yang ditetapkan atau diprediksi. c. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota Balikpapan khususnya seluruh jajaran pegawai Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi PMKS sesuai dengan kebutuhannya. d. Dukungan dari seluruh mitra Dinas Sosial di lapangan serta seluruh stakeholder lainnya dalam bersinergi memberikan pelayanan yang maksimal kepada PMKS . e. Dukungan dari masyarakat dalam memberikan informasi adanya PMKS terlantar di wilayahnya sehingga dapat segera ditindaklanjuti penanganannya oleh Dinas Sosial.	
3.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan	%	96.66	7,492,447,815		0	80	1,033,199,700		100,364,750																	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
							I		II		III		IV												
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27									
3.2.1.4	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlarut, anak terlarut, lanjut usia terlarut dan gelandangan pengemis yang dirujuk	Orang			30	39,637,675	4	16,485,250	4	26,315,750	1	20,678,800	5	61,120,041	5	124,599,841	0	314.35					Dinas Sosial ;	Seluruh Kegiatan untuk program Rehabsos bersifat by order sehingga tidak dapat diprediksi dengan tepat target jumlah PMKS yang mendapat pelayanan
3.2.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	94.05	3,253,789,818	0	90.25	625,000,000	58,549,675	133,545,806	229,071,353	70.22	319,731,366	70	740,898,200	77.78	118.54	70	740,898,200	74.43	22.77	Dinas Sosial	Sesuai jumlah klien PMKS lainnya yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar		
3.2.2.1	Penyediaan Pemakanan	Jumlah penyandang PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPSA yang menerima paket pemakanan sesuai standar gizi	Orang			270	200,000,000	128	24,365,000	114	88,760,000	109	68,370,000	104	92,660,000	104	274,155,000	0	137.08					Dinas Sosial ;	Sesuai dengan jumlah PMKS terlarut yang diberikan bantuan pemakanan di rumah penampungan Dinas Sosial yaitu
3.2.2.2	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang PMKS lainnya bukan korban HIV / AIDS NAPZA yang menerima paket sandang	Orang			270	10,000,000	167	0	139,00	5,790,000	133,00	4,180,000	95,00	0	95,00	9,970,000	0	99.7					Dinas Sosial ;	Sesuai dengan jumlah PMKS terlarut yang diberikan bantuan sandang di rumah penampungan Dinas Sosial yaitu
3.2.2.3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			60	300,000,000	55	10,937,000	26,00	22,707,556	5,00	150,521,353	10,00	191,968,919	10,00	376,134,828	0	125.38					Dinas Sosial ;	"1. Jumlah pelayanan ditentukan oleh jumlah klien yang ada di Rumah Penampungan 2. hal ini mengindikasikan jumlah PMKS terlarut yang membutuhkan pelayanan kesehatan cukup tinggi sehingga dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar"
3.2.2.4	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlarut, anak terlarut, lanjut usia terlarut dan gelandangan pengemis yang dirujuk	Orang			30	75,000,000	30	14,247,675	35	1,288,250	45	0	15	22,102,447	15	37,638,372	0	50.18					Dinas Sosial ;	Jumlah ODGJ yang dirujuk ke RSJ Samarinda
3.2.2.5	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang terlarut yang meninggal dan mendapatkan pelayanan pemakaman melalui lembaga kemitraan	Orang			12	40,000,000	5	9,000,000	3	15,000,000	2	6,000,000	3	13,000,000	3	43,000,000	0	107.5					Dinas Sosial ;	Jumlah PMKS terlarut yang meninggal
3.3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlarut dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	92.68	8,883,218,220	0	82.92	1,449,000,000	162,850,000	320,187,700	400,195,750	81.46	489,090,050	81	1,372,323,500	98.78	94.71	81	1,372,323,500	87.4	15.45	Dinas Sosial	Realisasi kinerja diperkirakan tidak akan tercapai pada akhir TW IV karena kegiatan pemeliharaan anak - anak terlarut tidak dilaksanakan di tahun 2022		
3.3.1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlarut	Persentase Anak Terlarut yang Dijangkau, Dirujuk, dan Dipantau Pemeliharaannya	%	17.24	240,000,000	0	20.68	0	89	0	0	0	0	89	0	445	0	89	0	516.24	0		Dinas Sosial	1. Sub kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA tahun 2022 namun kegiatan tetap dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial	
3.3.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	%	88.65	8,643,218,220	0	97.59	1,449,000,000	162,850,000	320,187,700	400,195,750	2	489,090,050	2	1,372,323,500	2.06	94.71	2	1,372,323,500	2.26	15.88	Dinas Sosial	sesuai jumlah pengusulan di DTKS		
3.3.2.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Potensi Keajahteraan Sosial yang diperbaharui	Jiwa			30000	1,130,000,000	6000	161,250,000	8000	288,730,200	4363	270,680,500	11180	381,662,800	11180	1,102,323,500	0	97.55					Dinas Sosial ;	Sesuai jumlah DTKS yang telah diverifikasi
3.3.2.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah SDM Pendamping PKH yang melakukan pendampingan kepada KPM	Orang			23	319,000,000	5	1,600,000	5	31,457,500	5,00	129,515,250	5,00	107,427,250	5,00	270,000,000	0	84.64					Dinas Sosial ;	"Jumlah SDM pendamping PKH merupakan recruitment dari Kemensos. Alokasi anggaran by transport yang disiapkan APBD adalah untuk 23 pendamping PKH, namun pengusulan dari Kemensos hanya untuk 20 pendamping PKH 2. Hal ini mengindikasikan bahwa Balikpapan masih membutuhkan tenaga pendamping PKH untuk mengawal Jalannya penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan kepada KPM di Kota Balikpapan"
		Jumlah SDM Pendamping Program Sembako yang melakukan pendampingan kepada KPM	Orang			7											0						Dinas Sosial ;	SK SDM pendamping sembako dari Kementerian Sosial tidak ada	
3.4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	%	85	5,053,000,161	0	81	1,455,645,200	7,924,300	270,552,000	228,383,200	100.00	611,584,800	100	1,118,444,300	123.46	76.83	100	1,118,444,300	117.65	22.13	Dinas Sosial	Kegiatan penanganan korban bencana di kota Balikpapan tidak dapat diprediksi beseran target dan capaiannya karena berdasarkan jumlah kejadian bencana yang terjadi		
3.4.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	%	85	3,625,000,057	0	81	1,056,600,000	20	139,087,000	212,104,000	21.00	503,217,700	21	854,408,700	25.93	80.86	21	854,408,700	24.71	23.57	Dinas Sosial	Kegiatan penanganan korban bencana di kota Balikpapan tidak dapat diprediksi beseran target dan capaiannya karena berdasarkan jumlah kejadian bencana yang terjadi		
3.4.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat bantuan makanan siap saji	Jiwa			12000	500,000,000	5513	0	49,00	110,087,000	5663	148,504,000	3568,00	155,682,000	3568,00	414,273,000	0	82.85					Dinas Sosial ;	sesuai data korban bencana tahun yang mendapat bantuan makanan siap saji
		Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat bantuan Natura	Rumah Tangga Sasaran			230										0								Dinas Sosial ;	tidak dilaksanakan karena sudah diberikan bantuan makanan siap saji
3.4.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jiwa			407	306,600,000	45	0	39	29,000,000	190	0	209	164,135,700	209	193,135,700	0	62.99					Dinas Sosial ;	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan paket sandang
3.4.1.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Unit			57	200,000,000	11	0	20	0	0	14,850,000	5	183,400,000	5	198,250,000	8.77	99.13					Dinas Sosial ;	"1. Sesuai stock yang ada di gudang TAGANA 2. pengadaan tenda disesuaikan dengan alokasi anggaran"
3.4.1.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban bencana khusus bagi kelompok rentan yang mendapat bantuan perlengkapan dan kebersihan pribadi	Orang			50	50,000,000		0	0	0	0	48,750,000		0	48,750,000	0	97.5					Dinas Sosial ;	"1. Pembelian alat bantu jalan bagi korban bencana kelompok rentan sebanyak 125 unit dan belum disalurkan 2. Bantuan belum tersalurkan karena korban kelompok rentan tidak ada"	
3.4.1.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Tersedianya tenaga dukungan layanan psikososial dalam rangka penanganan korban bencana alam dan sosial di kabupaten /kota	Orang			7	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					Dinas Sosial ;	Kegiatan dirasionalisasi seluruhnya (Sesuai DPA -P 2022) namun masih muncul di Renja Perubahan Tahun 20202
3.4.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana	%	67	1,428,000,104	0	61	399,045,200	10	7,924,300	131,465,000	20	16,279,200	11	108,367,100	11	264,035,600	18.03	66.17	11	264,035,600	16.42	18.49	Dinas Sosial	Untuk pemberdayaan bagi KSB, tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penyediaan makanan bagi korban bencana
3.4.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Pengurus Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan Sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan bencana alam dan bencana sosial	Orang			100	50,000,000	60	0	0	0	0	12,000,000	60	12,000,000	0	24							Dinas Sosial ;	Target realisasi kinerja kegiatan akan tercapai pada akhir TW IV
3.4.2.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah anggota Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan pemantapan peningkatan kemampuan pendirian shelter, dapur umum dan manajemen logistik serta pengerahan dalam kegiatan penanggulangan bencana alam dan sosial	Orang			104	349,045,200		7,924,300	131,465,000	81	16,279,200		96,367,100	81	252,035,600	0	72.21						Dinas Sosial ;	"1.sesuai existing jumlah anggota TAGANA yang aktif 2. tidak sesuai karena ada anggota TAGANA yang meninggal dan mengundurkan diri"
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		62.6	76.29			48.99	7.62		
Predikat Kinerja																		Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		8.41	69.39						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sedang						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		103.78	72.19			76.91	10.24		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Tinggi	Sedang			Tinggi	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		75.63	87.29			70.06	12.62		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sedang	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1 Dukungan Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Sosial dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan 2 Dukungan dari seluruh lembaga pemerintah dan swasta dalam membantu penanganan PMKS di Kota Balikpapan 3 Dukungan dari masyarakat dan keluarga PMKS dalam pelayanan PMKS di lapangan																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1 Keterbatasan anggaran sehingga pelayanan tidak dapat menjangkau seluruh PMKS yang ada di Kota Balikpapan 2 Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada sehingga pelayanan bagi PMKS masih kurang maksimal																					
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																									

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Sosial
Kota Balikpapan

EDY GUNAWAN
196704261998031004

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				5		6		7		8		9		10		11				12		13				14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K			Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67.4				63.8										0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja			
1.1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	3.6	953,649,208	0	3.2	399,952,800		0		0		0	2.92		0	2	66.67	0	2	55.56	0		Dinas Tenaga Kerja	Tingkat capaian terhadap target mencapai 91%			
1.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	dokumen	6	953,649,208	0	2	399,952,800		0	1	0		0	1		0	1	0	0	0		0	0	0	Dinas Tenaga Kerja			
1.1.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Dokumen RTKD Periode 2022 - 2026	dokumen				1	299,993,800	0.2	0	0.24	0	0.5	0	0.06	0	0.06	0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.1.1.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan	Perusahaan				40	99,959,000		0	7	0	26	0	7	0	0	0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	117.6	2,899,912,199	0	23	404,969,700	8.67	0	3.72		0	5.4		0	7.21		0	23		0	100	0	23	19.56	0	Dinas Tenaga Kerja	
1.2.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	%	117.6	1,811,312,915	0	23	264,974,700	8.67	0	3.72		0	5.4		0	7.21		0	23		0	100	0	23	19.56	0	Dinas Tenaga Kerja	
1.2.1.1	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Tempatkan	Orang				700	149,974,800				0					0		0	0	0					Dinas Tenaga Kerja;			
		Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar	Orang				4300		1075		1075		1197		875		875		0							Dinas Tenaga Kerja;			
1.2.1.2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Yang Mendapat Sosialisasi Bimbingan Jabatan	SMK				6	64,999,900		0	1.5	0	2.7	0	0.35	0	0.35	0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.2.1.3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang di Layani	%				100	0		0		0		0		0	0	0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.2.1.4	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pembinaan Wirausaha	Orang				25	50,000,000		0	25	0		0		0	25	0	100	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.2.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem iker Disnaker	%	25	846,599,284	0	5	139,995,000		0	1	0		0	5.4		0	6	120	0	6	24	0			Dinas Tenaga Kerja			
1.2.2.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	Aplikasi				2	60,000,000		0		0	2.1	0	0.9	0	0.9	0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.2.2.2	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah JMF Yang Dilaksanakan	Kali				1	79,995,000		0		0	0.9	0		0	0.9	0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	347	3,114,275,938	0	69.4	514,995,620	10	0	25		0	28		0	24.5		0	87		0	126.09	0	87	25.07	0	Dinas Tenaga Kerja	
1.3.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	%	400	241,885,510	0	80	40,000,000		0	80	0	20	0	62		0	82		0	102.5	0	82		0	20.5	0	Dinas Tenaga Kerja	
1.3.1.1	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Persentase Dokumen Syarat Kerja Selain Peraturan Perusahaan Yang Tertib Administrasi	%				100	15,000,000	88	0	12	0		0		0	100	0	100	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.3.1.2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	dokumen				1	25,000,000		0	5	0		0		0	5	0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.3.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	%	80	2,872,390,428	0	80	474,995,620		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja		
1.3.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Kali				4	99,999,560		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.3.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi)	%				100	99,996,500		0		0		0		0	0	0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.3.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Sosialisasi Serikat Pekerja	Kali				3	99,999,560		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.3.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Sidang Dewan Pengupahan dan Jumlah Pertemuan Sidang LKS Tripartit	Kali Pertemuan				6	175,000,000		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur	%	58	6,439,365,545	0	54	1,049,868,700		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja		
1.4.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	%	100	5,736,537,377	0	100	949,973,000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja		
1.4.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	Orang				300	949,973,000		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.4.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	%	100	301,414,084	0	100	49,898,500		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja		
1.4.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan LPK	LPK				30	49,898,500		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
1.4.3	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil	Perusahaan	20	301,414,084	0	20	49,997,200		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja		
1.4.3.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Kepada Perusahaan Kecil	dokumen				1	49,997,200		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;			
2	Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	33.72			32.91										0		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja		
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	%	89.5	42,434,560,156	0	81.5	7,079,207,500		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja		
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	%	75	90,707,066	0	63	15,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja		
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kota Balikpapan

ANI MUFAIDAH
196510111986092003

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2022 - Triwulan 4																												
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	80.61				80.36										0		0		0		0		Kecamatan Balikpapan Barat		
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	6,269,281,500		0	100	813,371,600		0		39,101,800		0		27,891,000	0	66,992,800	0	8.24	0	66,992,800	0	1.07	Kecamatan Balikpapan Barat		
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	5,428,444,000	0	100	741,401,000		0		0		0	100		0	100	0	100	0		0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat		
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					9	741,401,000			0	28		0	31		0	3		0	3		0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	
		Pemfasilitasian perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					2		1								1			0						Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan yang Ada di Kecamatan yang Berkualitas	Persentase	100	251,150,000	0	100	6,983,200	0		6,577,200	0	100		0	100	0	100	6,577,200	100	94.19		6,577,200	0	2.62	Kecamatan Balikpapan Barat	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022	
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kegiatan					4	0	4	0		0		0		0	4		0	100	0					Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat	Jenis					3	6,983,200	1	0	1	6,577,200	1	0		0	1	6,577,200	0	94.19						Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	589,687,500	0	100	64,987,400	0		32,524,600	0	100		27,891,000	100	60,415,600	100	92.97		60,415,600	0	10.25				Kecamatan Balikpapan Barat	
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Izin non usaha yang diterbitkan	Izin					250	64,987,400	141	0	42	32,524,600	68	0	53	27,891,000	53	60,415,600	0	92.97						Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	20	24,172,764,978	0	16	619,893,778		101,415,934	251,303,431		226,078,097	23.37	367,031,065	23	945,828,527	143.75	945,828,527	115	152.58	23	945,828,527	115	3.91	Kecamatan Balikpapan Barat		
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	Persentase	100	9,688,515,200	0	100	165,089,600	0		16,940,000	0	20,250,000	100	32,175,000	100	69,365,000	100	42.02		69,365,000	0	0.72				Kecamatan Balikpapan Barat	
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kegiatan					14	70,000,000	2	0		16,940,000		20,250,000		32,175,000	2	69,365,000	0	99.09						Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kegiatan					14	95,089,600	5	0	1	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase	100	15,114,249,778	0	100	454,804,178	0	101,415,934	234,363,431	0	205,828,097	100	334,856,065	100	876,463,527	100	192.71		876,463,527	0	5.8				Kecamatan Balikpapan Barat	
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Facilitasi lembaga kemasyarakatan	lembaga					3	186,910,400	1	101,415,934		160,260,631		52,074,197		309,026,065	1	622,776,827	0	333.2						Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan					1	67,665,378	1	0		0		0	1	67,200,000	100	99.31								Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.2.2.3	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitas pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan					2	159,947,400	1	0	1	48,532,800		79,958,900		25,830,000	1	154,321,700	0	96.48						Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.2.2.4	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kegiatan					1	40,281,000	1	0	1	25,570,000		6,595,000		0	1	32,165,000	100	79.85						Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Tranitibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	1,632,550,000	0	100	269,986,200	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat	
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan tranitibum	Persentase	100	1,632,550,000	0	100	269,986,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat	
		Dokumen pembayaran honor petugas ketenteraman dan ketertiban umum	dokumen					12	269,986,200	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0						Kecamatan Balikpapan Barat;	
		Kegiatan sinergitas Tranitibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Orang					150		3		3		3		3		3		0							Kecamatan Balikpapan Barat;	
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	28.25				27										0		0		0		0		Kecamatan Balikpapan Barat		
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	72.5	85,714,056,916	0	70.5	14,783,916,728		221,148,182	2,758,530,300	6	3,109,998,403		2,328,042,751	6	8,417,719,636	0	56.94		8,417,719,636	0	9.82	Kecamatan Balikpapan Barat	Terdapat perbedaan indikator dan juga sudah ada pergantian Renstra sehingga kolom 6 tidak bisa diisi			
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70.5	176,400,000	0	68.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat		
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan	Poin	71.25	57,639,020,658	0	70	10,853,685,000	0	2,077,894,790	2,523,247,556	0	2,077,894,790	6	2,523,247,556	6	4,601,142,346	0	42.39	0	4,601,142,346	0	7.98	Kecamatan Balikpapan Barat				
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen					28	10,853,685,000	6	0	10	2,077,894,790	6	2,523,247,556	6	4,601,142,346	0	42.39								Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Poin	64	12,000,000	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat		
2.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Poin	64	456,033,000	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Disusun di :
Balikpapan,
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2022 - Triwulan 4																											
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	27
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	78.3				77.96								0		0		0		Kecamatan Balikpapan Kota					
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	%	100	5,402,728,395	0	100	2,021,861,900		173,025,000		259,560,700	190,454,800	100	29,953,800	100	652,994,300	100	32.3	100	652,994,300	100	12.09	Kecamatan Balikpapan Kota			
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	4,033,455,895	0	100	1,906,862,000		173,025,000		213,214,100	159,634,800	100	0	100	545,873,900	100	28.63		545,873,900	0	13.53	Kecamatan Balikpapan Kota			
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Facilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan			50	1,906,862,000	10	173,025,000	10	213,214,100	10	159,634,800	0	10	545,873,900	0	28.63						Kecamatan Balikpapan Kota;		Dikarenakan kegiatan MTQ tahun 2022 tidak jadi di adakan dan dialihkan ke tahun 2023 pada awal maret	
		Pemfasilitasian Perencanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan			1		1						1		100								Kecamatan Balikpapan Kota;		Dikarenakan kegiatan MTQ tahun 2022 tidak jadi di adakan dan dialihkan ke tahun 2023 pada awal maret	
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	Persentase	100	144,000,000	0	100	24,999,900	0	6,500,600	9,545,000	100	2,446,800	100	18,492,400	100	73.97		18,492,400	0	12.84	Kecamatan Balikpapan Kota					
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kegiatan			3	14,999,900	0	6,500,600	1	2,135,000		91,800	1	8,727,400	0	58.18							Kecamatan Balikpapan Kota;			
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis			2	10,000,000	0	0	1	7,410,000	1	2,355,000	1	9,765,000	0	97.65							Kecamatan Balikpapan Kota;			
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	1,225,272,500	0	100	90,000,000	0	39,846,000	21,275,000	100	27,507,000	100	88,628,000	100	98.48		88,628,000	0	7.23	Kecamatan Balikpapan Kota					
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Izin Non Usaha yang Diterbitkan	Izin			400	90,000,000	0	100	39,846,000	227	21,275,000	73	27,507,000	73	88,628,000	0	98.48							Kecamatan Balikpapan Kota;		
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	10.8	23,144,129,636	0	10	774,257,750	166,279,600	399,845,200	137,220,750	100	37,961,000	100	741,306,550	1000	95.74	100	741,306,550	925.93	3.2	Kecamatan Balikpapan Kota					
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Persentase	100	7,777,572,040	0	100	378,297,350	48,909,600	202,410,100	62,465,050	100	37,961,000	100	351,745,750	100	92.98		351,745,750	0	4.52	Kecamatan Balikpapan Kota					
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan			15	264,999,000	2	48,909,600	3	90,184,700	6	61,988,000	3.4	37,961,000	3.4	239,043,300	0	90.21					Kecamatan Balikpapan Kota;			
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan	dokumen			7	113,298,350	0	6	112,225,400	1	477,050	0	1	112,702,450	0	99.47							Kecamatan Balikpapan Kota;			
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persentase	100	15,366,557,596	0	100	395,960,400	117,370,000	197,435,100	74,755,700	100	0	100	389,560,800	100	98.38		389,560,800	0	2.54	Kecamatan Balikpapan Kota					
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas PKK Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan			17	160,000,000	3	117,370,000	5	30,986,900	8.9	9,020,000	0.1	0	0.1	157,376,900	0	98.36					Kecamatan Balikpapan Kota;			
1.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan			5	49,999,700	0	5	48,448,200	0	0	0	5	48,448,200	100	96.9							Kecamatan Balikpapan Kota;			
1.2.2.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat	Kegiatan			2	147,998,200	0	1	83,145,000	1	63,935,700	0	1	147,080,700	0	99.38							Kecamatan Balikpapan Kota;			
1.2.2.4	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kegiatan			3	37,962,500	0	2	34,855,000	1	1,800,000	0	1	36,655,000	0	96.56							Kecamatan Balikpapan Kota;			
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi tranribum di Kecamatan yang optimal	%	100	1,136,858,425	0	100	175,847,400	0	69,372,700	4,614,400	100	51,458,600	100	125,445,700	100	71.34	100	125,445,700	100	11.03	Kecamatan Balikpapan Kota					
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan tranribum	Persentase	100	1,136,858,425	0	100	175,847,400	0	69,372,700	4,614,400	100	51,458,600	100	125,445,700	100	71.34		125,445,700	0	11.03	Kecamatan Balikpapan Kota					
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Sinergitas Tranribum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan			28	175,847,400	0	7	69,372,700	12	4,614,400	9	51,458,600	9	125,445,700	0	71.34						Kecamatan Balikpapan Kota;			
2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	27.4				27								0		0		0		Kecamatan Balikpapan Kota					
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	79.8	92,984,077,552	0	79.4	15,313,213,300	2,147,381,940	3,428,342,887	3,373,346,056	79.21	3,029,321,239	79.21	11,978,392,122	0	78.22		11,978,392,122	0	12.88	Kecamatan Balikpapan Kota					
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69.75	159,998,000	0	69.35	19,998,000	0	0	0	53.9	19,311,300	53.9	19,311,300	0	96.57		19,311,300	0	12.07	Kecamatan Balikpapan Kota					
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen			2	19,998,000	0	0	0	0	2	19,311,300	2	19,311,300	100	96.57							Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	79.8	52,974,964,800	0	79.4	9,873,389,000	1,666,992,973	1,979,389,302	2,114,450,198	80.73	1,889,103,290	80.73	7,649,935,763	0	77.48		7,649,935,763	0	14.44	Kecamatan Balikpapan Kota					
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen			26	9,873,389,000	6	1,666,992,973	7	1,979,389,302	7	2,114,450,198	6	1,889,103,290	6	7,649,935,763	0	77								

Disusun di :
Balikpapan,
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022 - Triwulan 4																											
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II				III		IV				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	82.5				80.5										0		0		0		0		Kecamatan Balikpapan Selatan	
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	5,321,970,305	0	100	880,473,500		23,468,000		96,993,100		194,955,800	100	547,761,400	100	863,178,300	100	98.04	100	863,178,300	100	16.22	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022	
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	2,603,000,000	0	100	766,500,000	0		85,931,100		130,902,000	100	537,561,400	100	754,394,500	100	98.42	100	754,394,500	100	28.98	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022		
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan koordinasi pemerintahan dgn instansi vertikal	Kegiatan			35	766,500,000	10	0	10	85,931,100	10	130,902,000	5	537,561,400	5	754,394,500	0	98.42						Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)	
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	%	100	1,515,970,305	0	100	35,988,300		7,650,000		0	19,603,800	100	4,875,000	100	32,128,800	100	89.28	100	32,128,800	100	2.12	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022		
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	jumlah koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	Kegiatan			12	23,994,800	3		7,650,000	3	0	11,089,800		4,875,000	4	23,614,800	0	98.42						Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)	
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat	Jenis			3	11,993,500	1	0	1	0	1	8,514,000	0	1	8,514,000	0	70.99							Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja direalisasikan pada triwulan III Tahun 2022	
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	%	100	1,353,000,000	0	100	77,985,200		15,818,000		11,062,000		44,450,000	100	5,325,000	100	76,655,000	100	98.29	100	76,655,000	100	5.67	Kecamatan Balikpapan Selatan	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)	
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah ijin yang diterbitkan	ijin			700	77,985,200	200		15,818,000	200		11,062,000		44,450,000	300	5,325,000	300	76,655,000	0	98.29					Kecamatan Balikpapan Selatan;	
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	9	35,353,275,359	0	8	547,451,200		114,990,700		20,966,800		103,577,500	19.27	285,275,000	19	524,810,000	237.5	95.86	19	524,810,000	211.11	1.48	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022	
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	%	100	13,611,775,359	0	100	339,995,000		75,973,100		10,603,900		56,602,500	100	184,970,000	100	328,149,500	100	96.52	100	328,149,500	100	2.41	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022	
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan di kecamatan	Kegiatan			8	199,998,500	2		60,160,100	2		343,900	2	50,212,500	2	82,669,000	2	193,385,500	0	96.69					Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	jumlah laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Laporan			2	139,996,500	1		15,813,000	1		10,260,000		6,390,000		102,301,000	1	134,764,000	0	96.26					Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	%	100	21,741,500,000	0	100	207,456,200		39,017,600		10,362,900		46,975,000	100	100,305,000	100	196,660,500	100	94.8	100	196,660,500	100	0.9	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022	
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	lembaga			1	82,500,000			0	1		5,640,000		0		76,320,000	1	81,960,000	100	99.35					Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
1.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Kegiatan			12	54,982,300	1		5,554,300	2		3,997,500	6	15,990,000	2	23,985,000	2	49,528,800	0	90.08					Kecamatan Balikpapan Selatan;	
1.2.2.3	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	kegiatan fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan			2	34,998,700	1		33,463,300	1		725,400		0	1	34,188,700	0	97.69						Kecamatan Balikpapan Selatan;		
1.2.2.4	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Kegiatan			2	34,975,200			0		0	2		30,985,000		0	2	30,985,000	100	88.59					Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja direalisasikan pada triwulan III Tahun 2022
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	2,122,538,866	0	100	350,987,800		107,183,300		0		75,340,000	100	148,932,500	100	331,455,800	100	94.44	100	331,455,800	100	15.62	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022	
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	%	100	2,122,538,866	0	100	350,987,800		107,183,300		0		75,340,000	100	148,932,500	100	331,455,800	100	94.44	100	331,455,800	100	15.62	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022	
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dokumen pembayaran honor petugas ketenteraman dan ketertiban	dokumen			12	350,987,800			107,183,300		0		75,340,000	18	148,932,500	18	331,455,800	0	94.44						Kecamatan Balikpapan Selatan;	
		jumlah kegiatan sinergitas trantibum kecamatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kegiatan			18		2		2		6		2		2		0								Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28				27									0		0		0		0			Kecamatan Balikpapan Selatan	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	105,618,784,394	0	71	17,771,923,000		5,083,274,502		1,378,284,789		5,123,156,248	80.22	1,617,303,771	80.22	13,202,019,310	0	74.29		13,202,019,310	0	12.5	Kecamatan Balikpapan Selatan	Terdapat perbedaan indikator dan juga sudah ada pergantian Renstra sehingga kolom 6 tidak bisa diisi	
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76	50,000,000	0	68	0		0		0	69		0	69	0	0	0		0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022. Dan untuk realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen			2		0	1	0		0		0	1		0	0	0		0	0				Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja direalisasikan pada triwulan IV
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	75	68,247,924,334	0	71	12,327,854,000		3,354,499,062		1,194,555,183		3,813,181,560	80.77	0	80.77	8,362,235,805	0	67.83		8,362,235,805	0	12.25	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai	

Disusun di :
Balikpapan,
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2022 - Triwulan 4																													
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	81.45				80.85										0		0		0				Kecamatan Balikpapan Tengah			
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	4,799,880,361		0	100	819,255,550		365,667,800		197,271,050		127,528,000		79,590,000	0	770,056,850	0	93.99	0	770,056,850	0	16.04	Kecamatan Balikpapan Tengah			
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	3,442,973,595		0	100	680,305,600		268,737,750		185,590,550		113,614,000	100	66,420,000	100	634,362,300	100	93.25		634,362,300	0	18.42	Kecamatan Balikpapan Tengah			
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Facilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					62	680,305,600		268,737,750		28	185,590,550	31	113,614,000	3	66,420,000	3	634,362,300	0	93.25				Kecamatan Balikpapan Tengah;			
		Facilitasi perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					1		1								1		100							Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas	Persentase	100	611,836,356		0	100	58,950,000		51,087,500		810,000		2,880,000	100	2,250,000	100	57,027,500	100	96.74		57,027,500	0	9.32	Kecamatan Balikpapan Tengah			
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kegiatan					4	2,400,000	4	2,370,000			0		0	4	2,370,000	100	98.75						Kecamatan Balikpapan Tengah;			
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis					2	56,550,000	1	48,717,500	1	810,000		2,880,000		2,250,000	1	54,657,500	0	96.65					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilyanai Sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	745,070,410		0	100	79,999,950		45,842,550		10,870,500		11,034,000	100	10,920,000	100	78,667,050	100	98.33		78,667,050	0	10.56	Kecamatan Balikpapan Tengah			
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Izin non usaha yang diterbitkan	Izin					500	79,999,950	141	45,842,550	42	10,870,500	68	11,034,000	53	10,920,000	53	78,667,050	0	98.33						Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	12.75	27,409,579,062		0	12.75	556,299,400		174,133,850		118,152,400		192,515,050		137,910,000	0	622,711,300	0	111.94	0	622,711,300	0	2.27	Kecamatan Balikpapan Tengah			
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	Persentase	100	9,071,704,203		0	100	241,224,000		58,001,500		11,538,400		116,742,000	100	52,682,500	100	238,964,400	100	99.06		238,964,400	0	2.63	Kecamatan Balikpapan Tengah			
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kegiatan					2	175,062,400	2	43,480,000			0		86,960,000	2	173,920,000	100	99.35						Kecamatan Balikpapan Tengah;			
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	dokumen					9	66,161,600	5	14,521,500	1	11,538,400	3	29,782,000	3	65,044,400	0	98.31							Kecamatan Balikpapan Tengah;			
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Persentase	100	18,337,874,859		0	100	315,075,400		116,132,350		106,614,000		75,773,050	100	85,227,500	100	383,746,900	100	121.8		383,746,900	0	2.09	Kecamatan Balikpapan Tengah			
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Facilitasi lembaga kemasyarakatan	lembaga					1	65,799,500	1	16,825,000		43,129,500		1,537,500		3,667,500	1	65,159,500	100	99.03						Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan					1	74,827,150	1	71,225,650			0		0	1	71,225,650	100	95.19						Kecamatan Balikpapan Tengah;			
1.2.2.3	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Facilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan					2	159,216,950	1	26,951,700	1	49,588,300		74,235,550		81,560,000	1	232,335,550	0	145.92						Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.2.2.4	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Facilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan					2	15,231,800	1	1,130,000	1	13,896,200		0		0	1	15,026,200	0	98.65						Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	1,474,283,405		0	100	211,884,000	100	0		64,152,000		42,460,800		150,357,900	100	256,970,700	100	121.28	100	256,970,700	100	17.43	Kecamatan Balikpapan Tengah			
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum	Persentase	100	1,474,283,405		0	100	211,884,000		0		64,152,000		42,460,800	100	150,357,900	100	256,970,700	100	121.28		256,970,700	0	17.43	Kecamatan Balikpapan Tengah			
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen pembayaran Honor Petugas ketertiban dan keamanan umum	dokumen					12	211,884,000	3		0	3	64,152,000	3	42,460,800	3	150,357,900	3	256,970,700	0	121.28					Kecamatan Balikpapan Tengah;	realisasi diatas target karena adanya penambahan pagu dari Pokir Dewan	
		Kegiatan sinergilas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan					12		3			3		3		3		3		0						Kecamatan Balikpapan Tengah;		
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28				27										0		0		0		0		Kecamatan Balikpapan Tengah			
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	70.6	91,979,766,687		0	70	15,268,849,346		2,954,559,445		3,545,106,534		3,340,432,976	79.44	3,249,828,760	79.44	13,089,927,715	0	85.73		13,089,927,715	0	14.23	Kecamatan Balikpapan Tengah	Terdapat perbedaan indikator dan juga sudah ada pergantian Renstra sehingga kolom 6 tidak bisa diisi		
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	71.18	15,000,000		0	70	0		0	69.97		0			0	69.97		0	0	0		0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.	
2.1.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																												
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	70.6	60,561,219,920		0	70	10,551,957,000		2,063,879,344		2,449,264,152		2,325,794,181	83.25	1,946,437,631	83.25	8,785,375,308	0	83.26		8,785,375,308	0	14.51	Kecamatan Balikpapan Tengah			
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen					28	10,551,957,000	6	2,063,879,344	10	2,449,264,152	6	2,325,794,181	6													

Disusun di :
Balikpapan,
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Disusun di :
Balikpapan,
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2022 - Triwulan 4																												
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab		Penjelasan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81.45				81.25								0		0		0		0				Kecamatan Balikpapan Utara		
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	500	6,383,574,948		0	100	0	25	0	25	0	25	0	100	0	100	0	100	0	20	0			Kecamatan Balikpapan Utara		
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	19	33,514,348,697		0	15	586,217,700		14,246,400		119,961,750		200,770,100	15,27	136,229,900	15	471,208,150	100	80.38	15	471,208,150	78.95	1.41	Kecamatan Balikpapan Utara		
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Persentase	500	9,813,826,041		0	100	204,262,350	25	0	25	34,722,000	25	69,444,000	25	34,718,000	25	138,884,000	0	67.99		138,884,000	0	1.42	Kecamatan Balikpapan Utara		
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kegiatan					3	104,288,400	1	0	1	34,722,000	1	69,444,000	0	1	104,166,000	0	99.88						Kecamatan Balikpapan Utara;		
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	dokumen					18	99,973,950		0		0		0	12	34,718,000	12	34,718,000	0	34.73						Kecamatan Balikpapan Utara;	
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Persentase	350	23,700,522,656		0	60	381,955,350	15	14,246,400	15	85,239,750	15	131,326,100	15	101,511,900	15	332,324,150	0	87.01		332,324,150	0	1.4	Kecamatan Balikpapan Utara		
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Facilitasi lembaga kemasyarakatan Tk Kec	lembaga					2	134,724,600	1	14,246,400	1	12,585,000		78,316,500		26,505,000	1	131,652,900	0	97.72						Kecamatan Balikpapan Utara;	
1.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan					1	71,312,000		0		0	1	21,577,000		62,804,900	1	62,804,900	100	88.07						Kecamatan Balikpapan Utara;	
1.2.2.3	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Facilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan					6	135,919,750		0		43,352,250	2	21,319,500	4	33,779,000	4	98,450,750	0	72.43						Kecamatan Balikpapan Utara;	
1.2.2.4	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kegiatan					4	39,999,000		0	2	29,302,500		10,113,100		0	2	39,415,600	0	98.54						Kecamatan Balikpapan Utara;	
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	2,187,091,865		0	100	361,673,400	20	0	20	56,903,000	20	36,000,000	21	179,220,000	21	272,123,000	21	75.24	21	272,123,000	21	12.44	Kecamatan Balikpapan Utara		
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum	Persentase	100	2,187,091,865		0	100	361,673,400	20	0	25	56,903,000	25	36,000,000	25	179,220,000	25	272,123,000	0	75.24		272,123,000	0	12.44	Kecamatan Balikpapan Utara		
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen pembayaran honor petugas ketenteraman dan ketertiban umum	dokumen					12	361,673,400		0	3	56,903,000	3	36,000,000	6	179,220,000	6	272,123,000	0	75.24						Kecamatan Balikpapan Utara;	
		Kegiatan sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan					15		3		4		4		4		4		0							Kecamatan Balikpapan Utara;	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28				27								0		0		0		0				Kecamatan Balikpapan Utara		
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	88,224,530,291		0	71	16,444,990,400		4,477,500,317		3,803,993,640		3,598,274,190	81.83	3,872,080,642	81.83	15,751,848,789	0	95.79		15,751,848,789	0	17.85	Kecamatan Balikpapan Utara		
2.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	5,276,754,148		0	100	810,661,300	25	26,195,500	25	189,061,500	25	125,099,000	25	245,844,000	25	586,200,000	0	72.31		586,200,000	0	11.11	Kecamatan Balikpapan Utara		
2.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					61	810,661,300	2	26,195,500	30	189,061,500	10	125,099,000		245,844,000	10	586,200,000	0	72.31						Kecamatan Balikpapan Utara;	
		Pemfasilitasian perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					1		1							1		100								Kecamatan Balikpapan Utara;	
2.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas	Persentase	100	526,250,000		0	100	55,620,000	25	3,443,000	25	5,221,650	25	42,007,300	25	4,867,350	25	55,539,300	0	99.85		55,539,300	0	10.55	Kecamatan Balikpapan Utara		
2.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kegiatan					3	5,620,000	1	1,657,500		0	2	1,777,500		2,105,000	2	5,540,000	0	98.58						Kecamatan Balikpapan Utara;	
2.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis					1	50,000,000	1	1,785,500		5,221,650		40,229,800		2,762,350	1	49,999,300	100	100						Kecamatan Balikpapan Utara;	
2.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	580,570,800		0	100	97,770,500	25	50,290,400	25	19,389,200	25	0	25	19,140,000	25	88,819,600	0	90.84		88,819,600	0	15.3	Kecamatan Balikpapan Utara		
2.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Izin non usaha yang diterbitkan	Izin					1000	97,770,500	200	50,290,400	217	19,389,200	367	0	274	19,140,000	274	88,819,600	0	90.84						Kecamatan Balikpapan Utara;	
2.1.4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	75.25	185,640,000		0	74.25	0	0	0	0	0	0	0	0	74.20	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Utara		
2.1.5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	69	62,336,243,222		0	65	10,706,355,350		1,974,496,611		2,499,407,823		2,466,782,482	81.50	2,027,543,793	81.50	8,968,230,709	0	83.77		8,968,230,709	0	14.39	Kecamatan Balikpapan Utara		
2.1.5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen					28	10,706,355,350	6	1,974,496,611	8	2,499,407,823	8	2,466,782,482	6	2,0											

Disusun di :
Balikpapan,
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1	Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	%	67				67									0		0		0		0		0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	%	68	4,505,103,862			0	60	794,996,200	45,779,540	100	232,422,728	114,592,812	334,699,930	100	727,495,010	166.67	91.51	100	727,495,010	147.06	16.15		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	%	100	4,505,103,862			0	100	794,996,200	45,779,540	121	232,422,728	114,592,812	334,699,930	121	727,495,010	121	91.51	121	727,495,010	121	16.15		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.1.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dokumen					5	9,999,650		2,418,130	2	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1	9,918,130	0	99.18							Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
1.1.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan					5	19,999,300		10,536,410	3	1,817,000	2,500,000	1	4,409,000	1	19,262,410	0	96.32						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
1.1.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan					5	350,000,000		32,825,000	5	122,581,168	29,878,560	159,188,100	5	344,472,828	100	98.42							Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
1.1.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan					8	349,999,500		0	5	105,524,560	46,675,992	3	152,478,499	3	304,679,051	0	87.05						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
1.1.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dokumen					12	64,997,750	1	0	3	0	33,038,260	16,124,331	3	49,162,591	0	75.64							Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
1.2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitas Pendidikan Politik	%	100	9,403,258,142			0	66.6	1,708,210,142	10,210,101		41,515,681	66.67	63,731,646	1,457,351,186	66	1,572,808,614	100	92.07	66	1,572,808,614	66	16.73	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	%	500	9,403,258,142			0	100	1,708,210,142	10,210,101		41,515,681	50	63,731,646	50	1,457,351,186	100	1,572,808,614	100	92.07	100	1,572,808,614	20	16.73	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik d	%					100	1,608,215,142		10,210,101		36,663,931	75	28,891,646	25	1,431,191,186	100	1,506,956,864	100	93.7					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
1.2.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	Jumlah Laporan TP3D dan realisasi Bankue Parpol	dokumen					1	99,995,000		0		4,851,750	34,840,000	2	26,160,000	2	65,851,750	0	65.86						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
		Jumlah Monitoring Perkembangan Politik dan situasi lainnya	Kegiatan					12		3	3	3	3	3	3	3	0								Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;		
1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	%	430	5,865,705,700			0	83	1,806,024,800	9,922,000	36	96,813,750	15	115,989,914	22	1,247,872,049	92	1,470,597,713	110.84	81.43	92	1,470,597,713	21.4	25.07	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	%	500	5,865,705,700			0	100	1,806,024,800	9,922,000	50	96,813,750	6	115,989,914	44	1,247,872,049	100	1,470,597,713	100	81.43	100	1,470,597,713	20	25.07	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.3.1.1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen hibah dan bansos yang diverifikasi	dokumen					4	119,999,800		900,000		51,125,100	2	36,804,914	2	16,186,200	2	105,016,214	0	87.51					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
1.3.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	dokumen					10	150,000,000		0		39,097,650	1	55,403,300	1	41,430,920	1	135,931,870	0	90.62					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
1.3.1.3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Kegiatan					10	236,025,000		9,022,000	6	4,551,000	2	22,219,200		106,131,789	2	141,923,989	0	60.13					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
1.3.1.4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Penyaluran Hibah dan Bansos bidang Kesatuan Bangsa dan Ormas	berkas					4	1,200,000,000		0	0	0	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	100	83.33							Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
1.3.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Pengawasan dan Mediasi sengketa ormas	Kegiatan					12	100,000,000	3	0	3	2,040,000	3	1,562,500	3	84,123,140	3	87,725,640	0	87.73					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
2	Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase konflik sosial yang ditindaklanjuti	%	89				80									0		0		0		0		0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	%	451	3,628,271,567			0	80	1,017,000,000	13,791,200	25	274,190,786	15	170,785,149	15	525,034,158	80	983,801,293	100	96.74	80	983,801,293	17.74	27.11		
2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	%	500	3,628,271,567			0	100	1,017,000,000	13,791,200	25	274,190,786	25	170,785,149	25	525,034,158	100	983,801,293	100	96.74	100	983,801,293	20	27.11	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.1.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Tim P4GN dan PN dan Fasilitas Pencegahan Penggunaan Narkoba	%					100	817,000,000	15	8,150,000	35	165,759,500	25	149,075,465	25	464,123,270	100	787,108,235	100	96.34					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
2.1.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	L																								

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
									I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket					1	300,000,000		0	6	99,000,000		0	4	198,850,000	4	297,850,000	0	99.28					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		67.35	88.22					28.99	14.43			
Predikat Kinerja																		Sedang	Tinggi					Sangat Rendah	Sangat Rendah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		24.44	87.29									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Rendah	Tinggi									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		69	84.48					24.56	19.74			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sedang	Tinggi					Sangat Rendah	Sangat Rendah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		108.61	92.89					62.43	23.57			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Rendah	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				4. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Balikpapan																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				4. Pemberlakuan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 menjadi hambatan dalam melakukan penyesuaian indikator kinerja karena berubahnya nomenklatur program dan kegiatan serta adanya sub kegiatan sesuai peraturan tersebut. Sedangkan dalam dokumen Renstra periode tahun 2016-2021 tahun 2021 merupakan periode akhir Renstra Perangkat Daerah;																								
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																												

Disusun di :
Balikpapan,
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
							I		II		III		IV			12		13					14		15	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27										
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan,kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	98.69		95.53					0		0		0		0		0		0		Sekretariat Daerah			
1.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	%	497.73	200,745,038,982	0	97.73	36,439,490,150	25	2,007,212,116	25	7,839,215,249	25	9,365,169,048	25	11,935,362,131	100	31,146,958,544	103.09	85.48	100	31,146,958,544	20.09	15.52	Sekretariat Daerah	
1.1.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	Persentase	100	111,695,474,672	0	100	16,962,932,300	100	286,089,732		4,860,306,796		5,873,622,035		3,121,715,687	100	14,141,934,252	100	83.37		14,141,934,252	0	12.66	Sekretariat Daerah	
1.1.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hibah Bansos Kepada Instansi Vertikal	dokumen			1	15,863,718,800		213,230,000		4,733,041,413		5,684,308,164	1	2,695,287,709	1	13,325,867,286	100	84					Sekretariat Daerah;		
		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Permasalahan Lingkungan Perkotaan	dokumen			1		1							1		100							Sekretariat Daerah;		
		Jumlah Kegiatan Operasi Penerbitan dan Pengawasan Tranbit serta Fasilitas TNI/POLRI	Kegiatan			5		1		2				2	2		0							Sekretariat Daerah;		
		Jumlah Kegiatan Posko Pemeliharaan Keteritban Umum dan Kantarantibmas	Kegiatan			3				1		1		1	1		0							Sekretariat Daerah;		
		Jumlah Pelaksanaan Peringatan HUT RI	Kegiatan			1					1				1		100							Sekretariat Daerah;		
1.1.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Paten	dokumen			1	824,213,500		27,464,250		92,731,149	1	135,833,051		297,933,462	1	553,961,912	100	67.21					Sekretariat Daerah;		
		Jumlah Fasilitas Tertib Toponimi dan Pemetaan Wilayah	Kegiatan			1						1			1		100							Sekretariat Daerah;		
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Melalui Lomba Camat Berprestasi	Kegiatan			1						1			1		100							Sekretariat Daerah;		
		Jumlah Pembinaan Administrasi Kepada Kelurahan dan Kecamatan	Kegiatan			4		1		1	1		1		1		0							Sekretariat Daerah;		
1.1.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Terselesaikan	dokumen			1	275,000,000	1	45,395,482		34,534,236		53,680,820		128,494,516	1	262,105,054	100	95.31					Sekretariat Daerah;		
1.1.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Persentase	450	61,635,176,015	0	90	11,723,329,990	25	171,544,500	25	1,872,431,791	25	2,965,675,596	25	5,213,641,068	25	10,223,292,955	0	87.2		10,223,292,955	0	16.59	Sekretariat Daerah	
1.1.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen kegiatan keagamaan yang difasilitasi	dokumen			1	10,403,330,100		167,198,500		981,147,133		2,919,922,637	1	4,921,243,505	1	8,989,511,775	100	86.41					Sekretariat Daerah;		
		Jumlah dokumen penerimaan Beasiswa Stimulan	dokumen			1					1				1		100							Sekretariat Daerah;		
		Jumlah dokumen penerima bantuan hibah keagamaan	dokumen			1								1			100							Sekretariat Daerah;		
1.1.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Balikpapan	dokumen			1	1,244,999,800		4,346,000		891,284,658		20,757,779	1	253,867,563	1	1,170,256,000	100	94					Sekretariat Daerah;		
		Jumlah dokumen pelaksanaan pemberian bantuan Natura untuk santri Pondok Pesantren yang bermukim	dokumen			1			1						1		100							Sekretariat Daerah;		
1.1.2.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Kesegaran Jasmani	dokumen			1	75,000,000	0		0			24,995,180	1	38,530,000	1	63,525,180	100	84.7					Sekretariat Daerah;		
1.1.3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase	500	10,445,474,379	0	100	1,806,704,050	25	37,511,507	25	348,079,291	25	420,839,997	25	592,484,323	25	1,398,915,118	0	77.43		1,398,915,118	0	13.39	Sekretariat Daerah	
1.1.3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase penyusunan produk hukum yang telah selesai diharmonisasi dan difasilitasi sesuai dengan peraturan penyusunan atau pembentukan produk hukum daerah	%			60	311,255,000	10	0	30	102,346,055	40	96,896,916	20	82,714,644	100	281,957,615	166.67	90.59					Sekretariat Daerah;	Kekeliruan dalam menetapkan target kinerja yang rendah	
1.1.3.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase fasilitasi pemberian bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	%			100	728,345,800	25	17,755,563	30	130,171,536	25	97,134,859	20	172,679,788	100	417,741,746	100	57.35					Sekretariat Daerah;		
		Persentase Nilai Ranham	%			100			50			25		20	95	95								Sekretariat Daerah;	terdapat belanja administrasi sidang yang tidak dibelanjakan sepenuhnya, dan belanja kursus yang rencananya dilakukan secara Offline menjadi secara Online	
1.1.3.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah	Kegiatan			6	767,103,250		19,755,944	6	115,561,700	28	226,808,222		337,089,891	28	699,215,757	0	91.15					Sekretariat Daerah;	Kegiatan sosialisasi produk hukum yang direncanakan per kecamatan terrealisasi pelaksanaan kegiatan per kelurahan	
		Jumlah pembentukan kelompok keluarga sadar hukum yang dibina di Kota Balikpapan	Kelompok			6		6							6		100							Sekretariat Daerah;		
		Persentase produk hukum daerah yang dikodifikasikan	%			100		25		25		25		20	95	95								Sekretariat Daerah;		
		Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan	%			100		10		30		40		20	100	100								Sekretariat Daerah;		
1.1.4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	Persentase	402.19000000000005	16,968,913,916	0	69.64	5,946,523,990	25	1,512,066,377	25	758,397,369	25	104,831,420	25	3,007,521,053	25	5,382,816,219	0	90.52		5,382,816,219	0	31.72	Sekretariat Daerah	
1.1.4.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kegiatan			4	5,816,524,700	4	1,512,066,377		746,818,389		28,200,620		2,980,832,095	4	5,267,917,481	100	90.57					Sekretariat Daerah;		
		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan perayaan HUT Kota Balikpapan	Kegiatan			1		1							1		100							Sekretariat Daerah;		
1.1.4.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kegiatan			1	129,999,200		0		11,578,980	1	76,630,800		26,688,958	1	114,898,738	100	88.38					Sekretariat Daerah;		
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Adm. Pembangunan	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	100		100										0		0		0		0		Sekretariat Daerah		
2.1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	%	500	15,506,357,648	0	100	2,961,001,437	25	231,308,182	25	380,775,514	25	495,1												

Disusun di :
Balikpapan,
Sekretaris Daerah
Kota Balikpapan

MUHAIMIN
196810081995031002

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2022 - Triwulan 4																											
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab		Penjelasan			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4																					16	27		
1	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Nilai	78				70						0		0		0		0		0				Sekretariat DPRD	
1.1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	%	100	180,806,140,798	0	100	30,594,448,150	2,777,038,630	2,886,177,796	4,653,160,137	72.1	14,190,218,822	72	24,506,595,385	72	80.1	72	24,506,595,385	72	13.55	Sekretariat DPRD		Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan			
1.1.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	37,318,449,635	0	100	7,350,329,750	1,865,937,581	556,203,841	600,139,042	100	3,710,375,146	100	6,732,655,610	100	91.6	100	6,732,655,610	100	18.04	Sekretariat DPRD		Realisasi kinerja tercapai			
1.1.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dokumen					5	29,999,850	0		0	3		0	2	12,042,000	2	12,042,000	0	40.14			Sekretariat DPRD;	Efisiensi Anggaran		
1.1.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen					40	3,570,329,900	1	120,300,000		516,256,215	20	503,210,034	19	2,073,511,549	19	3,213,277,798	0	90			Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai		
1.1.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen					4	1,900,000,000	1	986,126,605	0	14,381,804	2	30,479,741	1	804,878,030	1	1,835,866,180	0	96.62			Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai		
1.1.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen					4	1,700,000,000	1	759,510,976	0	25,565,822	2	50,707,967	1	791,422,067	1	1,627,206,832	0	95.72			Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai		
1.1.1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	dokumen					1	150,000,000		0		0	1	15,741,300		28,521,500	1	44,262,800	100	29.51			Sekretariat DPRD;	Efisiensi Anggaran		
1.1.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	10,800,000,000	0	100	2,582,474,250	53,124,019	67,088,340	630,201,633	100	1,088,029,415	100	1,838,443,407	100	71.19	100	1,838,443,407	100	17.02	Sekretariat DPRD		Realisasi kinerja tercapai			
1.1.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen					1	749,999,700	1	5,262,400		50,018,240		111,593,375		457,797,112	1	624,671,127	100	83.29			Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai		
1.1.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen							1	744,999,700		0		0		385,271,917	1	682,705,870	100	91.64			Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai		
1.1.2.3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen							1	499,999,850	1	29,127,300		27,867,500		193,846,310	1	250,841,110	100	50.17			Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan		
1.1.2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dokumen							1	499,975,000	1	18,734,319		17,070,100		72,372,743	2	123,729,206	1	231,906,368	100	46.38		Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	
1.1.2.5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	dokumen							2	60,000,000		0		0		28,129,698	2	15,222,834	2	43,352,532	100	72.25		Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai	
1.1.2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen							1	27,500,000		0		0		4,966,400	1		100	18.06			Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan		
1.1.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	500	75,350,000,000	0	100	2,695,408,300	17,751,100	231,560,217	291,039,553	41.82	941,228,679	51	1,481,579,749	51	54.97	51	1,481,579,749	10.2	1.97	Sekretariat DPRD		Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan			
1.1.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan							48	515,008,500	12	8,372,400	12	28,787,800		52,340,700	3	186,740,576	3	276,241,476	0	53.64		Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	
1.1.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan							48	480,478,500	6	9,378,700	6	40,235,600		69,945,000	14	143,317,250	14	262,876,550	0	54.71		Sekretariat DPRD;		
1.1.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan							48	480,478,500		0	12	70,008,067		108,843,853	4	203,534,046	4	382,385,966	0	79.58		Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	
1.1.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan							48	423,499,950		0	12	77,790,650		55,410,000	7	95,549,890	7	228,750,540	0	54.01		Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	
1.1.3.5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	dokumen							1	29,997,000		0		3,302,400		0	1	8,942,500	1	12,244,900	100	40.82		Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	
1.1.3.6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	dokumen							48	713,424,100		0		0		4,500,000	15	303,144,617	15	307,644,617	0	43.12		Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	
1.1.3.7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	dokumen							1	52,521,750		0		11,435,700		0	1	0	1	11,435,700	100	21.77		Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	
1.1.3.8	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan								0		0		0		0		0	100	0				Sekretariat DPRD;	Tidak dianggarkan pada tahun 2022, dan sudah termasuk dengan kegiatan komisi 2	
1.1.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	%	500	27,532,151,196	0	100	8,485,377,050	503,791,660	992,631,330	1,998,802,451	15	4,384,042,964	75	7,879,268,405	75	92.86	75	7,879,268,405	15	28.62	Sekretariat DPRD		Target tidak tercapai dikarenakan beberapa subkegiatan tidak dilaksanakan			
1.1.4.1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	dokumen							5		0		0		0		0	0	0					Sekretariat DPRD;	Anggaran Subkegiatan ini dihapus pada APBD Perubahan	
1.1.4.2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen							90	1,907,772,050	22	107,498,400	20	193,229,620	8	51,205,973	40	1,306,234,632	40	1,658,168,625	0	86.92		Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai	
1.1.4.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen							12	4,829,965,000	3	235,900,000	3	662,541,000	3	1,459,044,900	3	2,394,458,166	3	4,751,944,066	0	98.38		Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai	
1.1.4.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang							6	1,201,700,000	1	87,297,000	1	136,860,710		425,951,728	4	1,004,429,698	4	1,004,429,698						

